SUNGAI, KAMPUNG, DAN KOTA

Aghniyar Rohmi Kayyisa | Akhmad Ramdhon | Dita Rahayu Margatino
Febrianti Dwi Lestari | Dwi Murniningsih | Siti Zunariyah

Sungai, Kampung, dan Kota

Aghniyar Rohmi Kayyisa | Akhmad Ramdhon | Dita Rahayu Margatino
Febrianti Dwi Lestari | Dwi Murniningsih | Siti Zunariyah

Sungai, Kampung, dan Kota
@penulis

Penulis Aghniyar Rohmi Kayyisa, Akhmad Ramdhon, Dita Rahayu Margatino, Febrianti Dwi Lestari, Dwi Murniningsih, dan Siti Zunariyah
Penyunting Akhmad Ramdhon dan Siti Zunariyah
Perancang Sampul Ibnu Teguh W
Penata Letak Ibnu Teguh W

Diterbitkan oleh:
Buku Litera
Minggiran MJ II/1121, RT 53/15 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta.
Telp. 08179407446 e-mail: bukulitera@gmail.com

Bekerjasama dengan

KampungnesiaPress dan Sosiologi FISIP UNS

Cetakan Pertama, 2017
14 x 21 cm, xvi + 146 hal
ISBN : 978-602-6751-62-1

DAFTAR ISI

PRAKATA

Buku ini adalah seri publikasi yang sudah lama kami inginkan untuk dicetak dan didistribusikan secara luas. Agenda yang tidak bisa lepas dari rangkaian proses mengajar di kelas-kelas Sosiologi Perkotaan, Sosiologi Lingkungan, Sosiologi Pembangunan, Perubahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret. Skema awal dikelas-kelas untuk belajar dan bekerja mendokumentasikan kampung kemudian beririsan dengan sungai dan keseharian warga yang ada disekitarnya. Irisan-irisan tersebut diawali dari proses belajar ketika kelas mulai jalan untuk mendokumentasikan Kali Pepe, dikisaran bulan Agustus-Desember 2015 dan membuat seri publikasi yang lain dari semua catatan yang masuk sampai tengah tahun 2016. Momentum tersebut bersamaan dengan dilaksanakannya Kongres Sungai Indonesia 2015 di Purbalingga Jawa Tengah dan seri pertemuan yang difasilitasi Rujak Center for Urban Studies dalam skema Urbanisme Warga sepanjang periode 2015-2016. Momen yang bisa memberi kami kesempatan sekaligus energi baru memasuki ruang-ruang baru dalam kajian ekologi perkotaan dengan berbagai dimensinya.

Agenda lanjutan yang coba kami kembangkan selepas tugas kelas dalam menyelesaikan seri dokumentasi adalah merancang beberapa tema yang bisa dieksekusi lebih lanjut dalam format riset yang intens. Tentunya skema tersebut tidak bisa lepas dari beberapa kesempatan yang telah terbangun sebelumnya, dimana kami bisa mengakses berbagai simpul komunitas yang bergiat dalam isu sungai di kampung-kota. Oleh karenanya, kesempatan tersebut

kami awali dengan mengembangkan data dan informasi lebih lanjut di beberapa segmen akhir Kali Pepe di Surakarta. Seraya jalan di Kali Pepe, pertemuan yang tidak direncanakan juga memberi kami kesempatan untuk mengakses Kali Tegal Konas di area Pasar Kliwon dan Sangkrah di Surakarta. Upaya untuk membuka ruang-ruang baru dalam kajian ekologi perkotaan juga menghadirkan kesempatan untuk mendokumentasikan proses yang lebih dinamis di Kali Gajah Wong maupun Kali Code di Yogyakarta. Mendokumentasikan dan memaparkannya bersama-sama menjadi upaya kecil kami untuk mempromosikan dan membuka ruang belajar baru bagi upaya memahami dinamika komunitas dan hubungannya dengan perubahan ruang-ruang fisik kota.

Sebagai sebagai upaya awal, kami mencoba merekam beragam informasi baik yang bersifat fisik maupun non fisik di sepanjang Kali Pepe, Tegal Konas, Kali Gajah Wong hingga Kali Code. Merancang berbagai agenda untuk menggali informasi dan merekam berbagai fragmen warga dengan dinamika yang menyertainya menjadi tahapan dari upaya mereproduksi pengetahuan terkait hubungan antara perubahan sungai, perilaku warga dengan semua masalah dan tantangannya hingga agenda perubahan kota. Upaya yang ambisius yang coba kami mulai dengan merilisnya sekaligus menghadirkan konsekuensi lewat beberapa agenda yang secara bertahap sedang kami lakukan, beberapa diantaranya kami distribusikan dalam platform Kampungnesia (dot) org. Sebuah rangkaian yang terhubung antara sesi pertemuan dikelas-kelas, dengan proses belajar yang menempatkan warga menjadi bagian dari proses anak-anak muda membentuk pengetahuannya terkait tempat dimana warga tinggal. Setiap ada kesempatan untuk meluaskan agenda maka akan selalu ada tantangan yang juga menyertaninya. Maka kami percaya setiap bentuk pengetahuan diproduksi akan bermanfaat bagi banyak pihak, mengingat perubahan-perubahan yang ada tidak menghadirkan keping-keping pengetahuan yang ada.

Ada banyak kekurangan yang menyertai dari setiap upaya sederhana yang kami lakukan namun kehadiran publikasi ini tidak lepas dari kontribusi banyak pihak. Secara khusus ucapan terima kasih yang tulus harus kami haturkan pada seluruh warga yang senantiasa ramah untuk ditemui sembari berbagi banyak hal dan senantiasa merangkai Kali Pepe, Kali Tegal Konas, Kali Gajah Wong maupun Kali Code agar bisa lebih baik. Diatas semua itu, kekurangan yang ada akan menjadi tanggung jawab kami dalam upaya untuk terus memproduksi pengetahuan bersama anak-anak muda dikelas. Kemauan dan komitmen untuk mempublikasikan semua bentuk temuan sederhana adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk mendistribusikan serpihan-serpihan pengetahuan yang kami rekam, sehingga dapat menjadi bagian dari upaya menopang kota yang berubah. Dimana kita semua menjadi bagian dari perubahan yang ada, terlibat atau tidak terlibat tetap akan menempatkan perubahan sebagai agenda bersama. Memilih menjadi bagian dari perubahan tersebut menempatkan kami untuk belajar dan berproses memahami beragam agenda yang ada, sekaligus menjadi salah satu alasan bagi hadirnya buku ini.

Nuwun
Tim Penulis

KAMPUNG, SUNGAI, DAN ASA KOTA

Air, Angin dan Jejak Peradaban

Air menjadi simpul awal bangunan peradaban. Narasi peradaban yang dibentuk oleh gelombang air memanjang dari benua Afrika, Eropa, maupun Asia, membentang dari jejak peradaban klasik hingga modern. Interaksi antar peradaban kemudian disulam lewat kisah-kisah ekspedisi antar budaya sekaligus membentuk jejaring peradaban yang tumpang tindih antara kepentingan kebudayaan, teknologi hingga kekuasaan. Jejaring interaksi yang terbangun sesudahnya kemudian menjadi simpul yang membelah pengetahuan atas peradaban dunia yang ada. Gelombang perubahan lalu menjadi pola yang membentuk formasi peradaban yang silih berganti saling berkelindan dengan beragam kepentingan yang diwariskan terus menerus. Semua kisah lalu menjadi tumpukan pengetahuan yang dicatat secara tekun oleh sarjana/orientalis sekaligus memberi kita pelajaran besar tentang arti penting masa silam.

Gelombang besar dan awal adalah proses indianisasi yang membentuk landskap kebudayaan khas Asia (Austro-Asiatik), tentunya tanpa mengabaikan pengaruh Indochina. Temuan atas teks-teks epigrafik dan jejak-jejak prasasti memungkinkan rekonstruksi yang panjang sebagai tesis untuk mengurai munculnya peradaban yang saling terhubung. Kebudayaan air dan teknologi yang mengantarainya menghadirkan narasi asal muasal Fu-nan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Sailendra hingga Airlangga. Jalur-jalur pelayaran di Selat Sunda dan Selat Malaka terbuka untuk kepentingan perdagangan dan kekuasaanlah yang mendinamisir kehidupan awal

abad Masehi-sampai setidak-tidaknya 10 abad kemudian oleh Hindu-Buddha. Penanda yang paling khas sekaligus megah dan dekat dengan kita hari ini adalah keberadaan Borubudur sebagai jejak Buddhisme Mahayana, sekaligus dengan penopangnya yaitu candi Mendut dan candi Pawon. Juga epik Loro Jongrang di Prambanan dan candi-candi Hindu yang mengiringi keberadaan Sinkreteisme Jawa pada saat bersamaan. Catatan kesaksian kunjungan Marco Polo ke nusantara meninggalkan rekaman hubungan antar peradaban, dan menempatkan kebudayaan nusantara menjadi salah satu mata rantai kebudayaan Hindu-Buddha. Jejak artefaknya membentang dan berserak di sungai-sungai Benggala-India, Menam-Chiang Mai, Mekong, Mai Ping-Thai, Siem Reap-Angkor, Rokan, Perak-Melayu, hingga Bengawan Solo dan Brantas-Jawa.

Angin laut menghembus tiang-tiang layar yang semakin riuh dilautan, pada akhirnya membuka jejak peradaban baru selepas Hindu-Buddha yaitu kebudayaan Islam yang masuk bersimpangan dengan ekspansi ambisi kebudayaan Eropa (diawali oleh Portugis). Mengulang jalur air indianisasi sebagai jalur yang semakin terbuka bagi akses perdagangan global, maka lautan tengah Asia Tenggara jadi tempat pertemuan yang semakin ramai. Angin yang tidak begitu kencang dan bisa ditebak, dengan angin musim yang bertiup dari barat atau selatan di bulan Mei hingga Agustus dan dari barat laut atau timur laut pada Desember-Maret. Air dan hutan menjadi kombinasi terbaik agar teknologi transportasi Kapal semakin sempurna bersamaan dengan pengalaman yang semakin luas atas akses sungai yang membelah daratan. Perniagaan yang semakin maju ada abad 15-17, berkontribusi pada terbentuknya pola-pola permukiman yang merujuk pada nilai-nilai kekuasaan Islam yang mulai menyebar luas di nusantara. Beragam perjumpaan niagalah yang pada akhirnya memberi bingkai terakhir pada konstruksi kota-kota yang terbentuk sesudahnya. Perniagaan bahan dasar alam (lada, cengkih, pala, teh, kopi, gula) bertahap menjadi modal transaksi baru menggantikan emas dan perak. Dimana semuanya disemai bersama

angin yang melalui Pegu, Ayutthaya, Pnompenh, Hoi An, Melaka, Petani, Brunei, Pasai, Aceh, Banten, Jepara, Gresik hingga Makassar.

Jalur-jalur sungai yang mengurai sumbu-sumbu penghasil bahan alam dipedalaman menjadi penghubung utama bagi *Jung/ Prahu* yang mengangkut material alam bagi pesta-pesta bangsawan Eropa. Administrasi perdagangan serta merta diperlukan sebagai bagian tata kelola untuk mengakumulasikan kapital yang ada. Kota-kota administratif menjadi konsekuensi politik ekonomi kolonial, mengumpulkan sirkulasi aktivitas niaga yang bermula dari titik bandar dan pelabuhan yang saling terhubung. Berbagai konsensi perjanjian yang dibuat adalah hasil negosiasi bersama antara para pedagang dengan otoritas tradisional yang masih bertahan layaknya Champa, Ayutthaya, Sriwijaya, Jayakarta, Banten, Aceh maupun Mataram (Hall, 1981; Reid, 1988; Lombard, 1996). Kota berlahan bertransformasi jadi simpul-simpul baru teritorial yang lebih cair oleh mobilitas manusia dan barang yang menstimulasi gelombang perubahan besar. Muncul jejaring niaga oleh kota-kota seperti Promi, Pagan, Syriam, Rangoon-Burma, Chiengmai, Nakhon-Siam, Luang Prabang-Laos, Cochin cina-Hoi An, Johor, Pahang-Malaka, Palembang, Jambi, Semarang, Surabaya, hingga Blambangan di nusantara. Konstruksi kota pada akhirnya berinvestasi bagi gagasan negara-bangsa yang menjembatani desakan kapitalisme Eropa yang ekspansif lewat agenda kolonialisasi.

Kota, Kampung dan Sungai yang Berubah

Pola perkembangan kota-modern senantiasa diiringi dinamika. Tantangan untuk bertahan dalam memenuhi kebutuhan pun segera melahirkan beragam bentuk kapasitas nilai, praktek maupun lembaga sebagai bentuk respon. Salah satunya adalah mekanisasi dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Ekonomi pasar menjadi penemuan yang menggantikan tradisi tukar-menukar sejak sistem agraria yang ada mencapai surplus. Bagi masyarakat kota,

pasar kemudian menjadi akses ke beragam kebutuhan dasar. Dengan demikian, perilaku ekologis masyarakat kota yang menempatkan sungai dan pasar sebagai salah satu pusatnya, secara perlahan menggeser sistem agraris dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya, pengertian kota terbatasi pada beberapa kriteria, antara lain aspek jumlah penduduk sebagai batasan kewilayahan dengan beragam standar, tersedianya aturan-aturan bagi warga, cara hidup yang berbasiskan non-agraris dan bersifat kosmopolitan. Kota mesti dipahami pada aras kebebasan dan rasionalitas, yang memungkinkan tempat tinggal bagi penduduk yang mata pencahariannya adalah berniaga-pekerjaan dalam sistem ekonomi modern. Dalam lanskap kota, daya dukung teknologi turut mengintensifkan interaksi antar peradaban. Teknologi kemudian berkembang untuk kebutuhan perdagangan yang berbasiskan kebudayaan sejarah maritim yang panjang, serta konflik-perang yang mempercepat regenerasi kekuasaan. Baik perdagangan maupun konflik, sama-sama mengintensifkan persebaran dan persinggungan pelbagai kebudayaan dengan kompleks.

Periode kolonialisasi dengan motif penyebaran keyakinan, perluasan pasar, dan perluasan kekuasaan semakin ekspansif setelah teknologi perang dan perdagangan semakin matang. Dengan ditemukannya inovasi teknologi (renaisance) yang dapat memaksimalkan proses produksi, masyarakat perkotaan lantas memulai gerak peradaban baru menjadi masyarakat industrial. Komersialisasi pelbagai aspek kehidupan makin jamak setelah penentuan nilai tukar dikonversi ke pelbagai alat tukar seperti uang, emas, perak. Struktur sosial pun terbelah dalam stratifikasi yang didasarkan atas kepemilikan aset-aset, sekaligus mentransformasi praktek-praktek kekuasaan feodalistik. Kondisi ini menjadi bingkai akhir bagi situasi kota-kota di beberapa belahan dunia, wajah kekinian kota-kota terus bergerak mengikuti arah gerak kota-kota di Eropa. Kondisi tersebut merupakan sesuatu yang tak terhindarkan karena lamanya masa kolonialisasi. Seiring dekolonialisasi, dinamika

perkembangan kota tetap mengalami kecenderungan yang hampir sama dengan tren perkembangan kota-kota di Eropa-ditandai dengan menjalarnya urbanisasi.

Kini kita mewarisi ruang-ruang yang penuh hiruk pikuk. Kota dengan identitas yang berlapis-lapis dibentuk oleh keping peradaban yang beragam. Rekaman atas jejak kuno kebudayaan Hindu-Buddha masih sangat mudah untuk dikenali sebagai bagian yang tak terpisahkan, jejak kebudayaan Islam serta merta menjadi pewaris kehidupan kontemporer kita hari bersama ruang yang terbentuk secara kosmologis. Rantai kekuasaan tradisi Mataram-yang menegaskan generasi akhir pengelola *jagad gedhe* dan *cilik* masih mengendap memandu praktek keseharian warga kota. Dan yang paling akhir sekaligus mengubah wajah kota kita adalah kolonialisasi yang menggeser jalur transportasi yang berabad-abad melalui laut-sungai, ke daratan dengan rel yang dibentang memanjang untuk menggerakkan mesin uap, lokomotif, dan gerbong agar bisa menggerakkan barang-barang komiditi jauh lebih banyak ke jantung-jantung Eropa. Daya topang kota agar eksistensinya hadir menjadi kebudayaan maka kota harus mapan oleh ketersediaan pelbagai kebutuhan infrastruktur jalan untuk kepentingan ekonomi : pabrik, industri, sekolah, toko, gudang, lampu, kendaraan bermesin, stasiun, hingga bank-bank. Kota berubah bersama modernitas namun pada saat bersamaan penuh paradoks.

Konsekuensi kota yang tumbuh angkuh oleh proyek-proyek pembangunan adalah mengabaikan kampung sebagai entitas yang lebih awal hadir. Narasi kampung dan sungai yang hari ini kita warisi patah dan tak terkoneksi dengan tapak peradaban yang membentuk kota-sebelumnya (Ramdhon, 2016). Kampung lalu bergerak otonom bersama memori dan mental warga yang dibentuk oleh lapis-lapis kenangan atas tradisi untuk bertahan disamping derunya kota yang berlari kencang. Anak-anak kota mengalami amnesia yang parah oleh sebab tak adanya pegangan untuk memahami kota mereka, kampung mereka dan hubungan antara keduanya. Berjalan ke kota

dari kampung, seperti hendak berkunjung ke kota-kota lainnya: semua seragam, asing dan terburu-buru. Seperti ingin lekas pulang ke rumah dan kampung untuk bisa segera bertegur sapa dengan sesama di pos ronda, buk tempat kumpul, berlarian digang nan sempit, memasak bersama diteras, bermain layangan dilapangan, hingga menjemur kasur dan cucian dihalaman. Sungai-sungai dikampungpun diam membisu: pasrah menjadi halaman belakang kota, jadi tempat mengakumulasikan beban pembangunan kota-terus menerus. Sungai dipaksa semakin menyempit, tak punya ruang karena ditimpa bangunan, trotoar dan jalan raya yang harus dibentuk sebagai sebagai penanda kota. Tumpukan sampah, limbah industri hingga aliran air hujan tak lagi sanggup ditopang oleh sungai-sungai kita hari ini. Kampung dan sungai termarjinalkan oleh kita semua, kampung-kota dan sungai yang dulu pernah membentuk kota kelak akan mengubur kota bersama alam yang tak lestari.

BAB I
KALI PEPE SURAKARTA

Kampung-Kota di Ujung Kali Pepe

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di pulau Jawa yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) di 17 Kabupaten dan 3 kota yang membentang di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Maka tidaklah mengherankan, jika di masa lampau Bengawan Solo digunakan sebagai jalur transportasi air yang menghubungkan antar wilayah tersebut. Sebagai Daerah Aliran Sungai, Bengawan Solo memiliki beberapa anak sungai. Salah satu anak sungai yang kini mengalir di tengah-tengah kota Surakarta adalah Kali Pepe dimana pada saat itu juga pernah digunakan sebagai jalur transportasi guna mengangkut barang-barang komoditi menuju Pasar Gede Hardjonegoro. Sejak dahulu aliran Bengawan Solo merupakan salah satu jalur transportasi dan perdagangan yang sangat ramai pada masa itu. Terlebih dengan keberadaan pusat pemerintahan Keraton Surakarta yang menambah kesan bahwa wilayah ini merupakan kota dengan letak geografis yang strategis. Maka menjadi hal yang wajar ketika kemudian pada akhirnya Surakarta tumbuh sebagai kota dengan penduduk multi etnis. Alasannya cukup jelas, karena sejak dahulu Surakarta dianggap sebagai kota destinasi untuk berdomisili, dengan pengelolaan tempat tinggal berdasarkan etnis. Hal ini dilakukan dengan tujuan tertentu, utamanya adalah agar pemerintah kolonial lebih mudah melakukan pengawasan. Termasuk tempat tinggal ara abdi dalem yang ditempatkan berdasarkan jenis pekerjaannya dan fungsinya dalam melayani Keraton Surakarta.

Tumbuh kembang kota beririsan dengan proses urbanisasi yang panjang dan mengalami peningkatan pasca kemerdekaan. Beragam faktor dan penjelasan mendorong warga berbondong-bondong ke kota dan setibanya di kota, lahan-lahan yang ada tidak dapat diakses begitu saja oleh setiap orang. Maka pilihan-pilihan atas beragam keterbatasan yang ada membuat para pendatang tersebut mulai melirik lahan kosong berbentuk rawa-rawa, dan sejenisnya. Bagi mereka, rawa-rawa tersebut merupakan lahan yang "tak bertuan". Padahal, lahan-lahan kosong tersebut memang sengaja dikosongkan karena fungsinya sebagai lahan penyerap siklus air di wilayah perkotaan. Tetapi tidak ada pilihan lain. Lahan-lahan kosong tersebut tetap bergeser dan berubah sebagai pemukiman seiring pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang mustahil berhenti. Hingga pada akhirnya, secara perlahan rawa-rawa tersebut berubah menjadi perkampungan seperti yang terjadi saat ini. Inilah situasi yang ini terjadi berdasarkan narasi beberapa di kampung-kampung bantaran Kali Pepe yang mungkin bisa juga menjadi representasi atas pertumbuhan kampung-kota di nusantara.

Kampung-kota tumbuh dengan pola pemukiman yang berimpit. Hal ini terjadi atas konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk yang artinya juga menambah kebutuhan lahan sebagai pemukiman. Menjadi hal yang kemudian penting untuk dianalisis adalah mengenai alasan mengapa orang-orang memilih kampung-kampung tersebut sebagai tempat tinggal. Selain karena konsekuensi dari urbanisasi, secara geografis kampung-kampung tersebut berada di pinggiran Kali Pepe, tepatnya di aliran hilir sungai semakin memadat. Kondisi tersebut adalah konsekuensi lebih lanjut, mengingat beragam fasilitas publik yang mengitari kawasan di bagian hilir Kali Pepe. Di antaranya adalah dekat dengan pusat kota seperti kantor Balaikota, pusat budaya seperti Keraton, Alun-alun Lor dan Kidul, Benteng Vastenburg, serta pusat perekonomian seperti Pasar Gede, Pasar Klewer, Beteng Trade Center (BTC), dan Pusat Grosir Solo (PGS). Dengan fasilitas itulah, kawasan tersebut

dapat digolongkan sebagai kawasan Central Business District sehingga banyak di antara mereka menggantungkan hidupnya atas keberadaan fasilitas tersebut. Sehingga, implikasi yang kemudian terjadi adalah munculnya are hunian yang padat dari para kaum urban di kawasan hilir Kali Pepe. Konsentrasi tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi kebanyakan warga, sekalipun banyak disektor informal.

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km^2)	Tingkat Kepadatan
Kepatihan Kulon	3.016	0,18	16.775
Kepatihan Wetan	3.047	0,23	13.247
Sudiroprajan	4.976	0,23	21.634
Gandekan	9.689	0,35	27.682
Sewu	7.561	0,49	15.430
Pucangsawit	13.790	1,27	10.858
Jagalan	12.513	0,65	19.250
Joyosuran	11841	0,540	20.928
Semanggi	34744	1,668	20.830
Kampung Baru	3638	0,306	11.889
Kedung Lumbu	5695	0,551	10.336
Sangkrah	11637	0,452	25.746

BPS Kota Surakarta, 2015

Gandekan. Secara historis, tidak jauh berbeda dengan kampung-kota lainnya, bahwa kehidupan kampung berkembang karena beragam faktor, salah satunya oleh letak geografis kampung tersebut sengaja dibentuk sebagai kawasan pemukiman karena letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan tradisional. Pun demikian dengan Gandekan, sebagai salah satu wilayah pemberian dari Keraton yang terbagi menjadi dua; yaitu Gandekan Kiwo (Jawa: kiri) menjadi wilayah bagian dari Kelurahan Sriwedari dan Gandekan Tengen (Jawa: kanan) menjadi wilayah bagian di Kecamatan Jebres. Dipahami secara harfiah, nama Gandekan berasal dari kata “gandik”

yang merupakan sebutan untuk orang kepercayaan atau duta besar Keraton Surakarta. Oleh karena keberadaan seorang Gandik di wilayah tersebut, inilah yang kemudian menjadikan kata “gandik” diadopsi sebagai nama sebuah distrik, yang kini lebih dikenal dengan Kelurahan Gandekan. Hingga kini, masih ada bukti fisik berupa artefak sebagai tempat untuk *sebo*– walaupun, saat ini telah beralih fungsi sebagai rumah tinggal atau hunian biasa dari *trah* gandik tersebut.

Pasca periode pemerintahan Keraton hingga peralihan menjadi pemerintahan bersistem politik modern seperti saat ini, Surakarta tumbuh dan berkembang menjadi kota modern hingga mulai dilirik oleh banyak orang-orang sekitar untuk dijadikan sebagai tempat berdomisili. Sehingga kini, terjadi pluralitas warga kampung-kampung di Gandekan, baik dari sisi agama maupun etnis. Maka dalam hal ini, pluralitas akan membentuk kehidupan yang harmonis jika terbangun toleransi. Salah satu media warga (yang pada akhirnya menjadi agenda tahunan) adalah dengan diadakannya Kirab Bhinneka. Mengadopsi makna Bhinneka yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”, Kirab Bhinneka bisa disebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa toleransi tersebut. Kegiatan rutin tahunan tersebut melibatkan hampir seluruh masyarakat Gandekan, sebagai bagian penting untuk mempromosikan kebhinekaan dengan rasa toleransi antar sesama warga.

Kalirahman. Sebenarnya, menjadi hal yang cukup sulit untuk menemukan kebenaran mengenai penjelasan dari asal mula beberapa penamaan kampung-kota. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses atas data yang akurat dan memadai untuk memaparkan sejarahnya. Tetapi, secara garis besar, cerita sejarah dapat ditelusuri melalui wawancara dengan salah satu Ketua RW sekaligus *sesepuh* di kampung. Secara harfiah, nama kampung ini terdiri dari dua kata, yaitu: “Kali” dan “Rahman”. Dalam bahasa Jawa, kali bermakna sungai, sedangkan rahman bermakna kasih, kebaikan. Praktis,

pemahaman tersebut memberikan bukti bahwa dahulunya, sungai memang turut serta berperan dalam pembentukan peradaban kehidupan. Meski demikian, bukan berarti bahwa pemahaman di atas tersebut merupakan pemahaman yang mutlak kebenarannya. Hal ini dikarenakan terdapat nama lain yang berbeda dalam sebutan penamaan kampung tersebut. Maka jalan Warendi adalah nama yang sempat digunakan selain kampung Kalirahman. Sedangkan, Kalirahman justru adalah nama dari salah satu jalan atau gang di kampung tersebut. Tetapi, kurang lebih selama lima belas tahun berjalan dengan sebutan jalan Warendi, nampaknya "Kalirahman" adalah nama yang paling familiar bagi warga sekitar.

Di Kampung Kalirahman, terdapat bukti fisik yang mampu memperkuat pemaparan mengenai keberadaan pemukiman di dekat sungai yang telah ada sejak masa lampau. Keberadaan nDalem Joyomartanan yang kini telah digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian biasa oleh bapak Munawar/ketua RW 5 kampung Kalirahman. Seturut dengan cerita sejarah yang bergulir hingga kini, nDalem Joyomartanan adalah rumah klasik Jawa yang dibangun kisaran tahun 1873 dan keberadaan rumah tersebut ada hubungannya dengan perpindahan Keraton di masa itu. Cerita sejarah tersebut semakin diperkuat dengan mengidentifikasi model rumah dari nDalem Joyomartanan. Mengindentifikasi desain arsitektur yang berkonsep Jawa klasik dengan struktur bangunan yang masih lengkap, seperti halaman rumah, serambi, joglo, ruang tengah, dan ruang belakang. Kemudian di dalam rumah, terdapat ornamen kayu yang klasik serta langit-langit joglo yang khas. Dalem Joyomartanan dikelilingi oleh tembok tinggi sebagai pagarnya, sehingga orang-orang dari luar tidak dapat melihat suasana di dalam nDalem Joyomartanan.

Seturut dengan pemaparan warga yang menyatakan bahwa rumah tersebut sama sekali tidak pernah terkena banjir – meski letaknya relatif dekat dengan Kali Pepe. Terlepas dari perhitungan yang matang, hal ini juga dikarenakan kontur tanah stabil dan tinggi

jika dibanding dengan yang lain. Tidak hanya itu, di halaman depan Dalem Joyomartanan terdapat sebuah sumur yang tidak pernah kekeringan, bahkan di musim kemarau sekalipun. Kemudian hal yang perlu ditekankan adalah posisi Dalem Joyomartanan yang tidak menghadap langsung ke jalan raya atau jalan kampung, melainkan menghadap ke Kali Pepe. Hal ini merupakan bukti konkret bahwa di masa lampau, bahwa Kali Pepe memang digunakan sebagai jalur transportasi sekaligus sumber kehidupan.

Kebonan. Nama Kebonan diambil dari kata *Kebon* (bahasa Jawa) yang bermakna ladang luas, yang memang *kebon* tersebut ada pada saat gandik keraton tinggal di wilayah Gandekan. Pada saat itu, keseluruhan pemilik lahan Gandekan adalah seorang gandik Keraton, yang oleh karena desakan beragam kebutuhan ekonomi, gandik tersebut menjual satu per satu lahan *kebon*-nya kepada orang lain, hingga kemudian berkembang sampai seperti saat ini yang telah dihuni kurang lebih sekitar 250 jiwa. Namun kini, meski namanya adalah kampung Kebonan, tetapi sepetak *kebon* atau kebun pun tidak dapat ditemui di sana lantaran hampir seluruhnya telah beralih menjadi pemukiman. Hal tersebut merupakan jawaban atas fenomena pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan tanpa diimbangi dengan penyediaan lahan sebagai tempat tinggal, dan urbanisasi pun menjadi salah satu hal yang sulit dikendalikan.

Padat dan heterogen salah satu cirri perubahan yang terlihat adalah pola hubungan bertetangga di kampung Kebonan. Pada saat awal-awal kemerdekaan atau ketika urbanisasi belum meningkat signifikan seperti sekarang ini, komposisi demografi di kampung Kebonan dapat dikatakan masih relatif homogen. Sehingga, antar satu tetangga dengan tetangga yang lain masih saling mengenal. Kini, oleh karena mobilitas masyarakat yang semakin dinamis, menjadikan minimnya waktu untuk bersantai dan *ngobrol* dengan tetangga yang lain. Hal tersebut juga mempengaruhi pada tataran pola hubungan

yang lebih luas, yaitu ketika terdapat pertemuan RT/RW, misalnya. Secara teknis, pengambilan keputusan dilaksanakan secara demokratis dengan cara *voting*. Tidak lagi menggunakan keputusan yang diambil oleh para *sesepuh* atau tokoh yang dituakan. Terlepas dari cerita sejarah yang memaparkan bahwa awal mula Gandekan sebagai distrik bentukan Keraton Surakarta dengan kemuliaan Kali Pepe yang mewujud dalam kampung-kampung yang di antaranya lebih dikenal dengan sebutan Kampung Kalirahman dan Kebonan, kini kampung-kampung tersebut mengalami perubahan yang senantiasa tumbuh bersamaan dengan proses modernitas kehidupan kampung-kota.

Sudiroprajan. Telah diketahui bersama bahwa secara geografis, Sudiroprajan letaknya relatif dekat dengan Pasar Gede yang notabene adalah pasar tradisional terbesar di kota Surakarta. Para pedagang di Pasar Gede didominasi oleh etnis Tionghoa, di mana tempat tinggal mereka berada di Sudiroprajan. Ditelusuri sejarahnya, keberadaan etnis Tionghoa di Sudiroprajan bermula dari kedatangan para pedagang yang bertujuan menjual dagangannya ke Pasar Gede. Di masa lampau, untuk menuju Pasar Gede, para pedagang China melewati Kali Pepe sebagai jalur transportasi. Seperti pernyataan pada umumnya, para pedagang tersebut memiliki etos kerja yang tinggi dan sangat disiplin. Hal inilah yang menjadikan perdagangan tersebut kian meluas dan berkembang. Oleh karenanya, secara perlahan, para pedagang tersebut mulai tinggal dan menetap di sekitar Pasar Gede dan Sudiroprajan adalah pilihan yang digunakan sebagai tempat berdomisili. Hampir mirip dengan pemukiman di kampung-kampung pada umumnya, bahwa pola pemukiman di Sudiroprajan pun juga mengelompok berdasarkan atas tingkat ekonomi dari yang bersangkutan. Maka yang kemudian ditemui adalah pemukiman etnis China berada di tengah-tengah kampung dengan ukuran rumah yang lebih luas daripada yang dimiliki oleh para etnis lainnya.

Komposisi demografi di Sudiroprajan yang plural menarik, meski demikian terjadi pembauran diantara perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu hal yang menyebabkan akulturasi tersebut tetap ada hingga kini adalah terjadinya pernikahan antara etnis Tionghoa dan Jawa. Sehingga, meski kedua etnis tersebut benar-benar berbeda, tetapi dalam praktik kesehariannya, perbedaan tersebut dapat berdampingan dengan harmonis karena pola hubungan yang terbangun didasari oleh toleransi secara kekeluargaan. Selain itu, tidak jarang pula keluarga-keluarga yang antar anggotanya memiliki keyakinan berbeda-beda. Di kampung Sudiroprajan juga terdapat masjid atau mushola, serta klenteng yang secara rutin senantiasa digunakan untuk bersembahyang. Dalam hal ini, tempat ibadah adalah Klenteng *Tien Kok Sie* yang merupakan klenteng terbesar di Kota Surakarta. Adalah hari raya Imlek atau tahun baru China yang selalu dirayakan di setiap tahunnya. Imlek tersebut dirayakan dengan terselenggaranya beragam rangkaian acara, di mana perayaan tersebut sudah tergolong dalam tataran agenda budaya tahunan Surakarta bukan lagi kegiatan rutin dari sebuah kampung. Sehingga, perayaan Imlek dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam dan luar kota.

Sangkrah. Sangkrah merupakan sebutan lain dari *angkrah-angkrah* yang berarti kurang lebihnya sampah, sampah *pating bekakrah* (sampah berserakan), sampah *ting slengkrah* (sampah berserakan). Munculnya istilah-istilah tersebut disebabkan karena letak Sangkrah yang dilintasi empat sungai, yaitu Jenes, Pepe, Tegal Konas, dan Bengawan Solo. Keberadaan Sangkrah yang dilintasi empat sungai tersebut sehingga setiap musim penghujan tiba, Sangkrah rawan terkena banjir dan banyak sampah yang tersangkut di daerah Sangkrah. Menurut cerita dari sesepuh, Sangkrah berasal dari kata angkrah-angkrah (sampah yang hanyut di sungai) atau *bekakrah* (berserakan). Kampung Sangkrah kemudian menjadi tempat berhentinya sampah-sampah yang hanyut dari keempat sungai yang mengelilingi Sangkrah disaat musim penghujan.

Sejarah lain terkait kampung Sangkrah adalah kisah Raden Pabelan dari Kerajaan Pajang yang menyukai putri Raja Pajang, namun tidak direstui oleh Raja Pajang. Terjadi konflil yang berujung pada kematian Raden Pabelan oleh Raja Pajang dan mayatnya dibuang di Sungai Bengawan Solo. Mayat Raden Pabelan tersebut akhirnya tersangkut di Sangkrah. Mayat itu pun ditemukan oleh warga dan mau dibuang kembali ke sungai namun saat dibuang mayat itu kembali ke Sangkrah lagi. Dengan kejadian itu, sesepuh warga yang bermimpi agar mayat tersebut dikuburkan dan dipelihara dengan baik. Mayat tersebut pun dikuburkan di daerah alun-alun Keraton yang sekarang ini berada di belakang PGS/Pusat Grosir Solo. Kampung Sangkrah sebelum terbentuk sebagai kampung seperti yang terlihat saat ini, dulunya berupa lahan kosong berupa rawa-rawa. Kemudian seiring dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan kota, mulai banyak orang yang berdatangan dari berbagai penjuru wilayah, dan kemudian tinggal dan menetap di kampung-pinggir Kali Pepe.

Terlebih secara geografis, letak kampung Sangkrah sangat strategis karena dekat dengan pusat perekonomian dan pemerintahan, menjadikan pendatang pada saat itu mulai memilih untuk berdomisili di kampung tersebut. Sehingga, komposisi demografi pun juga plural, baik dari sisi agama maupun asal wilayahnya. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat kampung Sangkrah kini didominasi oleh masyarakat pendatang. Salah satu hal yang memicu kepadatan tersebut adalah pola yang terjadi hampir di setiap keluarga yang ketika beberapa anaknya telah menikah, dan masih tinggal dan menetap bersama orang tuanya di kampung Sangkrah. Maka kemudian menjadi hal biasa ketika kini banyak ditemui rumah-rumah yang meletakkan peralatan dapurnya di depan rumah mereka. Selain karena tidak adanya ketersediaan ruang sebagai dapur, pada akhirnya dapur yang terletak di depan rumah tersebut sekaligus memberikan keuntungan yaitu beberapa masyarakat yang berjualan makanan ringan.

Kedung Lumbu. Kedung Lumbu adalah salah satu Kelurahan sekaligus nama kampung di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Dari narasi warga, nama tersebut diberikan oleh para *punggawa* Keraton Surakarta yang kehilangan akal karena penduduk setempat menolak dipindahkan ke daerah lain pada saat pembangunan Keraton Surakarta pada abad ke-18. Narasi tersebut mengumpamakan para penduduk seperti air di atas daun lumbu (talas) karena mereka mengubah-ubah janji ketika diminta pindah. Salah satu bagian dari wilayah Kelurahan Kedung Lumbu dinamakan Lojiwetan. Dinamakan demikian karena dari asal kata bahasa Jawa, Loji yang berarti lumbung dan Wetan yang berarti sebelah Timur. Dulunya daerah tersebut digunakan sebagai tempat lumbung padi atau makanan yang lain bagi daerah di sekitarnya. Secara administratif, Kedung Lumbu termasuk dalam bagian dari Kecamatan Pasar Kliwon dengan meliputi cakupan wilayah sebanyak 7 RW. Seperti yang telah diketahui secara bersama, Pasar Kliwon merupakan wilayah yang terkenal dengan keberadaan etnis Arab meski dalam kenyataannya, tidak sedikit pula masyarakat berasal dari etnis Tionghoa dan Jawa. Pun demikian dengan Kedung Lumbu yang memiliki komposisi demografi dari ketiga etnis tersebut di atas. Situasi yang hampir sama dengan kampung-kampung lain pada pemaparan sebelumnya, bahwa keragaman etnis yang ada tetap berdomisili di tengah-tengah kampung. Sekaligu menampilkan wajah keberagaman kota dengan segala dinamikanya.

Kali Pepe, Pilihan Terakhir

Sebagai pemukiman yang berada di bantarannya, sungai merupakan aset fisik yang pertama kali perlu diidentifikasi. Agaknya, perpindahan Keraton Kartasura ke Keraton Kasunanan Surakarta dan menjadikan desa Sala sebagai ibukota pada kisaran abad 18 adalah pemantik dari pertumbuhan Kota Surakarta di kemudian hari. Sebagai ibukota, beragam kegiatan menjadi terpusat di desa Sala. Implikasinya, daya tarik orang-orang sekitar untuk berdomisili di kota kian meningkat. Fenomena tersebut terus terjadi hingga pasca kemerdekaan,

mobilitas masyarakat kian komplek. Perpindahan warga yang kemudian memadati bantaran Kali Pepe mulai terjadi pada kisaran tahun 1950 hingga 1970-an. Pada tahun-tahun tersebut, peran sungai sudah tidak lagi digunakan sebagai jalur transportasi tetapi digunakan sebagai tempat atau sumber daya alam untuk dieksplorasi. Oleh karena pada tahun-tahun tersebut pemukiman di bantaran Kali Pepe baru saja terbentuk, maka yang terjadi adalah penambangan pasir sungai untuk kemudian pasir tersebut digunakan sebagai material dalam membangun hunian mereka.

Narasi yang berbeda diperoleh dari kampung Kedung Lumbu dan kampung Sangkrah, yang sekaligus bisa menjadi representasi mengenai kampung-kampung lain karena memiliki narasi yang sama. Bahwa awal mula keberadaan pemukiman di bantaran Kali Pepe dikarenakan mereka adalah masyarakat asli yang sejak lahir dan hingga kini menempati kampung-kota tersebut. Hal ini dikarenakan rumah yang kini ditinggali adalah warisan dari mendiang kedua orang tuanya. Konon, seturut dari cerita sejarah yang diperoleh, orang tuanya termasuk tokoh yang *mbabat alas* karena pada masa itu, situasi kampung-kota belum sepadat seperti yang terjadi saat ini. Jumlah penduduk dan pemukimannya belum sebanyak sekarang. Bahkan, di beberapa kampung (seperti di kampung Sangkrah dan kampung Kebonan belum teraliri listrik dan akses jalan yang memadai).

Agaknya, kisah warga terkait eksplorasi penambangan pasir sungai yang dilakukan oleh masyarakat setempat bisa dikatakan sebagai salah satu pemantik dari dimulainya pergeseran bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan. Karena konsekuensi yang terjadi setelahnya, ketika hunian-hunian di bantaran sungai telah terbangun, secara otomatis orang-orang mulai berdomisili tidak jauh dari sungai. Keseharian inilah yang memunculkan risiko dan akibat dari eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus. Kali Pepe dahulunya diceritaka dengan aliran airnya yang deras, kini cerita tersebut hanyalah berbatas cerita masa lalu. Akibat

dari penambangan pasir yang banyak dilakukan di masa lampau, lambat laun menjadikan kondisinya mengalami pendangkalan seperti yang terjadi saat ini. Kini jarang sekali atau bahkan sudah tidak ada lagi orang-orang yang menambang pasir di Kali Pepe. Situasi yang terjadi saat ini adalah bahwa Kali Pepe mengalami aliran air yang surut. Fungsi sungai pun telah beralih untuk drainase kota dan pembuangan limbah pabrik maupun sampah rumah tangga.

Meski pada saat yang bersamaan, kini dalam kesehariannya interaksi antara masyarakat bantaran dengan Kali Pepe terjadi dalam bentuk kegiatan memancing. Sepanjang aliran Kali Pepe di depan rumah, hanya beberapa titik tertentu yang dapat digunakan sebagai area memancing. Di antaranya yaitu di Sudiroprajan dan kampung Kebonan saja. Sedangkan, di titik lain seperti di kampung Kalirahman, kampung Sangkrah, dan kampung Kedung Lumbu tidak dapat digunakan sebagai area memancing karena di titik tersebut banyak timbunan sampah dan aliran air yang menyurut.

Ketika Kali Pepe digunakan sebagai area memancing, pada saat yang bersamaan, Kali Pepe juga digunakan sebagai tempat pembuangan limbah utamanya adalah limbah rumah tangga. Terdapat beragam jenis sampah yang mengalir dan menggenang di sepanjang Kali Pepe, tetapi secara garis besar, sampah-sampah tersebut adalah sampah rumah tangga seperti plastik bekas pembungkus makanan dan dedaunan kering yang menyangkut di beberapa titik aliran. Beberapa kampung yang aliran sungainya cukup banyak adalah di kampung Kebonan, kampung Kalirahman dan kampung Kedung Lumbu. Dalam hal ini, seperti kampung-kampung pada umumnya, di masing-masing kampung bantaran Kali Pepe sebenarnya telah terdapat petugas yang dalam kesehariannya mengambil sampah-sampah di depan rumah para warga pada pagi hari untuk kemudian diangkut menggunakan gerobak. Masalah kemudian muncul ketika masyarakat kampung bantaran Kali Pepe telah disiplin untuk tidak membuang sampah ke sungai, tetapi justru masyarakat lain yang secara langsung membuang sampah ke sungai.

Area Memancing Warga, 2016

Di kampung Kebonan yang letaknya berada satu sisi dengan Sudiroprajan, memiliki permasalahan sampah yang cukup kompleks. Agaknya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah secara langsung ke badan sungai masih dimiliki oleh sebagian masyarakat. Dalam kesehariannya, mayoritas masyarakat kampung Kebonan telah memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah secara langsung ke sungai. Kesadaran tersebut muncul karena mereka memahami betul bahwa jika setiap hari membuang sampah ke sungai maka merekalah yang pada akhirnya juga akan menerima konsekuensinya misalnya bau menyengat dan aliran air sungai tersumbat. Pada saat yang bersamaan, kesadaran tersebut tidak terjadi pada mereka yang rumahnya terletak agak jauh dari sungai, di tengah-tengah kampung. Secara terang-terangan, mudah menemukan beberapa warga yang membuang sampah secara

langsung ke badan sungai. Pada beberapa waktu, situasi sempat menjadi bersitegang antara warga pembuang sampah yang berasal dari tengah kampung dengan warga bantaran sungai. Tetapi, pada akhirnya warga bantaran pun hanya bisa pasrah dan menganggap hal tersebut sebagai konsekuensi karena tinggal dekat dengan sungai sebagai pilihan terakhir.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan letak aliran di kampung Kebonan yang berada dekat dengan sudetan aliran dari kampung Balong, dimana kampung tersebut memiliki jumlah sampah yang cukup banyak. Karena air sungai yang senantiasa mengalir sekalipun lambat, tentunya sampah-sampah tersebut pada akhirnya mengalir ke kampung-kota yang lain. Hal lain yang turut berkontribusi atas pembuangan sampah secara langsung ke badan sungai adalah keberadaan sebuah warung di atas jembatan sungai yang sekaligus termasuk jalan besar di luar kampung, yaitu jalan Sungai Batanghari. Warung mie ayam dan bakso yang biasa buka di sore hingga malam hari dan berdiri persis di atas trotoar sekaligus jembatan sungai. Tanpa disadari, jembatan berwarung yang digunakan sebagai ruang publik tersebut turut mencemari air Kali Pepe, karena secara teknis, sisa-sisa makanan dan sisa air mencuci perabotan makanan tersebut secara langsung dibuang ke sungai. Alasannya pun jelas, limbah makanan tersebut memang lebih praktis jika dibuang ke sungai. Pada dasarnya, jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki perbedaan antara satu rumah dengan yang lain. Bagi masyarakat yang memiliki profesi membuka usaha di rumah, tentunya dalam satu hari saja akan lebih banyak menghasilkan sampah jika dibandingkan dengan rumah tangga biasa tanpa kegiatan berproduksi.

Terlepas dari pemaparan atas situasi Kali Pepe saat ini, sebenarnya pengelolaan sampah sangat terkait dengan tingkat kesadaran dari masyarakat yang bersangkutan, perlu adanya komitmen untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dikomparasikan dengan kampung-kampung lain, Sudiroprajan

adalah kampung dengan jumlah sampah yang paling minim. Selain, karena letaknya yang berada di ujung sehingga belum tercemar oleh aliran lain, Sudiroprajan terdapat aktor atau tokoh yang benar-benar menjadi penggerak untuk menerapkan kebijakan agar mayarakat bantaran tidak membuang sampah ke Kali Pepe. Bahkan, jika terdapat masyarakat Sudiroprajan yang kedapatan membuang sampah ke Kali Pepe akan dikenakan sanksi berupa denda dengan nominal yang telah ditentukan. Agaknya, memang dibutuhkan aktor yang mampu menjadi penggerak dan menginisiasi terjadinya perubahan agar lebih sadar dan disiplin dalam membuang sampah. Di kampung Kedung Lumbu, masyarakat cenderung pasif untuk melakukan pembenahan atas lingkungan. Tentunya, hal ini dipengaruhi oleh situasi kampung-kota yang dalam kesehariannya, rata-rata warga adalah pekerja dan rata-rata pulang di sore hari. Rutinitas tersebut menjadikan kampung diposisikan sebagai tempat yang hanya digunakan sebatas untuk beristirahat saja. Sehingga, perubahan akan terjadi ketika penggeraknya adalah para sesepuh kampung. Praktis, kebiasaan membuang sampah di tempatnya dilakukan oleh masyarakat bukan berlandaskan pada kesadaran masing-masing, tetapi justru dikarenakan rasa *pekewuh* saja.

Tidak hanya berhenti pada kasus di atas, ditelusuri lebih detil lagi kemudian ditemukan bahwa hampir di seluruh pemukiman kampung bantaran Kali Pepe tidak menggunakan IPAL ataupun septic tank. Dalam kesehariannya, limbah MCK, mandi, masak, dan sebagainya secara langsung mengalir ke sungai. Seturut dengan penjelasan beberapa informan, hal ini telah dilakukan sejak lama lantaran IPAL dan *septic tank* yang ada kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Praktis, di beberapa titik dari aliran Kali Pepe, sering tercium bau menyengat yang asalnya dari badan sungai itu sendiri. Pada mulanya masyarakat setempat merasa kurang nyaman dengan bau tersebut. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya berpasrah dan menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa dalam kesehariannya.

Sampah dan Limbah, 2016

Lebih lanjut, pipa-pipa yang mengarah ke sungai tersebut memang ada di seluruh rumah bantaran Kali Pepe. Sehingga pola pemukiman yang berdiri saat ini telah terkonstruksi untuk menjadikan sungai sebagai tempat saluran sisa-sisa pembuangan limbah rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, secara tidak langsung masyarakat sebenarnya sedang berupaya untuk melakukan pembenahan atas kondisi fisik sungai. Adalah kegiatan rutin kerja bakti yang pada mulanya diinisiasi oleh Lurah setempat dalam hal ini kebijakan tersebut diberlakukan di Kalirahman; Kebonan dan kampung Kedung Lumbu. Hingga lambat laun, kerja bakti tersebut menjadi kegiatan rutin dimana dalam proses pelaksanaannya tidak memerlukan pengawasan dari pihak Pemerintah Kota. Masyarakat setempat pun menjadikan kerja bakti sebagai salah satu bentuk kesadaran dan respon atas kondisi di Kali Pepe. Namun dalam

teknisnya, kegiatan tersebut tidaklah berjalan mulus. Karena yang sukarela melaksanakan kerja bakti hanyalah warga di bantaran Kali Pepe saja, tidak diikuti oleh warga lain yang letak rumahnya agak jauh dari sungai. Selepas kerja bakti pun, semestinya sampah yang terkumpul dinaikkan ke atas lalu diangkut oleh gerobak sampah tetapi justru dialirkan ke sungai. Maka, kini yang terjadi adalah kerja bakti tetap berlangsung, tetapi yang dibersihkan adalah yang termasuk di depan rumah masing-masing warga, tidak menyeluruh. Biasanya, kegiatan kerja bakti yang dilakukan di sekitar sungai adalah memangkas rerumputan yang tumbuh di pinggiran sungai dan bukan membersihkan sampah-sampah yang mengapung pada aliran sungai.

Merujuk pada Perda yang berlaku, jika dianalisis lebih jauh, sebenarnya membuang sampah dan mengalirkan limbah ke sungai adalah hal yang tidak dibenarkan. Mengacu pada Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 57 huruf B yang berbunyi: "Pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber perairan (sungai kanal, danau, selokan dan sistem drainase kota) berpotensi mempercepat pendangkalan/sedimentasi dan menyumbat aliran air menyebabkan berkurangnya daya tampung air sehingga mengakibatkan banjir. Pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air dan tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti: menjadikan media berkembangnya penyakit termasuk serangga ataupun binatang lainnya yang menjadi vektor penyakit, menimbulkan bau, mengganggu kebersihan dan estetika lingkungan." Perubahan tindakan semacam ini telah banyak terjadi hampir di setiap kota dan sungai-sungai di Indonesia. Dimana problem kawasan sempadan dan bantaran sungai telah terdesak oleh pemukiman warga urban yang sebagian besar berstatus ekonomi miskin, yang sebenarnya juga berbasis kebudayaan agraris, tetapi telah berubah menjadi masyarakat urban yang tidak memiliki kepedulian adaptif terhadap ekologi sungai (Kutanegara, 2014).

Dinamika Kali Pepe, Bencana dan Wisata

Dari sisi geografis, Surakarta sebenarnya adalah wilayah rawa-rawa yang terletak di antara beberapa pegunungan, yang juga dilewati oleh aliran Bengawan Solo berikut anak-anak sungainya yang melintas di tengah-tengah kota, menjadikan sebagai wilayah dataran rendah, atau diibaratkan dengan "mangkuk" karena sangat rawan akan terjadinya bencana banjir. Catatan sejarah mencatat bahwa Surakarta pernah beberapa kali mengalami banjir besar, di antaranya adalah banjir yang terjadi pada tahun 1918 (pada literatur lain ada pula yang menyebut banjir tersebut terjadi pada tahun 1915) di mana banjir tersebut menggenangi kota hingga setinggi lutut orang dewasa. Pada saat itu, banjir terjadi dikarenakan sungai di Surakarta belum memiliki tanggul sehingga aliran air masuk ke tengah kota lantaran tidak adanya penahan. Pasca banjir ditahun tersebut, secara serentak Pemerintah Kota mulai berbenah dengan membangun tanggul-tanggul di beberapa sungai. Pembangunan tanggul tersebut memang dilaksanakan karena terjadinya perubahan ekologi di sungai Bengawan Solo.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa yang mengharuskan penanaman dilaksanakan di wilayah *hinterland*. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan sekaligus tanah-tanah melongsor, serta pendangkalan sungai, termasuk sungai Bengawan Solo. Pendangkalan sungai Bengawan Solo tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya banjir di kota Surakarta. Maka yang kemudian terjadi, setelah tahun 1918, Surakarta kembali tertimpa banjir bandang. Sehingga pembeda antara kedua banjir tersebut adalah banjir 1918 terjadi disebabkan kota Surakarta belum memiliki tanggul-tanggul sungai, sedangkan banjir 1966 terjadi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: curah hujan tinggi pada hari-hari tersebut, rusaknya beberapa tanggul-tanggul sungai dan terjadinya pendangkalan sungai akibat penerapan sistem tanam paksa.

Tepatnya pada 14-15 Maret 1966, Surakarta diguyur hujan deras tanpa henti. Hujan tersebut menjadikan wilayah Baturono tergenang bahkan di Wonogiri, air Bengawan Solo mengalami kenaikan debit. Kenaikan air Bengawan Solo mencapai pada ketinggian 40 cm. Sedangkan, di tanggul Semanggi dan Demangan, ketinggian air mencapai 8 meter. Tanggul-tanggul sungai mengalami kerusakan. Sehingga yang terjadi adalah luapan air hujan masuk ke tengah-tengah kota dan pada akhirnya menggenang. Dalam waktu 6 jam, genangan air mencapai ketinggian 2 meter. Banjir ini merupakan hal yang tak terduga, karena seperti yang telah diketahui bersama, bahwa di tahun 1966, Surakarta sudah memiliki tanggul-tanggul sungai. Tidak ada yang menyangka bahwa kota akan mengalami banjir kembali. Banjir tahun 1966 tersebut menyebabkan genangan air yang tinggi di Kecamatan Pasar Kliwon, Jebres, Serengan dan Banjarsari.

Dalam catatan sejarah, banjir 1966 juga menjadikan aktivitas masyarakat, perekonomian, dan pemerintah lumpuh berhenti total. Dengan situasi banjir yang demikian parah, orang-orang sibuk menyelamatkan diri di gedung-gedung bertingkat selama berhari-hari hingga air menyurut. Mengutip dari narasi yang dipaparkan Ridha, tercatat pada 1 April 1966, korban meninggal mencapai 90 orang–72 di antaranya adalah warga kota dan 18 bukan warga luar, korban luka-luka mencapai 1.340 orang; kerugian harta benda mencapai 61.715.244.67 rupiah (uang baru); oleh karena kegiatan ekonomi berhenti secara total, pihak Pemerintah mengalami kerugian hingga 1.000 milyar. Tidak hanya itu, sebanyak 611.711 rumah-rumah warga rusak karena hancur; 3 rumah terbakar; dan 7.500 orang kehilangan rumahnya. Setelahnya, 3.500 orang memerlukan bantuan jangka pendek (sekitar satu bulan); dan 3.000 orang lainnya perlu bantuan jangka panjang (sekitar dua hingga tiga bulan). Sebuah kenangan atas peristiwa masa lalu namun masih dengan mudah kita temukan penggalan-pengalaman cerita warga disepanjang Kali Pepe.

Surakarta sebagai wilayah dataran rendah dengan aliran Bengawan Solo berikut anak-anak sungainya dan kini melewati 43 kelurahan yang ada, relatif rawan terjadi banjir. Banjir merupakan bencana yang tidak dapat dihindari oleh warga kota, terlebih dengan musim penghujan dan kemarau yang kini tidak lagi dapat diprediksi, menjadikan banjir bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Dimana cacatan atas peristiwa banjir dalam satu tahun banjir bisa terjadi satu hingga dua kali. Pada tahun 2007, Surakarta kembali mengalami banjir dahsyat, di mana salah satu lokasi banjir tersebut berasal dari luapan air Kali Pepe. Banjir tersebut tergolong cukup besar dengan ketinggian hampir 2 meter. Bahkan, pada saat itu masyarakat setempat harus mengungsi ke Balaikota selama berhari-hari. Pasca banjir, Pemerintah Kota mulai berbenah secara serius dalam menangani sungai, bantaran, untuk mengantisipasi banjir. Beragam upaya mulai dilakukan, pola pemukiman yang dahulunya berhadapan satu sama lain (membelakangi sungai), secara perlahan mulai direlokasi ke wilayah lain. Juga yang dahulunya belum terdapat pembatas yang jelas antara pemukiman dengan sungai, pasca banjir mulai dibangun pagar di tepian sungai.

Merespon pengalaman banjir tersebut, Pemerintah Kota mencoba berbenah untuk menanggulangi bencana banjir yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Adalah dengan memperbaiki berbagai infrastruktur yang di antaranya dengan mulai membangun pagar tepian sungai, pentalutan sungai, bahkan pemavingan di gang-gang kampung bantaran Kali Pepe, hingga merelokasi rumah-rumah yang memang jaraknya terlalu dekat dengan badan sungai. Secara parsial, pembangunan fisik sungai memang turut berperan atas terjadinya banjir ataukah tidak. Pentalutan, pelurusan alur sungai, misalnya, merupakan upaya parsial yang jika dikaji lebih jauh, ternyata pembangunan tersebut bukanlah hal yang solutif. Sebaliknya, dalam waktu jangka panjang, pembangunan sungai tersebut justru menghadirkan konsekuensi negatif. Metode pembangunan tersebut telah merubah tampang natural dan alur

natural sungai menjadi tampang buatan berbentuk trapesium dengan alur relatif lurus. Sebagian besar tebing sungai dan daerah bantaran atau sempadan sungai hilang karena pelurusan, sudetan, pembuatan tanggul, dan pentalutan (Maryono, 2015). Pembangunan sungai pada dekade *river development* pada umumnya sama sekali tidak memikirkan karakteristik alamiah sungai yang ada, baik biotik maupun abiotik. Bahkan, sebenarnya bisa disebut sebagai periode river exploitation.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, Kini Kali Pepe sebagai sungai terpanjang yang mengalir di tengah-tengah kota, wacananya dipilih untuk digunakan sebagai salah satu lokasi objek wisata berupa wisata air Kali Pepe. Sebagai salah satu kota dari kota-kota besar di Jawa Tengah, Surakartapun tumbuh dengan beragam *brand* yang tersemat. “Surakarta Kota Budaya” adalah salah satunya, di mana brand tersebut merujuk pada karakter budaya Jawa yang masih kental. Terlebih diera modern seperti saat ini, eksistensi budaya Jawa menjadi daya tarik tersendiri untuk kemudian pada akhirnya mewujud sebagai salah satu komoditi dan menjadi kota wisata. Kegiatan wisata tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tahun 2010 yang disusun oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pada RPJMD disebutkan bahwa kegiatan wisata diselenggarakan guna tercapainya *branding* Kota Surakarta sebagai kota wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan di setiap tahunnya. Secara teknis, kegiatan wisata tersebut difasilitasi oleh Disbudpar Kota Surakarta dan dilaksanakan oleh Pokdarwis setempat.

Salah satu kegiatan wisata yang terkait dengan kampung dan Kali Pepe adalah festival Grebeg Sudiro, dimana festival ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Raya Imlek. Dan salah satu dari rangkaian kegiatan tersebut adalah wisata air Kali Pepe. Secara teknis, wisata air yang dimaksud adalah menaiki perahu bermesin mengelilingi aliran sungai dengan jalur-jalur yang telah ditentukan. Wisata

air Kali Pepe kini merupakan salah satu dari rangkaian perayaan Imlek yang biasanya diselenggarakan di Sudiroprajan. Oleh karena letak Sudiroprajan yang dekat dengan Kali Pepe maka di situlah wisata air tersebut dilaksanakan. Pada awalnya, wisata air Kali Pepe telah dicanangkan sejak masa kepemimpinan Joko Widodo yang menjabat sebagai walikota dengan mungusung konsep "Solo Tempo Doeloe" yang merupakan adopsi dari wisata air di Venice, Italia. Untuk mewujudkannya, beragam persiapan dilaksanakan. Di antaranya seperti pembangunan dermaga dadakan (karena dibuat dari bambu) yang dipasang di Sudiroprajan, dan persiapan yang paling krusial adalah pengerukan sungai. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar aliran sungainya cenderung tenang. Salah satu perubahan fisik yang dilakukan adalah pengerukan tanah di sungai. Pengerukan adalah rekayasa sungai yang dilakukan untuk memperbaiki alur dan tampang melintang sungai untuk pelayaran. Cara yang digunakan adalah dengan mengadakan pengerukan sungai sehingga alur tersebut secara teknis dapat dipakai untuk pelayaran. Konsekuensi pengerukan biasanya dilakukan jika di tengah sungai adalah hilangnya pulau (*islands*), gundukan pasir (*bars*), dan elemen sungai lainnya, termasuk vegetasi sungai. Indikasi dampak pengerukan sungai ini adalah penurunan resistensi alur sungai serta kerusakan habitat dasar sungai.

Maka sangatlah jelas bahwa pengerukan sungai merupakan upaya Pemerintah Kota agar aliran air sungai yang tenang sekaligus terbebas dari timbunan sampah tersebut pada akhirnya terwujud. Tetapi, tanpa disadari, pengerukan sungai sebenarnya kurang solutif. Sungai bisa dikatakan sebagai sungai yang ideal jika di tengah-tengahnya terdapat delta sungai (tanah yang di atasnya terdapat tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut). Bentuk lain dari sungai ideal adalah jika di tengah-tengah aliran air terdapat beberapa bebatuan berukuran cukup besar. Hal ini diperlukan sebagai penahan jika sewaktu-waktu terjadi aliran air yang lebih deras dari biasanya seperti ketika terjadi hujan. Sehingga, air sungai

tidak sampai meluap ke daratan dan menuju pemukiman warga (Kutanegara, 2014). Tetapi, nampaknya hal ini belum disadari oleh kebanyakan orang. Karena warga sendiri pun telah terkonstruksi bahwa pengerukan sungai adalah upaya yang cukup solutif. Oleh karenanya banjir dengan debit air tidak terlalu besar kini lebih rutin terjadi sebagai konsekuensi tidak langsung dari upaya tersebut.

Ruang-ruang Bersama di Pinggir Kali

Oleh karena pada masa lampau keberadaan sungai memberikan peran besar terhadap kelangsungan hidup manusia, maka secara historis, pola pemukiman di bantaran sungai sebenarnya telah terbentuk dari dulu hingga kini. Di masa lampau, secara langsung orang-orang banyak menggantungkan keberlangsungan hidupnya dengan alam. Kejernihan aliran air menjadikan sungai digunakan sebagai sumber dari pemenuhan kebutuhan air baik untuk kebutuhan mandi, mencuci, kakus, ruang publik, dan lain sebagainya. Perubahan terjadi karena implikasi dari hadirnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Kali Pepe yang dahulunya sebagai sumber kehidupan, kini mengalami kemerosotan nilai. Pergeseran pola adaptasi tersebut ditunjukkan dengan peran sungai yang kini tidak lebih hanya digunakan sebagai bagian dari sistem drainase dan sanitasi yang mengendali siklus air bagi kota Surakarta.

Pande Made Kutanegara memberikan ulasan bahwa air dan sungai lebih dimaknai sebagai pusat pembuangan sampah-sampah produksi sektor industri dan sektor informal kota ketimbang sebagai sumber kehidupan. Pemenuhan kebutuhan air dalam dunia modern secara langsung tidak lagi memerlukan peran sungai karena kebutuhannya telah dipenuhi dengan air sumur, terlebih dengan piranti dunia modern, yakni suplai air minum PDAM dan air minum kemasan (Kutanegara, 2014). Kemerosotan nilai sungai diperkotaan pada akhirnya mengkonstruksi pemahaman masyarakat mengenai kehidupan di bantaran sebagai wilayah marginal yang tergolong

pada kelompok miskin kota. Dapat dikatakan demikian karena hal tersebut diidentifikasi dari pola pemukiman yang kini terbangun di bantaran Kali Pepe. Sebagai pemukiman yang padat penduduk dengan lahan terbatas, kampung-kota di bantaran Kali Pepe tumbuh dengan bentuk rumah yang sempit dan saling berhimpit. Secara spesifik, terdapat pola pemukiman yang sama antara satu rumah dengan yang lain, dimana beberapa ciri yang paling mencolok adalah dapur dan kamar mandi letaknya terpisah dengan rumah–bahkan di beberapa rumah, banyak yang tidak memiliki kamar mandi. Sehingga, banyak ditemui jika perabotan dapur banyak yang disandarkan ditembok samping atau depan rumah. Bahkan, ditemui di beberapa titik bahwa dapur di depan rumah tersebut kemudian "disulap" sekaligus digunakan sebagai warung kecil-kecilan yang menjual makanan ringan dan lain sebagainya.

Selain itu, oleh karena jumlah kamar tidur yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang tinggal di rumah, banyak ditemui beberapa anggota keluarga yang tidur di ruang tamu–depan televisi. Kemudian di pagi hari, barulah mereka menggulung kasurnya kembali. Hal ini dikarenakan rata-rata rumah biasanya ditinggali oleh 5 hingga 9 anggota keluarga, yang terdiri dari nenek, bapak–ibu, serta anak-anak mereka. Hal tersebut terjadi karena warga di kampung-kampung bantaran Kali Pepe yang pasca mereka menikah akan tetap tinggal di situ, tinggal bersama kedua orang tua atau mertuanya hingga mereka memiliki keturunan. Alasannya cukuplah jelas, karena rumah tersebut adalah warisan keluarga. Oleh karena tidak ada lagi lahan yang dapat digunakan untuk memperluas pemukiman, maka yang kemudian dilakukan adalah dengan meninggikan rumahnya menjadi dua hingga tiga lantai. Jika tidak ditinggikan, biasanya pemukiman mereka dibagi menjadi beberapa bagian untuk kemudian ditinggali oleh anak dan cucu mereka. Itulah yang menjadi karakteristik kehidupan kampung perkotaan saat ini, di mana masyarakat kampung memiliki kecenderungan memekarkan keluarga (*extended family*).

Karakteristik lain mengenai kehidupan di kampung perkotaan adalah kecenderungan untuk berkumpul dengan keluarga dan tetangga. Oleh karena tidak ada lahan terbuka lantaran setiap lahan telah digunakan sebagai pemukiman, maka kemudian fasilitas umum menjadi ruang publik atau ruang sosial untuk berkumpul. Selain sungai sebagai tempat memancing seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ruang publik lainnya adalah ruang publik seperti taman kampung, masjid kampung, dan kamar mandi komunal. Fasilitas umum tersebut digolongkan sebagai ruang publik karena di tempat-tempat tersebut dalam kesehariannya terjadi interaksi sosial antar anggota masyarakat kampung.

Ruang Publik

Secara harfiah, ruang publik memiliki definisi luas, di mana pada dasarnya ruang publik adalah tempat yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang, siapapun itu. Berbasis pada definisi tersebut, maka bentuk dari ruang publik sangatlah beragam. Di antaranya berupa jalan, masjid, warung-warung, dan ruang-ruang yang sengaja dibentuk dan dibangun sebagai tempat *srawung* bagi setiap orang. Pada lokasi bantaran Kali Pepe satu-satunya ruang publik yang sengaja dibangun dan berada di bantaran Kali Pepe adalah pendopo yang tepatnya berada di Sudiroprajan. Hal ini dikarenakan Sudiroprajan masih memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang publik. Terletak di depan rumah warga, dalam kesehariannya, ruang publik tersebut digunakan sebagai tempat untuk beragam aktivitas. Pada sore hari, ruang publik tersebut diakses oleh ibu-ibu kampung yang sekaligus mengajak anak-anak balitanya. Kemudian di malam hari hingga larut malam, ruang publik tersebut digunakan *nongkrong* oleh bapak-bapak hingga larut malam. Secara normatif, di tengah-tengah ruang publik tersebut dipasang aturan untuk tidak digunakan sebagai tempat mengkonsumsi minuman keras atau bahkan narkoba. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya kontrol sosial bagi masyarakat setempat.

Ditengah-tengah gencarnya pertumbuhan dan pembangunan di perkotaan, keberadaan ruang publik ditengah kampung-kota semacam ini menjadi sangat jarang ditemukan. Hal ini terjadi karena konsekuensi atas urbanisasi dan pertumbuhan penduduk sehingga lahan-lahan yang ada lebih difungsikan sebagai pemukiman. Keterbatasan lahan karena sebagian besar lahan yang ada telah digunakan sebagai pemukiman menjadikan ruang publik yang banyak dimanfaatkan adalah jalan-jalan di depan rumah mereka, juga beberapa titik (tikungan gang) yang dijadikan sebagai warung kecil untuk kemudian digunakan sebagai tempat berbincang antar tetangga.

Masjid Kampung

Sama dengan yang terjadi di kampung-kota pada umumnya, bahwa fungsi masjid digunakan sebagai tempat ibadah baik pada hari biasa hingga hari raya. Hal ini dikarenakan di kampung-kampung tersebut, lahan-lahan yang ada telah difungsikan sebagai pemukiman warga. Secara harfiah, agaknya terlebih dahulu perlu didefinisikan mengenai perbedaan antara masjid dan mushola. Bahwa masjid adalah tempat ibadah yang mampu memuat jamaah atau orang-orang yang beribadah dalam jumlah yang banyak. Oleh karenanya, masjid juga dapat digunakan untuk beribadah Jumat dan hari Raya. Sedangkan mushola hanya dapat digunakan untuk sholat berjamaah sehari-hari, lantaran ukurannya yang memang lebih kecil jika dikomparasikan dengan masjid. Di kampung Kebonan, hanya terdapat satu mushola yang letaknya berada di tengah-tengah, tepatnya berbatasan dengan kampung Kalirahman. Adalah Mushola Al-Hikmah yang dalam kesehariannya, selain digunakan untuk sholat, juga digunakan sebagai tempat menggelar pengajian rutin warga yang dilaksanakan seminggu sekali. Di sore harinya, mushola juga digunakan untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang digelar seminggu tiga kali. Sedangkan, pada hari Raya, di setiap tahunnya masyarakat melaksanakan sholat di kampung Kalirahman, tepatnya di halaman rumah Dalem Joyomartanan.

Dalam praktiknya, kegiatan keagamaan biasanya dilaksanakan secara gabung bersama kampung lain, yaitu Kampung Kalirahman karena letaknya yang berdekatan. Pun demikian dengan yang terjadi di Kampung Sangkrah, di mana dalam kesehariannya, masyarakat melaksanakan sholat di mushola yang letaknya di tengah-tengah kampung. Hanya saja mushola tersebut digunakan sebatas untuk sholat. Tidak ada TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang pada umumnya dilaksanakan di sore hari. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di kampung Sangkrah para pemudanya telah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing.

Kamar Mandi Komunal

Keberadaan kamar mandi komunal bisa tergolong dalam ruang publik kampung karena penggunaannya pada jam-jam tertentu pada saat mengantri, memunculkan adanya interaksi sosial antar anggota masyarakat kampung. Karena tidak semua warga memiliki kamar mandi masing-masing di rumahnya maka berkumpul di kamar mandi adalah keseharian. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa keberadaan kamar mandi komunal merupakan hasil atas respon Pemerintah Kota pasca banjir tahun 2007 terjadi. Sebelum banjir, pola pemukiman adalah saling berhadapan, sehingga pada saat itu posisi rumah-rumah membelakangi sungai. Pada saat banjir, rumah-rumah tersebut terendam luapan air setinggi 2 meter selama berhari-hari. Pasca itu, Pemerintah Kota mengambil kebijakan untuk merelokasi deretan rumah yang membelakangi sungai tersebut untuk berpindah ke lokasi baru, yang terbagi ke beberapa lokasi di antaranya di rumah deret Keprabon, Mojosongo, dan Rusunawa.

Paska relokasi, lahan bekas rumah-rumah tersebut kemudian digunakan untuk membangun kamar mandi komunal di beberapa titik. Sehingga, kini ditemui terdapat kamar mandi komunal di masing-masing kampung. Meski tidak semua kamar mandi komunal letaknya persis di bantaran Kali Pepe, seperti di kampung Kedung Lumbu dan kampung Sangkrah yang letaknya agak menjorok ke

tengah-tengah kampung. Melalui program besutan Pemerintah yaitu PNPM, secara serentak pembangunan tersebut dibangun di awal tahun 2008 dengan berkonsep antara kamar mandi dengan WC dan tanpa WC yang dibangun berderet. Juga di samping kamar mandi komunal tersebut terdapat beberapa kran yang digunakan masyarakat untuk mengakses air bersih guna keperluan mencuci, dan lain sebagainya. Sehingga wajar jika pada jam-jam tertentu ditemui selang-selang yang tersambung ke kran kamar mandi komunal untuk mengisi bak-bak di depan rumahnya.

Tidak hanya di Surakarta dengan Kali Pepe-nya, kisah kehidupan kampung dengan latar di Semarang pada abad 20 menegaskan bahwa setiap pagi, bangsa pribumi Jawa pergi ke sungai. Dengan kebiasaan ini, menjadikan jamban berada di luar rumah. Hal ini menjadi inspirasi bangunan rumah-rumah orang Belanda atau keturunan yang tinggal di Hindia Belanda. Di antaranya, rumah *Schurueder* membuat tempat mandi (*badhuisje*) di tepi sungai: *speelhuis* yang di bawahnya (arah aliran sungai) terdapat *washbok* (bilik tempat mencuci dan mandi yang terbuat dari bambu atau batubata. Kamar mandi yang terletak di dalam rumah sudah dikenal orang pada tahun 1870, dengan bentuk sederhana. Pada sisi belakang ruangan terdapat *washuys* yang diisi dengan *waschbalie of bad*, sebuah tong besar dan orang dapat mandi dengan menggunakan gayung. Setiap kurang lebih 10-15 bangunan rumah dibuat tempat mandi, cuci, dan kakus. Salah satu alasan MCK dibangun di luar adalah penghematan biaya pembangunan, karena rumah-rumah itu diperuntukkan bagi pegawai rendah (Wijono, 2013).

Dalam praktik kesehariannya, di Sudiroprajan warga dikenai iuran per bulan dengan nominal Rp. 30.000,- bagi mereka yang menggunakan kamar mandi komunal tersebut, dan nominal Rp. 3.000,- bagi mereka yang tidak menggunakan. Nantinya, uang iuran tersebut dikumpulkan dan dialokasikan sebagai biaya perawatan seperti mengganti kran air gayung air jika rusak. Oleh karena masyarakat memiliki mobilitas yang homogen, maka terjadi antrian di jam-jam tertentu. Di kampung Kalirahman, misalnya, pagi

hari selepas adzan Subuh atau sekitar pukul 04.30 Wib didominasi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang menggunakan kran sekaligus kamar mandi komunal dengan kepentingan mengambil air untuk memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Setelahnya, oleh karena anak-anak usia sekolah masuk pukul 07.00 Wib, maka merekalah yang selanjutnya menggunakan kamar mandi komunal tersebut. Hingga kemudian mendekati pukul 08.00 Wib barulah bapak-bapak yang menggunakan karena akan segera bersiap untuk menuju tempat kerja masing-masing. Pun demikian dengan sore harinya, yang antriannya didominasi oleh mereka yang pulang sekolah dan pulang bekerja. Pola keseharian semacam inilah yang sangat identik dengan kehidupan sehari-hari di kampung. Kini, sebagai salah satu aset fisik kampung keberadaan kamar mandi komunal semestinya digunakan dan dirawat secara bersama oleh seluruh masyarakat setempat. Tetapi tidaklah demikian dengan yang terjadi di Kampung Kebonan, di mana kamar mandi komunal lebih sering digunakan ketimbang dirawat dan jarang dibersihkan.

Legalitas Rumah dan Ancaman Relokasi

Perlu diketahui secara bersama, bahwa setiap rumah di kampung bantaran Kali Pepe adalah tidak semua rumah permanen dan secara hukum, rumah tersebut telah bersertifikat hak milik. Hal inilah yang menjadikan menjadikan kampung bantaran Kali Pepe termasuk sebagai kawasan slum area, yang secara definitif disebit sebagai daerah hunian yang legal (status hukumnya jelas) namun kondisinya sudah sangat merosot (Herlianto, 1986). Tentu menjadi yang dilematis dan komplek ketika memaparkan mengenai keberadaan pemukiman di bantaran Kali Pepe. Dari perspektif hukum, telah diatur dalam Undang-undang No. 38 Pasal 9 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan: paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal

kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter); paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Terlepas dari ketidakmampuan masyarakat untuk berpindah, satu-satunya alasan yang menjadikan masyarakat setempat tetap bertahan dan tinggal di bantaran Kali Pepe adalah lokasinya yang sangat strategis di tengah-tengah kota. Selain karena rumah-rumah yang kini dihuni adalah warisan dari para orang tua, alasan mereka tinggal di kawasan tersebut adalah karena secara geografis letaknya sangat strategis. Berada dekat dengan pusat perekonomian seperti Pasar Gede, Pasar Klewer, Beteng Trade Center (BTC), dan Pusat Grosir Solo (PGS); juga tempat hiburan seperti Alun-Alun Lor dan Kidul; dan pusat Pemerintahan Kota, yaitu Keraton Surakarta dan Balaikota Surakarta. Di kota-kota besar terutama negara berkembang seperti Indonesia, relokasi merupakan ancaman paling mutlak dialami oleh para masyarakat urban, terlebih jika relokasi tersebut terkait dengan perebutan legalitas lahan. Pada dasarnya, relokasi adalah salah satu upaya Pemerintah Kota dalam hal penataan ulang tata ruang kota. Tak luput pula dengan pemukiman di bantaran Kali Pepe. bahwa awal mula keberadaan pemukiman tersebut telah ada sejak tahun 1960-an. Sedangkan, telah ditelusuri, tidak ada yang tahu-menahu mengenai awal mula proses kepemilikan rumah dan tanah tersebut seperti apa. Maka dalam konteks ini, relokasi merupakan ancaman yang mutlak dihadapi oleh seluruh masyarakat setempat. Diakui oleh para informan di setiap kampung bantaran Kali Pepe, bahwa relokasi pemukiman adalah wacana yang bergulir dari waktu ke waktu.

Awal mulanya, beberapa agenda relokasi dilakukan pasca banjir yang terjadi tahun 2007 lalu. Ketika itu, pola pemukiman

bantaran masih berhadapan. Kemudian, ketika banjir terjadi, rumah-rumah tersebut terbawa arus banjir. Setelah itu, relokasi dilakukan Pemerintah Kota dan dipindahkan di beberapa wilayah seperti di Mojosongo dan Rusunawa, sekaligus mendapatkan tunjangan berupa uang tunai bernominal Rp. 3.000.000,-. Kini, ancaman relokasi tersebut bergulir kembali dan mendapat tanggapan yang beragam di setiap kampung-kota yang masuk dalam skema relokasi. Di Sangkrah, misalnya, salah seorang informan menganggap bahwa relokasi merupakan wacana yang tak berujung. Hal ini karena di setiap pergantian periode pemerintahan Walikota, isu tersebut selalu muncul, tetapi tanpa ada realisasi yang dilakukan. Sehingga, mayoritas masyarakat Sangkrah cenderung abai dalam menanggapi wacana relokasi tersebut. Tanggapan yang berbeda diperoleh di kampung Kedung Lumbu. Menurut salah seorang informan, mengungkapkan bahwa sebenarnya relokasi bukan menjadi masalah ketika Pemerintah Kota menyampaikan dengan sosialisasi yang informatif dan proses pelaksanaannya pun dilakukan secara adil dan transparan. Seperti memberikan uang ganti rugi yang cukup dan sesuai dengan nominal yang telah disepakati, misalnya. Hal ini dipertimbangkan karena pada dasarnya, ada kesadaran bahwa pemukiman yang kini ditinggali memang jaraknya benar-benar terlalu dekat dengan badan aliran Kali Pepe.

Lain halnya dengan tanggapan di kampung Kalirahman dan Kebonan, relokasi merupakan isu yang paling santer berhembus di kalangan warga kampung tersebut. Jika pada umumnya relokasi bantaran sungai dilakukan demi menghindari bencana banjir, di dua kampung ini wacana relokasi dilakukan dengan tujuan untuk melebarkan jalan kampung. Jika jalan melebar, maka jarak antara sungai dengan rumah menjadi agak jauh. Tentu saja hal ini bertujuan demi menjaga debit dan kestabilan air sungai. Diungkapkan oleh warga bahwa sebenarnya jika pelebaran jalan kampung memang benar akan dilakukan, hal ini bukan menjadi masalah. Nantinya, letak rumah akan mundur atau ditinggikan menjadi dua lantai bangunan

bertingkat. Tetapi, jika isu relokasi yang dimaksudkan PemerintahKota adalah relokasi untuk berpindah ke Rusunawa ataupun wilayah lain, inilah hal yang memberatkan bagi seluruh kebanyakan kampung bantaran Kali Pepe. Sebagai pemukiman yang telah ada dari tahun 1960-an, tentunya kini di kampung bantaran Kali Pepe juga ada para lansia, dimana sebagian lansia tersebut sebagiannya masih bekerja di luar rumah. Beberapa orang di antaranya bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan di Pasar Gede, sedangkan beberapa yang lain bekerja sebagai tukang cuci atau pembantu ke "rumah-rumah berpagar" di luar kampung-kota area bantaran sungai. Pemilihan pekerjaan tersebut berdasarkan jarak dan letak yang memang mudah diakses oleh para lansia tersebut.

Keseharian Warga Kampung-Kota

Menuju kampung atau pemukiman bantaran Kali Pepe dapat diakses melalui jalan yang pada mulanya lebar (karena dapat dilalui oleh dua sepeda motor berlawanan arah), hingga kemudian semakin menyempit ketika menuju ke tengah-tengah kampung. Jalan kampung-kota di bantaran Kali Pepe ini berbentuk gang-gang kecil. Dahulunya, kondisi fisik dari jalan kampung masih berupa tanah kemudian oleh Pemerintah Kota mulai diperbaiki secara serentak di seluruh kampung. Kini yang terlihat, jalan-jalan kampung bantaran Kali Pepe telah dipaving dan disemen. Jalan kampung di bantaran Kali Pepe tidaklah mutlak digunakan sebagai jalan untuk kepentingan orang berlalu-lalang. Lebih dari itu, jalan-jalan kampung telah dianggap sebagai bagian ruangan dari rumah warga. Di beberapa titik, jalan kampung digunakan sebagai tempat untuk meletakkan beragam perabotan rumah tangga. Seperti parkir sepeda motor, meletakkan peralatan dapur, menjemur pakaian, bahkan digunakan sebagai kandang jika beberapa di antara mereka ada yang memiliki hewan peliharaan.

Di hari libur seperti hari Minggu, misalnya, penggunaan jalan kampung menjadi bertambah karena hampir setiap dari mereka berada di rumah selama libur. Di Minggu pagi, sambil berbincang dengan tetangga sekitar, para ibu-ibu dan remaja perempuan biasanya mencuci baju atau memasak. Kemudian para bapak-bapak ada yang mencuci sepeda motor atau jika memiliki hewan peliharaan, warga akan berjam-jam berada dekat kandang hewan peliharaannya. Sedangkan anak-anak, selain karena tidak ada ruang publik untuk mereka, bermain di jalan depan rumah juga memudahkan orang tua untuk mengawasi anak-anak. Kesemua kegiatan tersebut terjadi dan dilakukan di jalan kampung depan rumah-rumah warga. Agaknya hal semacam ini telah menjadi ciri dari kehidupan kampung-kampung perkotaan, bahwa ketiadaan ruang yang ideal menjadikan antara ruang publik dan ruang ruang privasi sebagai dua hal yang tidak memiliki perbedaan.

Pada dasarnya, situasi keseharian di kampung-kampung bantaran Kali Pepe hampir sama dengan kampung perkotaan lainnya. Pada hari biasa, orang-orang banyak disibukkan dengan kegiatan masing-masing.Sebelum berangkat dan memulai bekerja, terlebih dahulu bapak-bapak menyempatkan diri untuk menyapa hewan-hewan peliharannya. Pun demikian dengan anak-anak seusia sekolah yang biasanya berangkat beramai-ramai bersama teman sekaligus tetangga. Jarak antara rumah dengan sekolah sangatlah dekat sehingga para orang tua tidak perlu mengantar dan anak-anak tidak perlu bersekolah menggunakan sepeda. Cukup dengan berjalan kaki saja sudah sampai di sekolah tanpa terlambat. Praktis, pada jam-jam tersebut hanya ibu-ibu yang berada di kampung. Kesibukan ibu-ibu pun beragam, jika mereka berdagang maka pada pagi hari mereka telah menyiapkan dagangannya untuk kemudian dijual berkeliling kampung atau dijual ke Pasar Gede, di mana mayoritas dari mereka adalah pedagang beragam masakan Jawa. Tidak sedikit pula ibu-ibu yang bekerja sebagai buruh di rumah tetangganya, tepatnya rumah-rumah berpagar yang letaknya di luar kampung bantaran Kali Pepe.

Dalam praktiknya, menjadi tenaga rumah tangga yang berangkat pada pukul 10.00 WIB dan mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah majikannya kemudian pulang di petang hari. Rutinitas pekerjaan tersebut dilakukan dari hari Senin hingga Sabtu, dengan perolehan upah mingguan.

Sedangkan, ibu-ibu yang memilih untuk berada di rumah biasanya di pagi hari mereka telah disibukkan dengan beragam pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Karena beragam aktivitas tersebut telah dimulai di pagi buta, praktis, tak sampai siang hari mereka telah duduk santai di depan rumah sambil ngobrol atau sekedar menonton televisi bersama tetangga. Pun demikian dengan beberapa rumah yang sekaligus digunakan sebagai tempat usaha. Dalam hal ini, kebanyakan jenis usaha dikerjakan oleh ibu-ibu, seperti usaha catering yang terdapat di kampung Sangkrah dan konveksi yang terdapat di kampung Kedung Lumbu. Praktis, seperti yang terjadi di kampung-kampung pada umumnya, bahwa sehari-harinya banyak didominasi oleh para ibu-ibu.

Kemudian, anak-anak seusia remaja yang tidak lagi meneruskan pendidikannya, kebanyakan dari mereka telah bekerja sebagai karyawan-karyawati toko, biasanya berangkat agak siang bergantung pada *shift* kerja. Di pagi hari, para remaja ini disibukkan dengan *gadget*-nya. Menjelang siang, anak-anak mulai pulang dari sekolah. Bercerita sebentar kepada orang-orang di rumah mengenai kejadian selama di sekolah, selepas itu biasanya mereka bermain dan *jajan* demi menghabiskan sisa uang sakunya bersama teman-temannya. Oleh karena di kampung-kampung bantaran Kali Pepe minim ruang publik, biasanya anak-anak bermain di halaman depan rumah, atau di jalan-jalan kampung. Beragam hal yang dimainkan, mulai dari permainan tradisional hingga *ngegame* dari *handphone*. Kampung-kampung bantaran Kali Pepe akan terlihat ramai pada saat hari libur, hari Minggu, misalnya. Hampir setiap anggota keluarga berada di rumah pada waktu tersebut. Oleh karena pola pemukiman yang saling berimpit, antara ruang privasi dan ruang publik menjadi tidak ada pembeda.

Bertetangga di Kampung

Pola kebertetanggaan *gemeinschaft* tercermin pada kebiasaan masyarakat bantaran Kali Pepe yang telah terbiasa untuk saling menolong dalam kehidupan bertetangga. Perlu diketahui sebelumnya, pada dasarnya, kalangan masyarakat menengah ke bawah memiliki pola kebertetanggaan yang lebih intens jika dikomparasikan dengan kalangan masyarakat kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini, keterbatasan ekonomi turut mempengaruhi terbangunnya pola tersebut. Merujuk pada Tonnies dalam Soekanto (1998: 146), *gemeinschaft* atau paguyuban yang terbangun pada masyarakat bantaran Kali Pepe didasarkan pada paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*) yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong-menolong, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, hingga Arisan. Kondisi Kali Pepe dengan banyaknya sampah rumah tangga yang mengapung di sepanjang aliran sungai dan air yang menghitam berbau, situasi tersebut menjadikan hampir seluruh masyarakat di kampung-kampung bantaran Kali Pepe tersebut tidak lagi dapat menggunakan air sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mereka menggunakan PDAM untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk kebutuhan konsumsi, mereka menggunakan air gallon meskipun di beberapa kampung ada juga keluarga yang masih menggunakan air PDAM karena kualitasnya layak dikonsumsi. Pasca banjir 2007, warga yang sebelumnya menggunakan air PDAM untuk dikonsumsi, kini tidak lagi dapat mengkonsumsinya lantaran air yang dihasilkan seperti ada kandungan minyak dan berlumpur ketika diminum.

Praktik kultural lainnya dari masyarakat setempat dapat diidentifikasi dari komposisi demografinya. Karena bentuk homogenitas atau heterogenitas masyarakat pada akhirnya mempengaruhi keseharian yang membentuk pola tindakan yang dibangun masyarakat. Seperti praktek di kampung Kalirahman,

Kebonan, Sudiroprajan, Kedung Lumbu, dan Sangkrah terdiri dari beragam penduduk yang heterogen dari berbagai wilayah. Urbanisasi dilakukan pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan berlanjut hingga tahun 1970-an. Sehingga, sangat sedikit sekali terdapat hubungan pertalian darah antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Meski demikian, pola interaksi yang terbangun sangatlah erat. Hal ini ditunjukkan dengan kebiasaan adanya *sesepuh* atau orang yang dituakan. Adalah sebutan *Mbokdhe, Budhe, Pakde,* dan lain sebagainya yang merupakan dalam silsilah keluarga Jawa, sebutan dari orang yang lebih muda untuk yang lebih muda. Tentunya, penyebutan tersebut menjadikan pola interaksi yang terbangun menjadi kian erat.

Mobilitas warga kampung menggunakan dua jembatan yang letaknya di antara Sudiroprajan dan kampung Kedung Lumbu; serta di antara Kampung alirahman dan Sangkrah. Selain menyebut jembatan, dalam bahasa Jawa, orang-orang juga lebih sering menyebutnya dengan istilah tanggul atau *kreteg*. Seperti yang terjadi di tempat-tempat lain pada umumnya, dalam kesehariannya, selain digunakan untuk tempat menyeberang atau berjalan, jembatan juga digunakan untuk kegiatan lain. Pada jembatan antara kampung Kalirahman, di pagi atau siang hari, jembatan tersebut digunakan untuk parkir mobil bagi mereka yang memiliki kendaraan tersebut tentunya bukanlah warga bantaran Kali Pepe. Kemudian di sore hingga malam hari, tepat di trotoar jembatan tersebut digunakan sebagai warung mie ayam dan bakso yang selalu ramai di setiap harinya. Agaknya penggunaan trotoar yang beralih menjadi warung adalah hal yang sah-sah saja, karena kini hampir setiap orang sudah jarang sekali pergi-pergi dengan berjalan kaki. Dalam hal ini, terdapat jalan besar di luar kampung bantaran Kali Pepe yang menghubungkan antara wilayah Gandekan dan Sangkrah (yaitu jalan Sungai Batanghari), berikut Sudiroprajan dan Kedung Lumbu (yaitu jalan Kapten Mulyadi). Oleh karena perannya sebagai jalan penghubung antar wilayah, dalam kesehariannya, kedua jalan

tersebut dilewati oleh mobil dan sepeda motor dengan jalur dua arah. Sehingga dalam hal fungsinya, jalan-jalan tersebut beperan sebagai media warga untuk bermigrasi.

Di kampung-kampung bantaran Kali Pepe terdapat beberapa aset perekonomian yang dimiliki oleh warga kampung-kampung tersebut. Keberadaan aset perekonomian tersebut secara tidak langsung mampu menyerap tenaga kerja dari orang-orang kampung itu sendiri. Di kampung Kalirahman, misalnya. Terdapat satu industri rumahan yang berdiri sejak tahun 1960 hingga sekarang. Adalah sandal kulit bu Yamto yang kini secara operasional dijalankan oleh generasi kedua dan ketiganya. Dahulu, sandal kulit bu Yamto merupakan pelopor industri sandal kulit Magetan. Terdapat sekitar 30-an industri sandal kulit yang ada di Gandekan. Pada saat itu, sandal kulit yang dihasilkan memperoleh respon baik di pasaran. Namun seiring perkembangan teknologi yang juga menghadirkan banyak pabrik sandal dengan harga murah, industri-industri tersebut satu per satu mengalami kebangkrutan. Kini, hanya sandal kulit bu Yamto yang masih bertahan meskipun pasarannya tidak seramai dahulu. Kini, sandal kulit beragam model untuk pria dan wanita ini hanya dipasarkan di Yogyakarta saja, juga biasanya mereka membuka stand di Night Market Ngarsopuro pada saat malam Minggu. Meski tergolong sebagai industri rumahan yang lama, keberadaan sandal kulit bu Yamto ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja dari warga sekitar Gandekan. Hal ini dikarenakan jumlah produksi yang tidak terlalu banyak sehingga dalam proses pengerjaannya juga tidak perlu melibatkan banyak tenaga.

Jika ditelusuri, sebenarnya tidak hanya terdapat sandal kulit bu Yamto saja yang menjadi aset ekonomi Kampung Kalirahman, tetapi beberapa aset lain di antaranya kerajinan tangan, konveksi, catering, dan lain sebagainya. Salah satu penghambat dari industri rumahan tersebut dikarenakan tidak ada lagi generasi yang mau dan mampu menjalankan secara operasional. Industri rumahan lainnya yaitu terdapat di kampung Kebonan Kelurahan Gandekan adalah industri pembuatan peti mati. Industri ini telah lama berdiri akhir tahun 1900-an. Dikerjakan oleh

8-10 orang dengan spesialisasi kerja yang telah terbagi secara jelas, industri pembuatan peti mati ini beroperasi setiap harinya. Bahkan, di hari Minggu pun mereka masih bekerja karena pada saat itu jumlah pesanan cukup banyak. Secara teknis, proses pengerjaan peti mati ini memerlukan tempat atau lahan yang cukup luas. Sedangkan, lahan yang terdapat di kampung Kebonan sangat terbatas. Sehingga yang terjadi, beberapa pengerjaan dilakukan di pinggiran sungai seperti pada saat pengecatan, dan lain sebagainya.

Industri rumahan yang cukup besar lainnya yaitu terdapat di Kelurahan Kedung Lumbu, yaitu konveksi baju-baju balita dikerjakan dengan proses setengah jadi berupa kain hingga menjadi baju-baju balita yang siap digunakan. Industri ini berjalan dengan sistem borongan yaitu berproduksi jika ada pemesanan. Biasanya, konveksi ini memperoleh banyak pesanan, sehingga secara operasional, industri konveksi mampu menyerap tenaga kerja dari kalangan para ibu-ibu. Pun demikian dengan pola usaha yang terdapat di kampung Sangkrah dan kampung Kalirahman. Sebuah catering yang beroperasi setiap hari tersebut memperkerjakan 4-7 orang yang keseluruhan dari mereka adalah tetangganya sendiri. Oleh karena usaha-usaha tersebut merupakan kegiatan yang memerlukan tempat yang lebih luas dalam pengerjaannya, maka secara teknis kegiatan memasak tersebut sehari-hari berlangsung di depan rumahnya dengan kata lain, di gang-gang kampung. Sehingga menjadikan gang-gang kian menyempit.

Konsekuensi atas keberadaan beragam tempat usaha di bantaran Kali Pepe tersebut secara tidak langsung turut berkontribusi lebih dalam hal pembuangan sampah dan limbah ke badan Kali Pepe. Kondisi tersebut berdasarkan pada jumlah sampah dan limbah yang lebih banyak dihasilkan oleh catering jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga biasa. Terlepas dari problematika tersebut, pada hakikatnya secara tidak langsung Kota Surakarta mampu tumbuh dan berkembang karena ditopang pula oleh keberadaan kampung-kota. Meski pada praktiknya, tak banyak orang yang menyadari hal tersebut sehingga kualitas hidup di kampung-

kotacenderung diabaikan. Kini secara fisik, perubahan di sungai pun terjadi dari yang semula tepian sungai masih berupa pepohonan dan rerumputan, pada rentang 2005 hingga 2011, secara bertahap oleh Pemerintah Kota mulai dibangun pagar tepian sungai berupa tembok ataupun besi. Tentunya, pembangunan sungai tersebut berimplikasi pada perubahan ekologi sungai. Sedangkan, perubahan ekologi sungai terjadi bersamaan dengan perubahan tindakan masyarakat kota terhadap Kali Pepe. Diidentifikasi lebih lanjut, ditemukan bahwa pola pemukiman di kampung-kampung bantaran Kali Pepe (kecuali kampung Kedung Lumbu dan Kalirahman) tidak dibangun dengan adanya septic tank dan IPAL ataupun sistem resapan limbah lainnya, sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika limbah-limbah tersebut dialirkan secara langsung ke badan sungai. Praktik semacam ini telah terjadi sejak awal mula pemukiman didirikan.

Secara ekologis, Kali Pepe yang dahulunya mengalirkan air jernih, kini sudah tidak lagi demikian. Hal ini dikarenakan debit air sungai surut dengan kualitas air yang hitam pekat karena telah tercampur dengan limbah dan sampah rumah tangga. Maka ketika ekologi sungai telah berubah, akan mengubah aspek lainnya pula, seperti perubahan fungsi ekonomi dan fungsi sungai. Oleh karena pada masa lampau air Kali Pepe masih bersih dan jernih, ekosistem sungai pun dapat hidup di dalamnya. Sehingga banyak ditemui jika dahulunya Kali Pepe digunakan untuk memancing dan hasilnya sebagai lauk-pauk sehari-hari. Kini, kegiatan memancing memang masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat di beberapa titik kampung bantaran. Orientasi memancing pun telah berubah, dari yang semula sebagai kegiatan rutin sehari-hari, kini memancing dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang saja. Artinya, Kali Pepe saat ini tidak lagi terdapat fungsi ekonomi bagi masyarakat di bantarannya. Sebuah kondisi yang telah terjadi sekian lama dan butuh kemauan semua pihak untuk merespon kondisi tersebut. Butuh kemauan banyak pihak untuk menempatkan kembali Kali Pepe menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga.

BAB II
KALI TEGAL KONAS SURAKARTA

Kampung-Kota di Tepi Kali Tegal Konas

Bagian lain dari narasi sungai di kota Surakarta, yang membentang aliran air dari dan menuju Bengawan Solo adalah sungai Tegal Konas, sungai yang berada diantara wilayah kelurahan Kedung Lumbu dan Kelurahan Sangkrah. Melintang ditengah kampung yang padat, beririsan dengan sungai Jenes untuk kemudian menyatu bersama sungai Pepe. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin majunya perkembangan kota, sungai di Surakarta lambat laun terpinggirkan oleh beragam penyebab. Salah satunya adalah sungai Tegal Konas dimana titik sungai yang bermuara ke Kali Jenes hingga kemudian mengalir ke Kali Pepe ini memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan. Di sepanjang alirannya terdapat banyak sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri yang berasal dari pabrik disekitarnya. Dari limbah-limbah pabrik itulah sungai ini sering mengalami perubahan warna. Pembangunan fisik kota yang mengalami pertumbuhan memberikan implikasi dengan terjadinya perubahan signifikan di kalangan masyarakat.

Skema pembangunan industri, hotel, perumahan, serta supermarket turut andil dalam perubahan di kalangan masyarakat. Semua bentuk daya tarik kota menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang sekitar untuk memutuskan tinggal dan menetap di kota. Alasan utamanya cukup jelas, demi memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik namun seiring dengan pembangunan kota, lahan juga menjadi semakin sempit sehingga warga mulai mendirikan pemukiman di sekitar sungai. Daerah pinggiran sungai yang semula

merupakan wilayah hulu dari masuknya air telah berubah menjadi areal terpinggirkan dan terpencil. Area semacam inilah yang kemudian menjadi salah satu 'area buangan' sekaligus penyelamat bagi penduduk pedesaan yang berbondong-bondong bermigrasi dari pedesaan ke kota guna menemukan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan di daerah pedesaan asal mereka. Gebyar perkotaan yang diiringi dengan modernisasi kehidupan perkotaan telah menjadi daya tarik bagi migran pedesaan untuk memaksakan diri berjuang mengais bagian kehidupan perkotaan yang sangat kejam bagi mereka. Wilayah pinggiran sungai yang semula merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat telah berubah menjadi wilayah yang dianeksasi kalangan migran sehingga terciptalah pemukiman dengan berbagai bentuk di pinggiran sungai. Peradaban pertanian perkotaan telah digantikan dengan peradaban perdagangan di perkotaan. Bersamaan dengan itu, sungai telah berubah menjadi wilayah belakang pemukiman penduduk, bahkan menjadi tempat pembuangan sisa-sisa simbol kehidupan perkotaan (Kutanegara, 2014).

Merujuk banyak catatan, sungai merupakan salah satu aspek lingkungan yang keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Sungai merupakan sumber air bersih yang juga digunakan sebagai sarana transportasi. Ketika sungai digunakan sebagai jalur transportasi air, mayoritas masyarakat yang berdomisili di sekitarnya memiliki pola pemukiman dengan menghadap ke sungai. Pertimbangannya adalah karena sungai merupakan tempat yang strategis namun, kehadiran teknologi yang mewujud dalam bentuk transportasi darat memberikan implikasi terhadap banyak hal. Tidak hanya berbatas pada pergeseran transportasi air yang beralih ke darat, pola pemukiman pun berubah. Tjahjono (2009) menegaskan bahwa perubahan penggunaan jalur transportasi dari jalur sungai menjadi jalur darat melatari berubahnya arah hadap rumah tinggal, dari semula cenderung menghadap ke sungai menjadi ke arah jalur darat. Rumah tinggal dan pabrik yang berada di tepian sungai kini banyak yang posisinya membelakangi sungai. Akibatnya, sungai

menjadi tempat bagi semua tumpahan sampah rumah tangga dan limbah industri. Pencemaran sungai menjadi kenyataan yang tak terelakkan.

Selain itu keberadaan piranti dunia modern yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk memperoleh air bersih dengan mudah juga turut mempengaruhi posisi sungai, dimana sungai tak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber kehidupan untuk memperoleh air bersih. Sama halnya dengan kondisi sungai Tegal Konas yang kini digunakan sebagai tempat pembuangan limbah pabrik serta limbah rumah tangga. Pabrik dan pemukiman di sekitar bantaran sungai mengalirkan limbah cairnya secara langsung ke sungai. Menurut para sesepuh yang telah tinggal di daerah tersebut selama sekitar 60 tahun, sungai Tegal Konas memang telah tercemar sejak lama. Bahkan kondisi sungai dahulu lebih memprihatinkan dibandingkan kondisi sungai sekarang meskipun bentuk sungai dahulu lebih natural dibanding sungai sekarang yang telah dibangun sedemikian rupa. Sungai di masa lalu berupa rawa-rawa, dimana tak ada pagar pembatas, jembatan maupun infrastruktur-infrastruktur yang lain. Di daerah sekitar tumbuh pohon-pohon yang menyebabkan lokasi menjadi gelap. Kondisi daerah di sekitar sungai juga belum sepadat sekarang sehingga banyak warga yang justru takut untuk membangun rumah di sekitar daerah bantaran.

Meskipun belum dipadati pemukiman penduduk, sungai Tegal Konas ternyata memang telah sejak dulu tercemar. Pabrik di sekitar menurut penuturan warga yang telah tinggal di wilayah bantaran selama semenjak sebelum era tahun 1970an dan mbah-limbah yang dihasilkan oleh pabrik sejak dahulu telah masuk ke sungai. Tanggul-tanggul pembatas yang berada kanan-kiri sungai menurut warga didirikan pada tahun 1960-an. Sebelum ditanggul daerah bantaran di kiri-kanan sungai berupa dataran tanah biasa. Awalnya, tanggul pembatas berupa tatanan batu bata berbeda dengan kini yang telah berupa *paving*. Pagar-pagar pembatas juga belum dibangun, baru pada sekitar tahun

2000 dibangun pagar-pagar pembatas di sisi kiri dan kanan sungai. Kini pemukiman di sepanjang bantaran sungai ini semakin menjamur bahkan telah berubah menjadi pemukiman padat penduduk.

Disekitar area pemukiman juga telah banyak dibangun kamar mandi umum untuk fasilitas MCK yang dahulu warga menggunakan area tengah sungai untuk keperluan MCK. Meskipun demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah ini yang beragam lama tinggalnya, menyatakan bahwa selama tinggal di wilayah tersebut tidak pernah memanfaatkan sungai untuk kebutuhan hidupnya baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai sarana transportasi. Selain sungai tidak bisa dimanfaatkan sejak lama karena tercemar, berbagai piranti dunia modern telah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka yang di masa lalu hanya bisa dipenuhi oleh sungai.

Sungai Tegal Konas yang terletak diantara Kelurahan Kedung Lumbu dan Kelurahan Sangkrah, juga mengalami situasi yang sama. Kedua Kelurahan tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Dimana bantaran di satu sisi merupakan bagian dari kelurahan Sangkrah sedangkan sisi yang lain merupakan bagian dari kelurahan Kedung Lumbu. Kelurahan Kedung Lumbu memiliki 7 RW. Bagian wilayah bantaran yang dicatat termasuk dalam wilayah RT 01/RW 01, RT 02/RW 02, dan RT 03/RW01. Sedangkan bagian wilayah bantaran yang termasuk dalam Kelurahan Sangkrah adalah RW 04, RW 05, RW 06 dengan total RW yang dimiliki oleh Kelurahan Sangkrah adalah 13 RW. Luas wilayah kelurahan Kedung Lumbu adalah 55 Ha sedangkan luas wilayah kelurahan Sangkrah adalah 45,20 Ha dengan luas yang mendominasi adalah wilayah pemukiman. Penduduk Sangkrah dan penduduk Kedung Lumbu terbagi dalam beberapa RT dengan kepadatan penduduk yang hampir sama. Jumlah penduduk kelurahan Sangkrah adalah 11.818 sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Kedung Lumbu adalah 5.730 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan tidak begitu mencolok.

Kali Tegal Konas nan Padat

Dinamika sungai Tegal Konas hampir sama seperti sungai lainnya. Agenda kota untuk meluruskan sungai adalah usaha untuk membuat sungai-sungai alamiah yang bercabang-cabang dan berkelok-kelok menjadi sungai utama yang relatif lurus. Kondisi ini terjadi di sungai Tegal Konas ini dimana aliran sungai yang lurus ini dibatasi oleh tanggul-tanggul pembatas. Sebelum berupa aliran lurus dengan tanggul di kanan-kirinya, sungai Tegal Konas masih berupa rawa-rawa. Disekitar aliran sungai masih ditumbuhi oleh pepohonan. Pada dekade tahun 1960-an, tanggul mulai dibangun yang menyebabkan alur sungai menjadi satu garis lurus. Daerah bantaran sungai hilang dan digantikan oleh pemukiman penduduk yang dibangun sejajar dengan tanggul pembatas (Maryono, 2007). Hal ini menyebabkan banjir yang sering melanda langsung mengenai pemukiman warga karena daerah bantaran yang berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit sungai pada saat banjir telah tergantikan oleh pemukiman.

Merekam sungai Tegal Konas dalam beberapa unsur-unsur fisik sungai yang meliputi luas/lebar sungai, panjang sungai, serta kedalaman sungai serta berbagai aspek pendukungnya seperti tanggul pembatas. Sungai Tegal Konas memiliki lebar sekitar 4 meter dan hampir tidak ada perubahan lebar pada sungai ini. Sungai ini memiliki panjang sekitar 800 m dengan bagian hulu yang berada di belakang kios fotokopi, tepatnya di jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon. Bagian hilir sungai ini terletak dipintu air, tepatnya diantara wilayah kelurahan Sangkrah RT 05 /RW 09 dan Kelurahan Kedung Lumbu RT 02/RW 01 yang akhirnya bermuara di sungai Jenes. Sungai yang terletak di antara Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Kedung Lumbu tercemar berat. Di sepanjang aliran sungai bisa dilihat banyak sampah yang menumpuk seperti bungkus-bungkus plastik, pampers dan sebagainya. Bahkan warna air di sungai ini sering berubah-ubah karena pabrik yang membuang limbahnya secara langsung ke sungai. Warna air sungai sering berubah menjadi warna hijau, merah bahkan hitam, tergantung limbah yang di buang oleh pabrik yang ada di sekitar.

Di kiri-kanan sungai berdiri pemukiman warga yang cukup padat. Jarak antara sungai dan pemukiman terbilang sangat dekat, hanya ada sedikit ruas jalan diantara pagar pembatas sungai dan pemukiman. Lebar jalan di sempadan sungainya pun terhitung sempit, hanya berkisar 50 cm yang paling sempit dan yang paling lebar sekitar 2 meter bahkan beberapa ruas jalan telah tertutup pemukiman penduduk. Ruas jalan ini juga difungsikan sebagai tempat parkir sepeda motor oleh warga yang tinggal di bantaran karena luas lahan yang minim tidak memungkinkan mereka memiliki tempat parkir di dalam area rumah.

Tak hanya itu, bangunan-bangunan yang didirikan diatas sungai menjadi pemandangan yang tak lazim. Rumah-rumah penduduk yang didirikan diatas sungai, dimana bagian rumah penduduk yang menjorok ke sungai serta bangunan-bangunan lain yang didirikan diatas sungai menjadi hal yang menjadikan sungai terlihat *sumpek*. Volume sungai sendiri pada musim kemarau rata-rata hanya mencapai kedalaman sekitar 10 sampai 15 cm. Hal ini mengakibatkan sampah-sampah yang menggenang di sepanjang aliran air terlihat sangat menumpuk dan menjadikan sungai terlihat kumuh. Berbeda dengan ketika musim penghujan dimana volume air sangat bertambah dan justru meluap hingga ke pemukiman warga di bantaran sungai. Namun, menurut penuturan warga bertambahnya volume air di musim penghujan justru bisa mengalirkan sampah-sampah yang ada dialiran sungai sehingga sungai menjadi lebih bersih dibandingkan pada saat musim kemarau. Saat musim kemarau, volume air memang sangat sedikit sehingga mengakibatkan sampah-sampah dialiran yang menggenang. Saat musim penghujan, bertambahnya volume air bisa membantu mengalirkan sampah yang menggenang.

Menurut penuturan salah satu warga, Ibu Samiyati keadaan sungai dulu tak seperti sekarang. Tanggul pembatas pun tidak setinggi sekarang. Tanggul pembatas pada saat awal dibangun terbuat dari batu bata. Pada zaman sekarang tanggul pembatas telah diganti dengan bahan *paving*. Tinggi tanggul pembatas tidaklah sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Disatu sisi, jarak antara permukaan sungai dengan pemukiman warga

hanya berjarak sekitar 50 cm, disisi lain terdapat tanggul yang cukup tinggi yang membatasi permukaan air sungai dengan pemukiman penduduk yaitu sekitar 2 meter. Pada tanggul pembatas yang cukup rendah, oleh masyarakat sekitar banyak diurug oleh bebatuan agar jarak antara permukaan air dengan rumah penduduk tidak terlalu dekat. Selain bebatuan, pada zaman dulu, banyak warga yang memanfaatkan pasir yang ada di sungai untuk mempertinggi lahan di area pemukiman. Lama-kelamaan setelah tanah di bantaran semakin tinggi dan pemukiman-pemukiman yang ada menjadi bangunan permanen seperti sekarang, banyak warga yang tak lagi memanfaatkan pasir yang ada di dalam sungai sehingga pasir menumpuk dan sungai menjadi semakin dangkal dikarenakan pasir yang semakin lama semakin banyak. Hal inilah yang menurut Ibu Samiyati menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banjir.

Talud Sungai, 2016

Dangkalnya sungai juga disebabkan oleh volume sampah yang semakin bertambah. Sampah yang ada di sungai Tegal Konas ini berupa sampah rumah tangga dan sampah industri. Sampah industri berupa limbah cair sisa produksi pabrik dialiran sungai. Limbah cair inilah yang membuat air sering berubah warna seperti merah, hitam, hijau dan sebagainya tergantung buangan dari pabrik. Selain limbah pabrik, limbah rumah tangga yang ada di sungai antara lain sampah plastik, kertas, dedaunan, popok bayi, sampah kaca, botol plastik, kayu dan sebagainya. Selain aspek fisik, berbagai infrastruktur serta berbagai sarana dan prasarana juga dibangun di wilayah sungai Tegal Konas yang bisa dimanfaatkan warga dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Pagar Pembatas

Sejarah Kelurahan Kedung Lumbu berdasar penuturan warga sekitar, wilayah di sekitar sungai Tegal Konas menjadi pemukiman padat penduduk, wilayah ini berupa rawa-rawa. Lahan dipinggiran sungai dapat dikatakan sejajar dengan aliran sungai sehingga kemudian lahan sekitar *diurug* hingga menjadi lebih tinggi dan didirikan pemukiman-pemukiman. Sejalan dengan menjamurnya pemukiman. Perubahan-perubahan fisik di lingkungan sekitar juga turut berkembang, salah satunya adalah dibangunnya pagar pembatas di kedua sisi sungai. Menurut Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Kedung Lumbu, pembangunan pagar pembatas ini merupakan salah satu usulan warga yang bertujuan untuk mengurangi dampak banjir agar tidak langsung *luber* ke warga.

Tembok pembatas yang berada di pinggir-pinggir sungai yang membatasi antara jalan dan sungai dibangun pada dekade tahun 2000 dengan tinggi rata-rata sekitar 2 meter. Bahkan antara pemukiman dan sungai ada yang tidak dibatasi oleh tembok, hanya dibatasi sebidang ruas jalan saja. Hal ini cukup berbahaya apabila melihat banyaknya anak kecil yang menghuni pemukiman di sekitar bantaran. Pagar pembatas ini menurut penuturan warga dibangun atas bantuan dari Pemerintah Kota. Wilayah sungai Tegal Konas dan daerah bantarannya

memang merupakan daerah rawan banjir bahkkan merupakan daerah langganan banjir. Hampir di setiap musim hujan, air sungai meluap hingga ke pemukiman warga. Namun setelah dibangunnya pagar pembatas antara sungai dan pemukiman yang cukup tinggi dampak banjir terhadap warga sedikit berkurang. Selain berfungsi untuk mengurangi dampak banjir, pagar pembatas yang didirikan di kedua sisi sungai juga berfungsi sebagai pengaman. Kedua wilayah kelurahan yang merupakan pemukiman padat penduduk ini juga dihuni oleh banyak anak kecil. Cukup berbahaya jika anak-anak kecil bermain atau berlarian di pinggiran sungai tanpa adanya pembatas.

Jembatan

Jembatan yang dibangun diatas sungai Tegal Konas bertujuan untuk menghubungkan dua wilayah kelurahan. Setidaknya, terdapat sekitar 18 jembatan yang menghubungkan wilayah Kelurahan Sangkrah dan wilayah Kelurahan Kedung Lumbu. Jembatan yang berada di atas sungai yang menghubungkan kedua wilayah ini tidak semuanya merupakan jembatan permanen yang dibangun oleh Pemerintah Kota. Beberapa diantaranya merupakan jembatan yang dibangun oleh inisiatif warga sekitar berupa jembatan bambu serta jembatan penghubung yang berupa sebidang ruas jalan di tengah sungai yang menghubungkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Hanya ada 2 jembatan yang resmi dibangun yang bertujuan untuk menghubungkan kedua Kelurahan ini. Sisanya adalah jembatan bambu serta jalan penghubung yang dibangun oleh inisiatif warga yang juga digunakan untuk aktivitas sehari-hari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut seperti menjemur pakaian. Berbeda dengan jembatan resmi yang memang sengaja dibuat untuk difungsikan sebagai akses jalan penghubung, jembatan-jembatan bambu serta ruas jalan yang dibangun ditengah-tengah sungai juga digunakan sebagai sarana yang digunakan warga untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Beberapa diantaranya adalah untuk mencuci piring dan menjemur bahan makanan kering seperti jagung atau sisa nasi, bahkan beberapa diantaranya digunakan sebagai tempat menjemur pakaian serta untuk parkir kendaraan bermotor.

Jembatan Alternatif, 2016

Bangunan

Sempitnya lahan pemukiman membuat warga memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tersedia untuk membantu aktivitasnya agar lebih nyaman termasuk ruang kosong di sisi sungai. Pemukiman di kedua kelurahan di sisi sungai memang sangat padat. Hampir semua rumah di daerah ini tidak memiliki sedikit lahan kosong untuk halaman atau teras rumah. Teras rumah yang mereka gunakan untuk duduk-duduk bersantai kebanyakan merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui untuk aktivitas warga. Dimalam hari, jalan tersebut banyak digunakan untuk area parkir kendaraan bermotor. Padatnya pemukiman juga tidak memungkinkan warga membuat rumah yang cukup luas untuk dapat melakukan semua aktivitas rumah tangga di dalam rumah. Hal inilah yang membuat warga yang tinggal tepat di bantaran sungai mengambil inisiatif mendirikan

bangunan-bangunan yang menjorok ke sungai untuk tambahan lahan pemukiman yang ditempatinya. Bangunan-bangunan yang menjorok ke sungai ini biasanya digunakan untuk parkir kendaraan bermotor dan mencuci piring karena lahan di dalam rumah maupun area sekitar rumah tidak memungkinkan untuk dibangun area parkir.

Seperti halnya bangunan-bangunan yang didirikan menjorok ke sungai, bangunan yang didirikan tepat diatas sungai juga didasari oleh faktor sempitnya lahan. Bangunan di atas sungai ini berupa tambahan ruang misalnya untuk dapur dan tempat parkir. Bahkan bukan hanya untuk tambahan ruang, bangunan ini bahkan ada yang berupa rumah yang didirikan sebagai tempat hunian. Yang lebih parah adalah bangunan-bangunan diatas sungai yang benar-benar telah menutup wilayah atas sungai beserta akses jalan yang berada di sisi sungai.

Hal paling menarik adalah didirikannya masjid tepat ditengah-tengah sungai. Sama halnya seperti masjid–masjid yang ada di wilayah kampung yang lain, masjid ini juga di gunakan sewajarnya tempat ibadah untuk umat muslim. Uniknya masjid ini ada di atas sungai Tegal Konas dimana seharusnya ini tidak diperbolehkan. Namun warga mengaku karena kurangnya lahan untuk tempat beribadah, maka dibangunlah masjid ini atas inisiatif warga sekitar karena mereka mengatakan bahwa jika sebelumya belum ada masjid yang terdekat. Walaupun sebenarnya telah ada kebijakan dari pemerintah yang melarang pendirian bangunan di atas aliran sungai, tetap saja banyak warga yang masih nekat mendirikan bangunan-bangunan tersebut. Bangunan-bangunan diatas sungai tersebut merupakan bangunan illegal, namun pemerintah setempat pun tidak bisa mengambil tindakan atas beberapa alasan.

Pendirian bangunan di atas sungai di satu sisi memang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar seperti harus mengambil jalan memutar ketika bangunan yang didirikan tersebut menutup akses jalan. Namun disisi lain masyarakat merasakan manfaat didirikannya bangunan di atas sungai ini, terutama bangunan masjid yang terletak di dekat pintu air. Salah satu warga yang tinggal di dekat pintu air tersebut

menyatakan bahwa setelah adanya masjid tersebut, pemandangan kotornya sungai yang biasanya terlihat dari luar rumahnya menjadi tertutup. Aliran sungai Tegal Konas memang menuju ke pintu air ini sehingga wajar jika sampah-sampah yang ikut hanyut terbawa aliran berkumpul di tempat tersebut. Hal ini tentunya sangat mengganggu bagi warga yang tinggal di bantaran tepat di sisi kanan kiri pintu air baik dari segi aromanya maupun pemandangannya.

Baik Kelurahan Kedung Lumbu maupun Sangkrah merupakan daerah padat penduduk dimana lahan yang tersedia di kedua wilayah sangatlah minim, termasuk lahan yang ada di area bantaran sungai. Oleh karena itu, tidak semua rumah yang ada di daerah tersebut memiliki kamar mandi atau MCK pribadi. Beberapa warga masih banyak yang menggunakan MCK umum yang tersedia di beberapa titik wilayah. Mereka yang tidak memiliki kamar mandi pribadi menggunakan kamar mandi umum untuk mandi dan mencuci pakaian. Untuk mencuci piring pun terkadang dilakukan di kamar mandi umum. Di area bantaran sungai terdapat sekitar 9 MCK umum yang bisa digunakan warga untuk keperluan MCK serta akses air bersih. Fasilitas MCK atau kamar mandi umum ini, dibangun oleh bantuan dari berbagai pihak diantaranya kelurahan serta pnpm perkotaan. Selain MCK umum, dibeberapa titik wilayah juga disediakan ledeng umum yang bisa digunakan oleh warga untuk mengambil air bersih yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga (memasak, minum, dan lain-lain). Terkadang ledeng ini juga digunakan oleh warga untuk mencuci pakaian jika malas ke MCK umum atau MCK umum sedang antri untuk digunakan.

Dinamika Warga Sepanjang Kali Tegal Konas

Pola pemukiman masyarakat bantaran sungai Tegal Konas berbentuk memanjang (linier) dimana pemukiman di wilayah ini membentuk pola yang berderet memanjang namun tidak beraturan. Pola pemukiman ini mengikuti alur sungai namun beberapa rumah

tidak terletak di sepanjang pinggiran sungai tetapi membentang di tengah-tengah sungai. Sempitnya lahan yang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk serta keterbatasan ekonomi membuat masyarakat nekat mendirikan hunian ditempat yang tidak selayaknya. Status hunian di pemukiman bantaran sungai ini kebanyakan adalah milik pribadi tidak bersertifikat serta sewa. Status rumah milik pribadi dimiliki oleh warga asli yang telah lama menempati wilayah tersebut. Pemukiman di wilayah bantaran telah ada sejak tahun 1950 an namun belum sepadat sekarang.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk serta daya tarik kota membuat semakin banyak masyarakat yang menghuni wilayah tersebut yang menyebabkan wilayah bantaran semakin padat. Salah satu warga menyatakan sengaja mendirikan bangunan di wilayah tersebut dengan alasan faktor ekonomi yaitu tidak adanya biaya untuk membeli tanah di kota. Mayoritas rumah-rumah di wilayah bantaran tersebut merupakan bangunan yang tidak bersertifikat terlebih hunian yang didirikan di tengah sungai. Sedangkan warga dari luar kota (perantau) menempati wilayah tersebut dengan menyewa salah satu hunian kosong di wilayah tersebut. Warga yang lain menyewa hunian di daerah tersebut juga menyatakan, alasan ekonomi merupakan faktor yang memaksa ia menempati wilayah tersebut. Beliau juga sempat menyatakan bahwa ada kabar yang mengatakan bahwa hunian tersebut akan segera digusur.

Hunian warga baik di Kelurahan Kedung Lumbu maupun Kelurahan Sangkrah saling berdempetan antara satu rumah dengan rumah yang lain. Jarak terbesar yang ada dipemukiman tersebut hanya merupakan gang yang merupakan akses jalan yang bahkan tidak bisa dilewati oleh sebuah mobil. Ukuran rumah rata-rata di wilayah ini adalah 3 x 6 meter, terdiri dari rumah satu lantai dan dua lantai. Ukuran rumah terbesar sekitar 6 x 7 meter. Sempitnya lahan membuat mayoritas masyarakat bantaran sungai baik yang termasuk wilayah Kedung Lumbu maupun Sangkrah tidak memiliki

fasilitas MCK pribadi. Mayoritas masyarakat menggunakan MCK umum. Aliran air di rumah hanya berupa *kran* ledeng yang digunakan untuk aktivitas kecil seperti mencuci piring, wudhu, dan sebagainya. Rumah-rumah yang ada di kedua sisi bantaran ini semuanya berupa bangunan permanen bertembok semen. Yang membedakan pola pemukiman di wilayah bantaran ini adalah bangunan yang berada di kedua lokasi Kelurahan ini. Bangunan yang ada di daerah pemukiman wilayah bantaran yang termasuk wilayah Kelurahan Sangkrah semuanya berupa rumah/hunian penduduk. Sedangkan bangunan yang berada di daerah pemukiman bantaran yang termasuk wilayah Kelurahan Kedung Lumbu berupa hunian penduduk serta pabrik tekstil dan sablon.

Ruang Bersama Warga

Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar warga untuk saling berinteraksi.Terdapat beberapa ruang bersama yang digunakan oleh warga untuk berkumpul dan saling berinteraksi diantaranya adalah Poskamling. Di wilayah bantaran terdapat 2 Poskamling yang biasa digunakan warga untuk berkumpul saat ronda malam yang juga digunakan sebagai tempat berkumpul pada siang/sore hari. Poskamling, seperti fenomena yang terlihat dilapangan, selain digunakan sebagai ruang publik juga disalahgunakan oleh warga untuk kepentingan pribadi, seperti digunakan untuk menjemur pakaian oleh warga yang tinggal dekat dengan poskamling.

Selain poskamling, ruang publik yang sering digunakan warga untuk berkumpul adalah jembatan. Selain difungsikan sebagai penghubung kedua wilayah, jembatan ini juga difungsikan sebagai ruang publik selain poskamling dimana warga menggunakannya sebagai tempat untuk duduk-duduk dan mengobrol bersama tetangganya. Mengingat kedua wilayah ini merupakan wilayah yang padat penduduk, tak heran bila daerah ini memang minim

ruang publik, sehingga fasilitas seperti jembatan digunakan sebagai ruang publik. Selain Poskamling dan jembatan, pagar-pagar disisi sungai juga digunakan sebagai ruang publik warga. Minimnya lahan, membuat warga berinisiatif untuk membangun ruang publik di area-area kosong yang memungkinkan dibangun tempat untuk berinteraksi. Biasanya, ruang publik ini berupa tempat duduk yang dibuat menempel dengan pagar pembatas.

Seperti Kelurahan-kelurahan pada umumnya, organisasi sosial yang terdapat di wilayah ini berupa perkumpulan Ibu-Ibu PKK, perkumpulan RT untuk bapak-bapak, serta Karang Taruna untuk remaja yang rutin diadakan setiap bulan sekali. Organisasi lain yang ada di wilayah ini adalah bank sampah yang telah berjalan di salah satu RW di Kelurahan Sangrah yaitu di RW 04. Menurut penuturan salah seorang warga yang mendiami wilayah ini, bank sampah ini merupakan organisasi ibu-ibu PKK di RW ini untuk mengelola sampah yang masih bisa dijual dan di daur ulang seperti sampah plastik, kertas, kardus atau botol-botol. Sistem dalam bank sampah ini yaitu setiap rumah memilah sampah yang bisa didaur ulang yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangganya untuk kemudian dikumpulkan di satu tempat. Sampah yang telah terkumpul kemudian dijual kepada pengepul.

Sungai yang mengalir di antara dua wilayah Kelurahan ini tentunya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan yang terjadi bisa merupakan perkembangan kearah positif maupun negatif. Perkembangan sungai Tegal Konas juga mengalami perkembangan yang positif sekaligus negatif. Perkembangan ke arah yang positif berupa berkurangnya banjir akibat telah dibangunnya sungai menjadi sedemikian rupa seperti pembangunan ruang fisik sungai berupa tanggul dan pagar pembatas. Selain itu pembangunan masjid diatas sungai juga memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat khususnya yang tinggal di dekat area masjid. Masjid ini didirikan di daerah di

dekat pintu air dimana banyak sampah yang berkumpul disana. Sebelum adanya masjid, warga yang tinggal di sekitar area pintu air merasa sangat tergganggu karena banyaknya sampah yang lama-kelamaan menimbulkan bau yang tidak enak, serta menimbulkan pemandangan yang tidak enak dilihat. Dengan didirikannya masjid yang menutup area di dekat pintu air, dampak yang ditimbulkan oleh menumpuknya sampah menjadi berkurang. Perkembangan kearah negatif berupa kondisi sungai yang justru semakin tercemar dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya tak bisa dimanfaatkan lagi.

Selain perkembangan ke arah positif dan negatif seperti yang dijelaskan diatas, perubahan kondisi sungai yang lain memang tidak terlihat signifikan. Seperti kondisi aliran sungai yang menurut warga lebih bersih dibandingkan kondisi dahulu. Dahulu, sampah yang dibuang disungai tidak hanya sampah kecil rumah tangga namun juga berbagai perabot rumah tangga seperti kasur dan meja kursi. Berbagai larangan serta aturan pembuangan sampah di sungai yang ada sekarang menurut penuturan warga memang cukup mengurangi volume sampah, meskipun masih terdapat berbagai jenis sampah kecil di sepanjang aliran sungai.

Keberadaan Sampah

Keberadaan sungai secara otomatis berkonsekuensi pada keberadaan limbah. Adanya limbah, dilihat dari segi sifat maupun jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan, dalam hal ini khususnya adalah sungai. Tercemarnya lingkungan sungai juga akan membahayakan kesehatan manusia. Limbah yang mencemari sungai ini dapat berasal dari berbagai macam kegiatan, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri. Pengelolaan limbah sangat diperlukan karena dapat menimbulkan berbagai dampak seperti yang tertuang dalam Perda Kota Solo Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 57 Huruf B yang berbunyi: "Pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber perairan

(sungai kanal, danau, selokan dan sistem drainase kota) berpotensi mempercepat pendangkalan/sedimentasi dan menyumbat aliran air menyebabkan berkurangnya daya tampung air sehingga mengakibatkan banjir. Pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber air dan tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti: menjadikan media berkembangnya penyakit termasuk serangga ataupun binatang lainnya yang menjadi vektor penyakit, menimbulkan bau, mengganggu kebersihan dan estetika lingkungan."

Sungai Tegal Konas merupakan sebuah sungai kecil yang merupakan pembatas antara Kelurahan Kedung Lumbu dan Kelurahan Sangkrah. Baik Kedung Lumbu maupun Sangkrah merupakan pemukiman padat penduduk. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume sampah rumah tangga. Sampah memang merupakan permasalahan yang cukup kompleks khususnya di daerah perkotaan. Hampir semua aktivitas sehari-hari masyarakat menghasilkan limbah baik padat maupun cair. Jenis-jenis sampah yang ada di sungai Tegal Konas ini beranekaragam baik itu sampah padat maupun limbah cair. Sampah-sampah padat berupa sampah plastik, dedaunan, botol, kaca, kertas, popok bayi dan lain sebagainya. Limbah cair juga merupakan sampah yang paling dominan dimana sering terjadi perubahan warna di sungai ini, tergantung warna limbah yang dibuang oleh pabrik yang kebanyakan merupakan industri sablon.

Pengelolaan limbah sangat diperlukan guna mengurangi pencemaran khususnya di sungai yang sering digunakan sebagai tempat buangan. Dalam masyarakat bantaran sungai Tegal Konas, pengelolaan limbah padat dikelola dengan cara dikumpulkan di kresek-kresek untuk kemudian diletakkan di tempat tertentu dan diambil oleh petugas/tukang sampah setiap paginya untuk kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di beberapa

titik di pinggir sungai, pemerintah setempat juga telah menyediakan tempat sampah umum untuk warganya. Tempat sampah ini digunakan untuk membuang sampah-sampah kecil ketika warga sedang berkumpul seperti di dekat Poskamling dan jembatan. Tempat sampah ini memang biasanya diletakkan di area yang digunakan sebagai ruang publik dimana warga sering berkumpul seperti di dekat poskamling dan tempat-tempat lain. Aturan tentang larangan membuang sampah ke sungai juga telah ada di beberapa titik berupa spanduk-spanduk yang tertempel di dinding dekat sungai. Namun faktanya, masih banyak sampah-sampah yang menumpuk di aliran sungai Tegal Konas.

Masih menumpuknya sampah di aliran sungai meskipun telah ada pengelolaan sampah bukanlah tanpa alasan. Sistem pengelolaan sampah dengan gerobak sampah belum menjangkau seluruh rumah. Petugas sampah tidak mengambil sampah dari satu rumah warga ke rumah warga yang lain, melainkan warga mengumpulkan sampah untuk kemudian dikumpulkan di ujung jalan atau titik-titik tertentu yang dilalui petugas. Warga yang tinggal di wilayah yang masuk di gang-gang kecil harus mengangkut sampah-sampah yang mereka kumpulkan di rumah menuju gang-gang utama yang dilalui gerobak. Karena alasan inilah beberapa warga malas untuk mengangkut sampah-sampah ini dan memilih untuk membuangnya ke sungai.

Selain limbah padat, limbah cair juga merupakan permasalahan yang turut ambil bagian dalam mencemari sungai. Limbah cair yang ada di aliran sungai Tegal Konas selain berasal dari kegiatan rumah tangga juga berasal dari pabrik. Limbah cair yang berasal dari rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari masyarakat bantaran seperti mandi dan mencuci. Limbah cair dari kamar mandi baik itu kamar mandi umum maupun kamar mandi pribadi kebanyakan memang langsung dialirkan ke sungai. Tak hanya limbah rumah tangga, limbah pabrik yang kebanyakan merupakan pabrik tekstil dan sablon juga

membuang limbah cairnya ke sungai. Memang menurut penuturan warga yang dulunya juga bekerja di pabrik sablon tersebut, limbah cair tersebut tidak berbahaya karena telah ada zat 'pembasah' yang mengurangi kadar kimia dalam limbah. Namun, warna limbah yang mencolok juga turut mempengaruhi perubahan warna sungai.

Namun, terlepas dari masih ada atau tidaknya obat pada limbah cair tersebut, limbah tetaplah suatu hal yang mencemari lingkungan. Perubahan warna sungai merupakan salah satu tanda bahwa air sungai telah tercemar. Sekitar tahun 2010, di Kelurahan Sangkrah dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah sebagai sarana sanitasi untuk warganya, namun tidak semua warga mengalirkan limbah rumah tangganya ke IPAL tersebut karena IPAL hanya bisa dijangkau oleh daerah yang lebih tinggi dari lokasi IPAL didirikan, sedangkan rumah-rumah yang letak wilayahnya lebih rendah dari IPAL tentunya tidak bisa mengalirkan limbahnya. Berbeda dengan wilayah bantaran yang termasuk daerah kelurahan Kedung Lumbu. Minimnya lahan di daerah ini menjadi salah satu faktor tidak adanya wilayah yang bisa digunakan untuk sanitasi sebagai sarana pengelolaan limbah cair warga sekitar, sehingga kamar mandi baik umum maupun pribadi langsung mengalirkan limbahnya ke sungai.

Pengelolaan limbah cair di sebagian besar rumah warga adalah dengan dialirkan secara langsung ke sungai. Hampir semua informan yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa pengelolaan limbah cair di rumahnya adalah dialirkan langsung ke sungai, beberapa diantaranya menggunakan kamar mandi umum. Hanya beberapa rumah yang bisa menjangkau IPAL yang bisa mengelola limbah cairnya untuk dialirkan ke IPAL. Pengelolaan sampah di kedua kelurahan adalah sama yaitu dengan cara dikumpulkan di setiap rumah masing-masing untuk kemudian diambil oleh petugas. Semua informan yang peneliti wawancarai mengenai pengelolaan sampah padat menyatakan hal serupa. Masyarakat hanya perlu membayar petugas yang mengambil sampah setiap bulan di masing-masing

RT/RW. Meskipun demikian, beberapa masyarakat menyatakan ada warga yang malas untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut ke titik-titik tertentu yang dilalui petugas dan memilih untuk membuang sampah ke sungai Mengenai pembayaran uang sampah, antara satu kepala keluarga berbeda dengan kepala keluarga yang lain.

Kondisi yang demikian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sungai dimana pengetahuan yang terbentuk adalah sungai sebagai aliran air karena unsur-unsur sungai memang tidak bisa dimanfaatkan. Selain itu terbentuk pula pengetahuan tentang sungai sebagai aliran limbah karena kondisi sungai menunjukkan terdapat banyak sampah yang berada di sepanjang aliran sungai. Hampir kebanyakan warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah memanfaatkan sungai beserta segala unsurnya selain untuk mengalirkan air dan limbah karena kondisi sungai yang tidak memungkinkan untuk memanfaatkan sungai. Pengalaman masyarakat yang membentuk pengetahuan tentang sungai juga didasari oleh beberapa hal salah satunya adalah jenis pekerjaan. Seorang warga, yang memproduksi makanan dan menghasilkan limbah berupa *bledug* (serbuk) gandum yang apabila dibuang ditempat sampah menimbulkan bau yang tidak sedap. Dengan alasan tersebut, lebih memilih mengalirkan limbah hasil produksinya ke sungai. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis pekerjaan membentuk sebuah pengalaman dimana jenis pekerjaan tertentu menghasilkan limbah yang mengganggu apabila tidak segera dibuang. Oleh karena itu, sungai yang memang telah kotor dan tidak bisa dimanfaatkan dijadikan sebagai suatu alternatif untuk mengalirkan limbah-limbah yang dianggap mengganggu.

Banyak keterbatasan akan informasi tentang sungai bagi warga bantaran sungai hanya berfungsi sebagai aliran air dan aliran limbah sehingga pemanfaatan sungai dengan segala unsurnya tidak pernah dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh

masyarakat berupa pemanfaatan dari segi tata ruang fisik sungai. pemanfaatan ini berupa penggunaan berbagai infrastruktur sungai yang bisa dimanfaatkan untuk membantu aktivitasnya. Salah satu pemanfaatan dari segi tata ruang fisik sungai adalah pemanfaatan pagar pembatas yang digunakan untuk peengaman. Selain itu, penggunaan jembatan sebagai ruang publik, tempat menjemur pakaian, mencuci juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan aspek fisik sungai. Ruang kosong di atas permukaan sungai juga dimanfaatkan oleh warga untuk mendirikan bangunan baik bangunan menjorok ke sungai maupun bangunan yang membentang diatas sungai yang digunakan sebagai tambahan ruang hunian ataupun sebagai tempat hunian. Bangunan-bangunan yang menjorok ke sungai ini biasanya digunakan untuk parkir kendaraan bermotor dan mencuci piring karena lahan di dalam rumah maupun area sekitar rumah tidak memungkinkan untuk dibangun area parkir.

Selain itu, bangunan yang berdiri diatas sungai biasanya digunakan sebagai rumah hunian atau tambahan ruang misalnya untuk dapur dan tempat parkir. Selain dimanfaatkan untuk hunian serta tambahan ruang, bangunan-bangunan diatas sungai ini juga dimanfaatkan warga untuk menutup sungai agar mengurangi aroma yang kurang sedap serta menutup pandangan dari sampah yang menumpuk di aliran sungai. Kenyataan di lapangan juga menunjukkan hal serupa dimana selain air, limbah pabrik serta sampah mengalir di sungai. Namun, volume air yang sedikit menyebabkan sampah padat tidak bisa mengalir sehinga menimbulkan kesan kotornya sungai atau yang bisa disebut dengan pencemaran. Kondisi sungai yang demikian tentunya akan memberikan dampak bagi masyarakat.

Banjir

Sungai Tegal Konas merupakan daerah rawan banjir dimana wilayah ini hampir di setiap musim penghujan selalu dilanda banjir. banjir terakhir yang paling parah terjadi pada tahun 2007 dimana banjir mencapai perut orang dewasa. Banjir ini mengakibatkan warga yang

tinggal di wilayah bantaran harus mengungsi ke lokasi yang tidak terkena luapan air. Pada waktu itu, air banjir baru bisa surut setelah satu minggu. Sebenarnya, setelah dibangun pagar pembatas pada sekitar tahun 2000, dampak banjir yang dirasakan warga sangat berkurang. Debit air yang masuk ke rumah warga hanya beberapa sentimeter dan bisa surut dalam satu hari. Banjir besar yang dialami pada tahun 2007 tersebut selain karena curah hujan yang tingga juga disebabkan karena jebolnya tanggul yang mengakibatkan air meluap.

Sungai Tegal Konas memang sudah cukup tercemar sejak lama. Sampah-sampah yang menghuni alirannya telah sedemikian banyaknya. Berbagai dampak tentunya telah dirasakan warga seperti banjir yang merupakan langganan bagi daerah ini. Namun sayangnya, beberapa warga belum menyadari apabila menumpuknya sampah di sungai merupakan salah satu penyebab banjir yang sering melanda wilayah mereka. Mereka lebih menganggap bahwa banjir terjadi akibat curah hujan yang terlalu tinggi serta faktor lain seperti jebolnya tanggul dan kondisi daerah yang rendah. Hal-hal tersebut memang juga merupakan penyebab banjir, namun mereka kurang menyadari akibat sampah terhadap adanya bencana tersebut. Meskipun demikan, di sisi lain beberapa warga memiliki pendapat yang sebaliknya dimana mereka telah menyadari bahwa menumpuknya sampah merupakan salah satu penyebab dangkalnya sungai yang pada akhirnya menyebabkan banjir.

Banjir merupakan bencana yang kerap kali melanda saat musim penghujan datang. Berita tentang banjir, khususnya diperkotaan sering mengisi media masa baik cetak maupun elektronik. Banjir disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya curah hujan yang tinggi, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Pengelolaan lingkungan juga berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Pertambahan jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, berdampak pada peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal dan

daya dukung perkotaan. Meluasnya wilayah pemukiman memiliki pengaruh langsung terhadap berkurangnya daerah resapan air, karena hampir seluruh permukaan tanah berganti dengan aspal atau beton. Kondisi tersebut diperparah dengan penataan bangunan dan wilayah yang kurang memperhatikan sistem pembungan air. Yang menjadi permasalahan penting adalah perilaku manusia. Bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia di daerah resapan air maupun daerah sekitar resapan air turut ambil bagian sebagai faktor penyebab banjir. Selain itu, perilaku tidak peduli lingkungan seperti membuang sampah di sungai juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banjir.

Selain banjir, berbagai macam bibit penyakit dapat timbul akibat tercemarnya sungai, seperti penyakit kulit dan demam berdarah. Sungai yang kotor bisa menjadi sarang nyamuk yang menjadi bibit penyakit. Terdapat dua pandangan masyarakat mengenai timbulnya penyakit ini. Sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa tercemarnya sungai merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, penyakit kulit dan lain sebagainya. Selain kedua dampak diatas, banyak dampak yang telah dirasakan warga akibat menumpuknya sampah di sepanjang aliran sungai baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang dirasakan warga secara langsung diantaranya adalah aroma serta pandangan yang mengganggu.

Kondisi lingkungan secara kesuluruhan yang mempengaruhi berupa kondisi sungai. Kondisi sungai Tegal Konas menurut penuturan warga memang telah tercemar semenjak mereka menempati wilayah bantaran. Kondisi yang demikian memberikan pengetahuan masyarakat terhadap sungai dimana pengetahuan yang terbentuk adalah sungai sebagai aliran limbah karena kondisi sungai menunjukkan terdapat banyak sampah yang berada di sepanjang aliran sungai. Kondisi sungai juga turut berpengaruh dalam membentuk sikap masyarakat. Kondisi sungai membuat

masyarakat tidak bisa memanfaatkan air di sungai sebagai sumber air bersih sehingga masyarakat menggunakan berbagai sarana dan prasarana lain yang bisa digunakan untuk mengakses sumber air bersih. Ketersediaan sumber air bersih ini menimbulkan posisi sungai dianggap tak lagi mengganggu apabila rusak atau tercemar. Banyaknya sampah yang menghuni sepanjang aliran sungai juga ditanggapi berbeda oleh masyarakat. Beberapa orang menganggap tercemarnya sungai karena sampah bukanlah hal yang akan berdampak besar seperti timbulnya penyakit atau terjadinya banjir. Namun, bagi beberapa orang yang lain, sampah merupakan hal yang menyebabkan dangkalnya sungai sehingga menyebabkan banjir serta bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa warga juga mengutarakan bahwa mereka merasa terganggu dengan kondisi sungai terutama masalah bau yang terkadang menyengat serta pandangan yang terganggu oleh tercemarnya sungai.

Kebiasaan dan cara pandang pada akhirnya membentuk perilaku warga yang dapat dilihat dari tindakan memelihara sungai. Pemahaman masyarakat tentang sungai sebagai aliran air yang juga membantu mengalirkan limbah masih sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memelihara sungai. Masyarakat justru merasa terbantu dengan aliran limbah pabrik serta air di musim hujan yang bisa meningkatkan volume air sehingga membantu menghanyutkan sampah. Terlihat dari perilaku membersihkan sungai diluar kegiatan kerja bakti masal yang dilakukan ketika kotornya sungai sudah sangat mengganggu. Ketika sampah telah menumpuk dan dampaknya terasa mengganggu, warga menyatakan sampah-sampah tersebut dibersihkan dengan dialirkan ke sungai. Sebuah kondisi yang memprihatinkan. Minimnya kesadaran dari warga masing-masing kelurahan untuk menjaga sungai mengakibatkan warga harus menunggu perintah dari pihak Kelurahan untuk mengadakan kerja bakti massal untuk merawat sungai yang melibatkan kedua Kelurahan. Dihari-hari biasa, kerja bakti yang dilakukan oleh warga baru sebatas kerja bakti di lingkungan sekitar

sungai. Kerja bakti untuk membersihkan aliran sungai sangat jarang dilakukan. Untuk kegiatan membersihkan sungai ini, warga justru memilih untuk memberikan upah kepada orang yang dianggap oleh masyarakat sekitar "sedikit kurang" pemikirannya yang terkadang secara sukarela beliau membersihkan sungai.

Meskipun demikian, wilayah sungai yang dibersihkan hanya sebatas beberapa meter dari pintu air, tidak di sepanjang aliran sungai karena rumah beliau berada di area sekitar pintu air. Sampah yang ada di aliran sungai pun tidak diambil untuk dibuang tetapi beliau mengalirkan sampah-sampah yang tersangkut serta. Menurut pihak Kelurahan, kebanyakan sampah yang menghuni di sepanjang aliran Tegal Konas berasal dari atas yaitu dari gorong-gorong sebagai rangkaian saluran air yang saling terhubung. Sebab sungai Tegal Konas yang menjadi muara dari beberapa gorong-gorong diantaranya dari alun-alun serta pasar Sangkrah. Namun apapun kondisinya, hal ini tidak boleh menjadikan penyebab dari kemalasan warga untuk mengadakan merawat sungai karena warga merasa setelah dibersihkan mereka juga akan mendapat "kiriman" sampah dari atas. Kesadaran tentang sungai juga diperlukan untuk membangun komitmen warga bahwa sungai adalah milik bersama bukan milik satu atau dua orang saja yang keberadaannya perlu dijaga. Mengingat bahwa sungai Tegal Konas berada diantara dua Kelurahan yaitu Kedung Lumbu dan Sangkrah maka diperlukan kemauan bersama untuk menanamkan bahwa sungai bukan hanya milik salah satu Kelurahan saja namun milik bersama yang harus dijaga bersama-sama, bukan oleh salah satu pihak saja sehingga warga dari kedua Kelurahan secara sadar bisa bekerja sama untuk bersama-sama memelihara sungai.

BAB III
KALI GAJAH WONG YOGYAKARTA

Kali Gajah Wong dan Forsidas

Kota Yogyakarta tumbuh dan berkembang bersama dengan pergerakan kampung-kota di dalamnya. Pergerakan kampung-kota tersebut tentunya beriringan dinamis dengan berbagai situasi sosial bahkan kultural yang menyertai kehidupan warga di dalamnya. Kampung-kampung kota yang ada di Yogyakarta teridentifikasi menjadi dua bagian, yakni kampung kota lama (tradisional) dan kampung kota baru yang muncul akibat luapan urbanisasi di kota Yogyakarta. Berdasar sejarah awal pembentukan kota Yogyakarta, maka kota berkembang dari kraton dan rumah-rumah pangeran (*ndalem*) di sekitarnya yang membentuk perkampungan menurut organisasi sosial, struktur kelas, dan gaya hidupnya masing-masing (Khudori, 2002: 61). Yogyakarta tumbuh menjadi sebuah kota administratif atas pengaruh pemerintah kolonial. Penduduk Belanda membentuk kawasan perumahan disekitar pusat kekuatan militer mereka, dengan bukti masih terdapat perkampungan di sekitar Benteng Vredeburg. Sedangkan pedagang Tionghoa membangun rumah-rumah toko di sepanjang jalan menuju ke Alun-Alun (Malioboro dan Gondomanan). Selanjutnya, perkembangan administrasi, komunikasi, transportasi, dan pendidikan modern menyebabkan kawasan-kawasan baru mulai bermunculan di tengah kota. Kawasan-kawasan baru tersebut kemudian berkembang sebagai tempat pemukiman penduduk, pemukiman ini disebut kampung-kota.

Seiring berjalannya waktu, di tengah Kota Yogyakarta mulai terdapat dua jenis perkampungan, yaitu kampung-kampung lama tradisional yang umumnya berada di jalan-jalan besar di tengah

kota (kampung-kota di sekitar keraton maupun kampung-kampung bekas kawasan pemukiman Belanda), dan kampung yang tumbuh bersamaan proses urbanisasi yang umumnya berada di sekitar bantaran sungai yang melintasi tengah kota. Penduduk yang tergolong berpenghasilan menengah ke atas berusaha bermukim di kawasan yang menjauhi keramaian, sedangkan orang-orang yang tergolong berpenghasilan menengah ke bawah cenderung bermukim di sekitar tempat keramaian, khususnya di pinggir-pinggir sungai yang melintasi kota. Di Yogyakarta sendiri terdapat tiga sungai besar yang melintasi Yogyakarta, di antaranya yaitu Code, Winongo, dan Gajahwong (Sarwindaningrum, 2009: 7). Pemukiman berupa kampung-kampung di bantaran sungai Yogyakarta di atas kemudian mulai secara konstan hidup dan tumbuh dengan segala aktivitas sosialnya. Berbagai aktivitas dan dinamika sosio-kultural selanjutnya mengiringi pergerakan kehidupan masyarakat yang ada di kampung-kampung tersebut. Pergerakan kampung-kampung tersebut juga mengalami fluktuasi hingga berbagai masalah yang muncul menyertainya. Permasalahan utama yang nampak adalah masalah kebersihan lingkungan hingga legalitas hunian yang sering menjadi perdebatan di ranah hukum. Akibatnya, kawasan semacam ini sering kali mendapat stigma atau pandangan miring dari masyarakat sebagai kawasan kumuh, marjinal, dan jika dibiarkan tumbuh maka dapat mungkin mengarah pada stigma kawasan subaltern di kawasan semacam ini.

Salah satu kawasan bantaran sungai di Yogyakarta yang berkembang sebagai pemukiman padat penduduk dengan segala heterogenitasnya adalah pemukiman di wilayah sepanjang bantaran Code. Kawasan ini terbilang padat penduduknya dengan penataan hunian yang menyesuaikan topografi lingkungan sekitar. Meskipun kawasan ini pernah diberdayakan oleh Romo Mangun pada awal-awal perkembangannya, kawasan ini hingga sekarang masih mengalami berbagai situasi sosial yang sangat menyudutkan warganya. Di satu sisi, para warga masyarakat di kawasan ini berupaya untuk

selalu hidup selaras dengan pergerakan kota Yogyakarta dengan mendukung dan mematuhi segala aturan yang berlaku, namun di sisi lain kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat menjadikan kawasan ini masih sering menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang isu-isu sosial lingkungan yang berkembang di tengah Yogyakarta.

Melihat situasi yang dialaminya tersebut, maka para masyarakat di berbagai kampung-kota ada di sepanjang bantaran Code mulai menaruh perhatian serius disertai dengan kesadaran untuk mulai bergerak menata diri dengan berbagai tindakan yang memungkinkan dapat sebagai pemicu gerakan sosial masyarakat berbasis komunitas kampung kota di wilayah Code tersebut. Sementara untuk di wilayah pemukiman kampung- kota bantaran Code, para warga masyarakat dari berbagai kampung-kota kawasan bantaran sungai sendiri tergerak dan membangun komunitas kolektif atas dasar kesadaran bersama untuk dapat hidup selaras dengan alam dan juga dengan dinamika sosial di tengah kota Yogyakarta. Air mempunyai ruang untuk membentuk peradaban kota Yogyakarta, dilihat berdasar besarnya, terdapat 3 sungai yang mengaliri kota. Sungai tersebut adalah sungai Gajah Wong yang berada diujung timur sekaligus menjadi sumber kehidupan di kota Mataram Awal, sungai Code yang membelah kota Yogyakarta, dan sungai Winongo di sisi barat Yogyakarta.

Aliran sungai Gajah Wong di kota Yogyakarta melawati setidaknya 3 Kecamatan, 7 Kelurahan, 19 Rukun Warga dan 30 Rukun Tetangga. Area tersebut terhitung dari RT 85, RW 20 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman hingga RT 44, RW 08 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Pengamatan dibeberapa titik sungai Gajah Wong oleh Forsidas sesuai dengan pembagian wilayahnya berdasarkan karakteristik fisik wilayah, sosial, budaya dan kemudahan koordinasi antara masyarakat sisi timur dan barat sungai, dalam hal ini yang menjadi pembatas wilayah secara

fisik adalah jembatan dan jalan. Pembagian wilayah koordinasinya terdiri tiga wilayah yang terbagi menjadi enam segmen yaitu : Wilayah Utara, yang memiliki batas dari rel kereta api di kelurahan Gondokusuman sampai dengan jembatan Gembira Loka yang terdiri dari satu RW di Kelurahan Baciro yakni RW 20 RT 85. Serta empat RT di 4 wilayah RW dari Kelurahan Muja-Muju yakni RT 29 di RW 5, RT 52 di RW 6, RT 53 di RW 8 dan RT 54 di RW 9. Wilayah Utara ini dibagi lagi ke dalam dua segmen, yaitu: Segmen 1 memiliki batas dari rel kereta api Gendeng sampai Jembatan Balerejo. Dan Segmen 2 memiliki batas dari Jembatan Balerejo sampai Jembatan Gembiroloka.

Sedangkan Wilayah Tengah; yang memiliki batas dari Jembatan Gembira Loka, yang terdiri dari 5 RW. Yakni satu dari kelurahan Pandeyan (RT 30, 45, 47 dari RW 08), satu RW dari Kelurahan Prenggan (RT 01, 02, 05 dan 06 dari RW 01), serta tiga RW dari kelurahan Warung Boto yakni RT 30 di RW 07, RT 34 di RW 08, serta RT 38 di RW 09.Wilayah Tengah dibagi ke dalam dua segmen; Segmen 3 memiliki batas dari Jembatan Gembiraloka sampai Jembatan Logathuk. Dan Segmen 4 memiliki batas dari Jembatan Logathuk sampai Jembatan Winong. Dan Wilayah Selatan; yang memiliki batas dari Jembatan Winong sampai dengan Ringroad selatan yang terdiri dari sembilan RW dari empat Kelurahan. Yakni Kelurahan Rejowinangun (RT 25 RW 08), Kelurahan Prenggan yang terdiri dari tiga RT di dua RW (RT 14 dan 15 dari RW 13 serta RT 21 dari RW 05), kemudian dari kelurahan Pandeyan yang terdiri dari empat RT di tiga RW (RT 51 di RW 13, RT 40 di RW 10, RT 43 dan 44 di RW 11). Dan yang terakhir di Kelurahan Giwangan yang terdiri dari tiga RW yakni RW 06 (RT 17 dan 18), RW 08 (RT 22,23 dan 24) serta RW 09 (RT 25, 26 dan 44). Wilayah Selatan dibagi ke dalam 2 segmen; Segmen 5 memiliki batas dari Jembatan Winong sampai Jembatan Tegal Gendu dan Segmen 6 memiliki batas dari Jembatan Tegal Gendu sampai Jembatan Ring Road Selatan.

Dimana setiap titik Gajah Wong, gagasan komunitas untuk melakukan tata kelola atas sungai yang melintang kemudian terorganisir lewat keberadaan Forsidas.

Forsidas Gajah Wong merupakan singkatan dari Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gajah Wong, resmi dibentuk tanggal 25 April 2012 melalui pengukuhan Walikota Yogyakarta. Kelompok ini merupakan hasil dari perkumpulan individu-individu yang memiliki konsentrasi di bidang lingkungan, anggotanya rata-rata sebelumnya juga bergabung dengan komunitas lain yang notabene bergerak di bidang ekologi. Ada juga sebagian yang belum bergabung dengan komunitas tapi kemudian diajak atau diundang untuk ikut serta menjadi bagian dari komunitasForsidas. Diprakarsai oleh Agus Susanto yang sejak lama telah mengharapkan adanya bentuk wadah bagi masyarakat bantaran sungai Gajah Wong serta mengupayakan adanya suatu komunikasi massal bagi masyarakat dari hulu sungai Gajah Wong sampai dengan hilir, akhirnya niat baik tersebut ditanggapi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang kemudian memfasilitasi adanya pertemuan tersebut.

Di awal, antusiasme warga yang menjadi perwakilan dari setiap wilayah rukun warga tersebut masih cukup tinggi. Proses pembentukan Forsidas Gajah Wong kemudian diresmikan oleh Walikota Yogyakarta, terhitung kurang lebih delapan bulan sejak diselenggarakannya rapat perdana. Hal ini disebabkan oleh adanya riset dan rapat berulang kali demi terbentuknya suatu tim di dalam komunitas yang solid dan bersungguh-sungguh dalam melakukan aksi dimasa mendatang sehingga terseleksilah para perwakilan warga tersebut sebagai anggota resmi Forsidas.

Forsidas bergerak dalam upaya penyelamatan sungai dengan mengutamakan sasaran kepada kualitas masyarakat di bantaran sungai itu sendiri, dalam hal ini adalah sumber daya warga lokal yang ingin dibenahi terlebih dahulu. Baik dari segi mindset, perilaku ataupun keterlibatannya. Forsidas pada awalnya lebih mengutamakan pembenahan sumber daya manusianya atas dasar alasan bahwa infrastruktur yang baik hanya akan dapat

dibangun oleh SDM yang baik. Jika yang dinomorsatukan adalah infrastrukturnya, maka fisik bangunan tersebut tidak akan bertahan lama jika SDM di sekelilingnya tidak punya kesadaran untuk merawat dan melestarikan. Namun dalam keberjalanannya, justru program yang bersifat fisik lah yang mampu menarik minat warga untuk turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Forsidas ataupun intervensi dari pihak yang lain.

Forsidas merupakan forum yang dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat bantaran sungai Gajah Wong, anggota diposisikan sebagai motor penggerak warga masyarakat lainnya dalam upaya penyelamatan dan penataan daerah aliran sungai tersebut. Dalam keberjalanannya Forsidas bekerjasama dengan anggota masyarakat lainnya melakukan pengamatan intensif pada sungai Gajah Wong. Dengan segala perencanaan dan pengelolaan, melakukan aksi bersama masyarakat baik dari wilayah bantaran ataupun di luar masyarakat tersebut dalam upaya penyelamatan, pelestarian dan penataan daerah aliran sungai dengan berbagai macam hambatan dan faktor lainnya. Namun, hingga saat ini Forsidas tetap bergerak melakukan aksi dengan pedoman bahwa penyelamatan daerah aliran sungai Gajah Wong merupakan urgensi yang harus diperhatikan oleh masyarakat bantaran sungai Gajah Wong.

Forsidas Gajah Wong berdiri dengan memiliki visi dan misi sebagai “Menjadikan ekosistem sungai Gajah Wong yang bersih, indah, aman dan nyaman dalam satu kesatuan manajemen”. Dengan misi memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati sungai dan lingkungannya menjadi bersih, indah, aman dan nyaman. Serta menjalin komunikasi secara aktif antar masyarakat atau stake holder di sepanjang sungai Gajah Wong dalam satu kesatuan manajemen. Dengan tujuan, melaksanakan konservasi sungai (menjaga, melindungi, memelihara kualitas dan kuantitas air sungai, membudayakan rasa kepedulian masyarakat kawasan sungai dalam upaya menciptakan lingkungan sungai yang bersih, indah, aman

dan nyaman, menjadikan kawasan sungai sebagai laboratorium alam dan wahana pendidikan, peningkatan wisata kawasan sungai di wilayah perkotaan, memberdayakan masyarakat di kawasan sungai dan revitalisasi budayaatau kearifan lokal di kawasan sungai.

Mengingat Forsidas Gajah Wong merupakan komunitas yang terbilang masih cukup muda dan belum mampu melaksanakan semua programnya secara swadaya baik moriil maupun materiil, maka diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk membantu menyediakan pendanaan dan dukungan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Saat ini Forsidas bekerja sama dengan beberapa lembaga–lembaga yang bersedia membantu dalam hal keuangan, perencanaan dan dukungan lainnya. Lembaga tersebut yaitu, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dan Provinsi DIY, Badan Perencana Pembangunan Daerah, BBWS Serayu Opak, Wahana Lingkungan Hidup, Universitas di Yogyakarta, serta komunitas lainnya yang berkomitmen pada isu lingkungan.

Forsidas dan Upaya Konservasi

Sungai di kota-kota besar terutama di kota Yogyakarta telah mengalami degradasi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Tingkat pertambahan penduduk begitu pesat, sebaliknya luas kawasan di sekitar sungai relatif tetap tidak mengalami perubahan, ditambah lagi dengan faktor kemiskinan penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya perubahan penggunaan lahan yang pada umumnya kurang memperhatikan ekosistem sungai. Pertumbuhan penduduk di Yogyakarta berdampak kepada aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok maupun sekunder yang juga meningkat. Aktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut akan juga meningkat baik dalam dimensi-dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Akibatnya terjadi eksploitasi alam yang berlebihan, perubahan tata guna lahan yang tak terkendali dan menurunnya daya dukung lingkungan

dari aktifitas tersebut akan menimbulkan kecenderungan peningkatan bencana baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hubungan penduduk dengan air adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat mengakibatkan pengurangan ketersedian air. Pemanfaatan potensi sungai baik sumber daya lahan maupun sumber daya air yangtidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi akan mengakibatkan degradasi di hulu, tengah dan hilir sungai.

Sungai Gajah Wong mengalami degradasi, terkait dengan keberadaan lingkungan masyarakat yang penduduknya padat dan berkembang pesat. Aktivitas masyarakat di tepi bantaran sungai pada kota-kota besar, dalam memanfaatkan sungai lebih difokuskan untukmenunjang perekonomian dan industri, namun dalam hal pengendalian yang mengarah padausaha untuk pelestarian sungai masih kurang. Adanya limbah rumah tangga dan limbah industri yang tidak terolah dengan baik dan langsung mengalir ke aliran sungai pun menjadi permasalahan yang sangat sering kita jumpai. Perilaku masyarakat dengan membuang sampah di sungai, menjadi sebuah kebiasaan yang mencerminkan sikap tidak peduli pada akibat yang ditimbulkan, yaitu kerusakan dan pencemaran pada ekosistem. Kondisi sungai Gajah Wong yang semakin kritis tidak serta merta membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tergerak untuk aksi lingkungan. Hal ini menjadi masalah tersendiri di kalangan masyarakat bantaran sungai Gajah Wong. Pola pikir masyarakat dianggap relatif masih tak acuh terhadap kondisi lingkungan. Sebelum tahun 2000, kondisi sungai di Kota Yogyakarta khususnya Gajah Wong dinilai masih belum tercemar seperti saat ini, jumlah pemukiman di bantaran sungai pun belum sebanyak di tahun-tahun setelah tahun 2000-an. Perubahan kondisi sungai yang tidak diimbangi dengan perubahan pola pikir masyarakat diperparah dengan belum terdapatnya organisasi atau komunitas yang mewadahi atau mampu mengorganisir warga bantaran sungai untuk melakukan suatu aksi kolektif.

Aksi-aksi di sekitaran sungai hanya sebatas kegiatan swadaya oleh masyarakat dalam bentuk kerja bakti di masing-masing wilayah rukun tetangga atau rukun warga, sementara kegiatan yang terbilang massal dan memerlukan pendanaan besar biasanya menunggu momentum tertentu dan hanya mengaharapkan bantuan dari Pemerintah Kota. Namun kebanyakan masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai prosedur pengimplementasian program-program semacam itu. Sehingga biasanya setiap warga bantaran yang memiliki ide mengenai suatu kegiatan selalu terkendala di bidang pendanaan dan birokrasi yang dirasa cukup rumit. Namun di situasi yang sama, dikalangan masyarakat tertentu diarea bantaran sungai Gajah Wong sudah memiliki keinginan untuk melakukan suatu gerakan yang fungsinya untuk melestarikan ekosistem sungai supaya asri kembali dan mampu menghadapi musibah-musibah seperti banjir dan longsor.

Mengacu pada kondisi di atas maka beberapa warga yang memiliki keinginan yang sama kemudian melakukan penyusunan strategi agar mampu membentuk suatu organisasi yang fungsinya untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengelola sungai. Diawali dengan inisiatif dari Agus Susanto yang berupaya keras menjalin komunikasi dari masyarakat hulu di daerah Sleman sampai dengan masyarakat di hilir sungai tepatnya di Kabupaten Bantul, kegiatan pembentukan organisasi yang rencananya difungsikan sebagai wadah penyusunan rencana-rencana revitalisasi sungai Gajah Wong secara kolektif yang menampung aspirasi dari seluruh warga bantaran sungai.

Akhirnya di tahun 2011 terselenggara rapat perdana yang difasilitasi oleh Bappeda dan dihadiri oleh perwakilan setiap Kelurahan yang masuk dalam wilayah bantaran sungai Gajah Wong. Wilayah bantaran tersebut meliputi tiga kecamatan yakni Kecamatan Gondokusuman, Umbulharjo dan Kotagede. Dari masing-masing kecamatan tersebut tidak semua kelurahan masuk ke dalam area

bantaran sungai Gajah Wong. Undangan dari Bappeda ditujukan ke Kelurahan lalu pihak kelurahan menginformasikan ke setiap RW untuk mengirimkan perwakilan dalam menghadiri rapat tersebut. Rapat perdana guna membahas pembentukan komunitas atau forum tersebut awalnya dihadiri lebih dari 50 orang perwakilan warga bantaran. Namun kemudian rapat perdana tersebut tidak langsung menghasilkan keputusan perihal pembentukan komunitas tersebut karena dilatarbelakangi masih minimnya riset yang dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh komunitas ini serta program apa yang sekiranya sangat penting. Sehingga forum rapat pada saat itu memutuskan untuk melanjutkan agenda rapat di waktu selanjutnya setelah apa yang diarahkan oleh Bappeda dilaksanakan.

Persiapan yang dilakukan sampai dengan akhirnya rapat terakhir dilaksanakan oleh perkumpulan warga bantaran tersebut membutuhkan waktu kurang lebih delapan bulan lamanya. Tenggang waktu ini juga yang akhirnya mengakibatkan kendurnya semangat warga yang pada rapat perdana telah hadir untuk tetap solid dan semangat di dalam prroses pembentukan forum tersebut. Namun karena dirasa segala persiapan telah cukup dan pihak Pemerintah Kota telah menyarankan untuk segera meresmikan forum ini, maka akhirnya pada tanggal 25 April 2012 forum ini terbentuk dengan peresmian yang dilakukan oleh Walikota Yogyakarta. Forum ini kemudian dinamai Forsidas Gajah Wong yang merupakan kependekan dari Forum Komunikasi daerah Aliran Sungai Gajah Wong yang kemudian hingga saat ini dijadikan komunitas yang memayungi segala bentuk urusan yang menyangkut DAS Gajah Wong. Forum ini kemudian membentuk struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Zona I, II, III serta koordinator dari setiap titik atau segmen yang kemudian dibagi menjadi 6 titik.

Dalam keberjalanannya Forsidas Gajah Wong bergerak dalam perencanaan revitalisasi sungai bersinergi dengan program pemerintah

yang berupa perencanaan, pemanfaatan, perlindungan daerah aliran sungai dan pengendalian kegiatan di area fisik sungai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika, dan pelestarian budaya lokal untuk memberikan citra kota Yogyakarta pada umumnya dan wilayah bantaran sungai Gajah Wong pada umumnya, sebagai kota sehat dari perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, Forsidas Gajah Wong bekerja sama pula dengan pemerintah, BLH, Akademisi, LSM, serta komunitas-komunitas lainnya. Sementara pendanaan dari setiap kegiatan masih bersumber dari swadaya anggota, pemerintah, BLH serta donatur.

Upaya revitalisasi yang dilakukan Forsidas Gajah Wong yang diharapkan adalah kondisi sungai dan lingkungan bersih (bebas pencemaran) dan air sungai jernih sehingga dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata (wisata air, wisata kuliner, wisata lingkungan dan lainnya), ruang terbuka hijau sempadan sungai, ruang publik masyarakat sungai yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Dalam keberjalannya pasca resmi dibentuk pada tangga 25 April 2015 tersebut, Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gajah Wong membagi pengamatan ke 6 (enam) titik sepanjang Sungai Gajah Wong yang berada di kota Yogyakarta,sehingga dapat dikelompokkan permasalahan yang ada dimasyarakat tepi sungai Gajah Wong, dimana permasalahan yang muncul pada masyarakat tepi Sungai Gajah Wong terkait dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan sub permasalahan yang terdapat di sungai Gajah Wong adalah permasalahan yang terdapat di masyarakat dapat dikelompokan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan image (citra).

Permasalahan tersebut kemudian digali lebih dalam lagi melalu riset lanjutan dan pengadaan focus group discussion dengan masyarakat di setiap titik di sepanjang aliran sungai Gajah Wong untuk menemui permasalahan yang paling *urgent* untuk segera ditangani. Permasalahan tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun berdasarkan urgensinya, dengan mempertimbangkan setiap aspek

yang ada di dalam masyarakat, dibentuklah klasifikasi permasalahan tersebut ke dalam empat permasalahan inti yakni antara lain isu mengenai revitalisasi kondisi fisik dasar, kependudukan, sosial budaya, dan sarana prasarana lingkungan.

Kualitas Fisik Daerah Aliran Sungai

Problematika seputar kondisi Sungai Gajah Wong ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan manusia berupa; hunian, industri, dan ekonomi. Interaksi antara manusia dan sungai cenderung memberikan dampak pencemaran dan perusakan, disebabkan dampak dari pembangunan yang tidak merata kepada masyarakat di tepi Sungai Gajah Wong terutama peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sungai yang baik dengan pertimbangan terhadap kelestarian lingkungan namun tetap dapat meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sangat berbeda dengan zaman dahulu kondisi sungai dan airnya masih jernih banyak terdapat kehidupan seperti; ikan, kadal, dan hutan beringin dan bambu yang rimbun di bantaran Sungai Gajah Wong.

Adanya industri di area bantaran sungai Gajah Wong hanya sebagian kecil alasan terjadinya penurunan kualitas fisik daerah aliran sungai. Seperti yang dilansir oleh BLH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sumber pencemaran lingkungan dapat berasal dari berbagai macam sektor kehidupan masyarakat, dalam kasus pencemaran sungai Gajah Wong, selain berasal dari limbah rumah tangga, faktor pencemaran lain berasal dari sektor pariwisata, rumah sakit, tempat pengisian bahan bakar atau SPBU, laboraturium kesehatan dan lingkungan, *laundry*, hotel, restaurant, dan lain-lain. Sumber pencemaran tersebut sebagian besar merupakan sumber pencemaran akut untuk daerah aliran sungai. Berdasarkan data BLH Kota Yogyakarta dilakukan pengamatan pada DAS Gajah Wong dengan hasil pengamatan sebagai berikut.

Kualitas Air Sungai Gajah Wong

Lokasi Pengamatan : Jembatan Santo Thomas Kualitas Air 2015		
Parameter	**Nilai**	**Baku Mutu**
BOD (*mg/L*)	21	3
COD (*mg/L*)	43	25
DO (*mg/L*)	2,45	5*
Residu terlarut (mg/L)	224	1000
Residu tersuspensi (*mg/L*)	-	50
pH	6,52	6-8,5
Kualitas kelas Air : II		

BLH Kota Yogyakarta, 2015

Menurut tabel di atas pada titik ini menunjukan secara parameter DO, residu terlarut, residu tersuspensi dan pH menunjukan kualitas air berada pada kelas II (baik). Akan tetapi karena besarnya kadar COD dan BOD yang menunjukkan cemaran bahan organik yang cukup tinggi. Sebuah kondisi yang kemudian direspon dengan beragam upaya Forsidas untuk melakukan konservasi atas sungai Gajah Wong.

Penduduk di Bantaran Sungai

Banyaknya pemukiman penduduk yang dibangun di kawasan bantaran sungai Gajah Wong. Sebagian besar masyarakat yang menempati kawasan ini memiliki tingkat ekonomi rendah. Penduduk memanfaatkan bantaran sungai sebagai tempat hunian dan beraktivitas. Kepadatan penduduk termasuk dalam kategori tinggi, bahkan di beberapa tempat ditemukan pemukiman yang tidak layak huni (luas rumah tidak mencukupi) dan pemukiman ilegal. Kepadatan penduduk didefinisikan sebagai jumlah jiwa per luasan area (1 km^2). Area di Kelurahan sekitar sungai Gajah Wong memiliki luas rata-rata sekitar 1 km^2, dengan jumlah penduduk yang bervariasi. Berdasarkan data kependudukan badan pusat statistik kota Yogyakarta, penduduk yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi

berada di Kecamatan Gondokusuman, dengan jumlah penduduk 45.517/jiwa dan kepadatan penduduk 11.465 jiwa/km^2. Kecaamatan Umbulharjo mempunyai 77.127/jiwa dengan kepadatam 9498 jiwa/km^{2,} sedangkan Kecamatan Kotagede mempunyai 31.308/jiwa dan kepadatan mencapai 10.198 jiwa/km^2. Penduduk disekitar sungai Gajah Wong umumnya adalah masyarakat yang berasal dari dalam Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta yang memanfaatkan bantaran sungai sebagai tempat hunian dan beraktivitas. Kepadatan penduduk umumnya termasuk kategori kepadatan tinggi, di mana banyak ditemukan hunian yang berdekatan dengan talud dan sempitnya akses jalan (hanya dapat dilalui kendaraan roda dua) menuju ke hunian warga, yang secara tidak langsung menghambat perkembangan di sekitar hunian tersebut. Kepadatan bangunan didefinisikan sebagai rasio perbandingan luasan dari lahan yang terbangun (bangunan permanen) dengan luasan area total yang tersedia.

Perbandingan Luas Area di Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area	Segmen
Gondokusuman	Baciro	1,03	1
Umbulharjo	Muja-muju	1,53	2
Umbulharjo	Pandean	1,38	4, 5
Umbulharjo	Warungboto	0,83	3
Umbulharjo	Giwangan	1,26	6
Kotagede	Prenggan	0,99	5
Kotagede	Rejowinangun	1,25	3

Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2014

Permasalahan-permasalahan yang umumnya terjadi berkaitan dengan keadaan kondisi lingkungan masyarakat, terutama yang ditemukan pada wilayah sungai Gajah Wong adalah antara lain menyangkut dengan permasalahan yang kompleks dalam mengembangkan dan merencanakan kawasan tersebut terkait kepadatan penduduk, bangunan dan topografi. Selain itu terjadinya

penyalahgunaan dalam pemanfaatan lahan bantaran sungai dan wilayah sungai, serta sulitnya akses menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan memantau berbagai macam sistem, seperti masalah sampah dan pemanfaatan wilayah sungai yang tidak memperhatikan lingkungan. Masalah lain yang dijumpai yakni berkurangnya ruang terbuka hijau dan lahan peresapan air dan permasalahan lain yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Kondisi lingkungan masyarakat juga memacu timbulnya potensi negatif atau bahaya lain, khususnya di wilayah sekitar pinggir sungai. Misalnya, menyebabkan konflik antar warga akibat kurangnya lahan yang dapat digunakan, bahaya longsor terutama pada hunian yang menempati wilayah bantaran yang terjal, sulitnya perkembangan kawasan tersebut secara ekonomi, sosial, dan budaya akibat kurangnya akses yang memadai pada wilayah tersebut.

Dinamika Warga Bantaran Gajah Wong

Kondisi sosial dan budaya masyarakat di kawasan sungai Gajah Wong secara umum tidak terlepas dari budaya kampung para penghuninya, dimana nilai-nilai budaya feodal jawa berkembang dan berinteraksi dengan budaya kawasan perkotaan, sehingga membentuk suatu keunikan tersendiri. Semangat membangun kampung sendiri, masih adanya pemanfaatan lahan dengan sumber ekonomi tradisional (perikanan, peternakan), terjadinya kepadatan penduduk di sekitar pusat ekonomi kota yogyakarta adalah contoh hasil interaksi dua kondisi tersebut. Nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat sungai Gajah Wong secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas. Hal positif yang bisa ditemukan ialah semangat kebersamaan, kemauan untuk maju berkembang, serta budaya gotong royong (budaya kampung-kota). Pengaruh negatif yang ditemukan ialah ditemukan masyarakat yang memanfaatkan ruang dan fasilitas kota menjadi hunian dan sumber ekonomi mereka karena keterbatasan atas akses pendidikan, ekonomi maupun kesehatan.

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sepanjang sungai Gajah Wong pada umumnya beraneka ragam, perbedaan kondisi tersebut terlihat dari bentuk pemanfaatan Daerah Aliran Sungai di masing-masing wilayah. Faktor pengetahuan akan sangat menentukan dalam hal ini, sebab bentuk pemanfaatan lahan selalu dibarengi dengan tingkat wawasan yang dimiliki warga di sekitar lingkungan itu sendiri. Rata-rata,di area sungai Gajah Wong lahan yang tersedia dimanfaatkan sebagai hunian dan lokasi usaha. Bentuk pemeliharaan sungai juga tergantung kepada kondisi masyarakat setiap wilayah, di area sungai bentuk-bentuk pemeliharaan sungai biasanya berupa pengelolaan sungai dengan prokasih, pengelolaan sampah atau pemilahan, konservasi air, budidaya ikan, penghijauan dan tamanisasi untuk peningkatan RTH. Di samping itu, terdapat juga komunitas kampung hijau yang mempunyai program penghijauan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat perbedaan pemanfaatan lahan dan pola sosial di tiap wilayah atau segmen di sepanjang sungai Gajah Wong.

Masalah-masalah yang ditemukan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat yang berada di daerah sungai Gajah Wong wilayah kota antara lain, secara sosial masyarakatnya hanya peduli terhadap ″kampung″ nya sendiri, budaya pemanfaatan lahan yang tidak cocok dengan kondisi perkotaan, serta masih adanya perilaku warga yang menggunakan sungai sebagai sarana MCK. Selain itu, rendahnya kualitas interaksi antar masyarakat di lingkungan sekitar sungai Gajah Wong, kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, dan berbagai permasalahan sosial lainnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya dinamika sosial masyarakat sehingga perlu dilakukan interaksi maupun sosialisasi yang terpadu baik secara teknis maupun non-teknis agar dapat menjawab masalah ini.

Beberapa kondisi yang ada di masyarakat yang merupakan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik sosial, yaitu ; tidak seimbangnya luas wilayah berbanding dengan jumlah penduduk yang ada menimbulkan kepadatan penduduk yang tidak merata antar wilayah, terutama pada

wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan bangunan yang tinggi di lingkungan sekitar sungai sehingga tidak terdapatnya ruang-ruang terbuka sebagai ruang komunal untuk masyarakat dapat berinteraksi dan bersosialisasi. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa seringkali terjadi kesenjangan didalam kehidupan sosial masyarakat bantaran sungai Gajah Wong.

Minimnya Sarana dan Prasarana

Keberadaan fasilitas umum seperti sanitasi, MCK, IPAL merupakan salah satu fasilitas bagi masyarakat agar dapat tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kurangnya kesadaran pemanfaatan fasilitas ini atau bahkan menggunakan sungai sebagai sarana sanitasi dan MCK dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Beberapa sarana yang ditemukan di sekitar wilayah sungai Gajah Wong adalah saluran sanitasi dan drainase. Selain itu, terdapat beberapa taman untuk ruang terbuka hijau di beberapa segmen sungai Gajah Wong. Pada salah satu titik di kawasan sungai Gajah Wong terdapat sarana pengolahan sanitasi, biopori, resapan air, IPAL, biogas yang dimanfaatkan untuk masyarakat sungai Gajah Wong. Namun kondisi tersebut belum merata terpenuhi di setiap wilayah, ini juga yang kemudian menjadi fokus permasalahan utama bagi Forsidas. Sistem sanitasi ini idealnya merupakan kesatuan antara tempat MCK baik itu milik pribadi (privat) maupun yang digunakan secara bersama-sama (komunal), saluran buangan limbah cair rumah tangga (domestik) maupun industri rumah tangga yang terhubung ke IPAL ataupun *septic tank*. Masalah atau kekurangan yang ditemukan pada masalah sanitasi di sekitar sungai Gajah Wong pada wilayah kota Yogyakarta umumnya antara lain, membuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak digunakannya sarana MCK, IPAL komunal yang ada, masalah perawatan dan kondisi sarana sanitasi yang ada, masih adanya perilaku masyrakat yang menggunakan sungai sebagai sarana MCK.

Beberapa potensi bahaya yang dapat muncul akibat kesalahan penanganan dan pengelolaan sanitasi khususnya di daerah sekitar

pinggir sungai adalah dapat menyebabkan potensi penyakit akibat pencemaran organik yang terpapar langsung ke sungai, mengurangi keindahan dan kenyamanan masyarakat di pinggir sungai karena adanya pencemaran organik yang mengubah warna, dan menimbulkan bau tidak sedap terhadap air sungai. Selain persoalan sarana sanitasi, adapula masalah-masalah lain yang ditemukan mengenai pengolahan air, mata air, sistem drainase dan bendung yang berada di daerah sungai Gajah Wong wilayah Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut ; masih terbiasanya warga dalam membuang limbah domestik ke saluran drainase, sarana pengolahan air bersih yang ada dirasa cukup kurang terutama untuk warga miskin yang tidak mampu berlangganan air dari PDAM, desakan pembangunan fisik di daerah sekitar bendung dimana seharusnya di sediakan lahan kosong bervegetasi untuk mendukung keberadaan dan kestabilan bendung itu sendiri.

Beberapa potensi bahaya lainnya yang dapat muncul akibat kesalahan pengolahan air, mata air, sistem drainase dan bendung khususnya di daerah sekitar pinggir sungai adalah dapat menyebabkan potensi penyakit akibat pencemaran organik yang terpapar langsung ke sungai maupun air tanah, bahaya erosi atau longsoran terutama di sekitar wilayah bendung, berkurangnya debit mata air di daerah pinggir sungai dapat merubah fungsi fisiologis sungai sebagai pengencer limbah dalam tahapan tertentu, rusaknya ekosistem sungai apabila pencemaran telah melampaui batas kemampuan sungai itu sendiri. Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi alasan dilakukannya upaya konservasi sungai Gajah Wong oleh Forsidas yang kemudian menjadi kerangka pemikiran dalam penyusunan strategi bentuk-bentuk konservasi yang harus dilakukan oleh Forsidas Gajah Wong dengan mempertimbangkan skala prioritasnya di masyarakat serta dengan mengukur kapasitas sumber daya didalam komunitas itu sendiri serta dibantu oleh warga bantaran sungai yang lainnya sejauh mana mampu melaksanakan program-program tersebut. Barulah kemudian disusun rencana-rencana upaya revitalisasi dan program dalam aspek lainnya oleh Forsidas Gajah Wong.

Klasifikasi Permasalahan Di Area Bantaran Sungai Gajah Wong

Sumber: Forsidas

Skema Forsidas Gajah Wong

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Forsidas Gajah Wong yang sejak awal dibentuk memiliki visi menjadikan ekosistem sungai Gajah Wong yang bersih, indah,aman dan nyaman dalam satu kesatuan manajemen ini juga memiliki peran penting dalam membentuk program-program yang mencakup segala aspek yang ada di masyarakat bantaran sungai guna memecahkan permasalahan lingkungan melalui upaya konservasi. Hal ini dikarenakan oleh daya dukung masyarakat yang masih minim apabila program yang ditonjolkan hanya seputar pelestarian sungai dalam bentuk pembersihan badan sungai atau kerja bakti dan semacamnya.

Dalam keberjalanannya, wujud aktivitas dari komunitas ini tentunya berupa jawaban-jawaban atau solusi solusi yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami di lapangan seperti penjelasan sebelumnya. Wujud aktivitas itu hingga saat ini lebih banyak di bidang revitalisasi daerah aliran sungai. Upaya revitalisasi yang dilakukan Forsidas Gajah Wong tersebut yakni yang berkenaan dengan isu isu antara lain mengenai revitalisasi kondisi fisik dasar, kependudukan, sosial budaya, dan sarana prasarana lingkungan. Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di area sungai Gajah Wong, Forsidas menyusun sistematika upaya konservasi DAS yang dapat dilakukan guna memecahkan permasalah tersebut. Dalam hal ini kemudian Forsidas Gajah Wong merancang multi peran di setiap segmen, setidaknya bisa dibedakan peranan tersebut ke dalam tiga kategori yakni sebagai fasilitator upaya konservasi DAS, dalam bentuk sosialisasi, dan penggerak bagi masyarakat dalam upaya konservasi tersebut.

Fasilitasi Gajah Wong

Seperti yang kita ketahui, peranan fasilitator adalah untuk membantu bagaimana suatu program berlangsung. Tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan daripada terhadap tempat tujuan. Fasilitator tidak mendefinisikan isi (misalnya menetapkan tujuan suatu program, menganalisis topik bersama pihak yang difasilitasi, membuat rencana, atau melaksanakan, hanya mengatur proses). Fasilitator hanyalah pemimpin proses saja, mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, atau memberikan kontribusi terhadap substansi diskusi. Tugas fasilitator adalah memandu proses dalam kelompok, membantu anggota kelompok memperbaiki cara mereka berkomunikasi, menyelidiki dan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, bentuk bentuk peranan yang dilakukan Forsidas antara lain sebagai tuan rumah bagi pihak eksternal yang ingin mengetahui seluk beluk gerakan komunitas ini, contohnya yang baru saja dilakukan oleh Forsidas di zona 2 tepatnya di daerah Gambiran Umbulharjo, yakni memfasilitasi upaya konservasi lingkungan di area sungai yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa National University of Singapore beberapa waktu lalu di area bantaran sungai Gajah Wong serta dalam rangka melakukan riset dan upaya konservasi lingkungan berupa penanaman pohon yang mendatangkan kupu-kupu, pembersihan sungai, dan riset terhadap masyarakat bantaran sungai Gajah Wong. Selain itu, peran fasilitasi oleh Forsidas juga memfasilitasi hubungan antara masyarakat Gambiran dengan berbagai pihak, untuk sharing dan sosialisasi mengenai wawasan berbasis lingkungan serta eksplorasi mengenai bentuk gerakan yang dilakukan masyarakat Gambiran dalam pelestarian sungai di wilayahnya. Fasilitasi ini berbentuk dukungan bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan riset,memberikan bantuan, ataupun pihak luar

yang ingin mengadakan melihat lebih jauh area bantaran sungai Gajah Wong.

Selain peran tersebut, Forsidas juga menjalankan peran untuk mendistribusikan beragam informasi dari Pemerintah Kota kepada masyarakat bantaran sungai Gajah Wong ataupun sebaliknya. Bentuknya yakni sebagai fasilitator dalam kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota, komunitas, atau lembaga tertentu kepada warga. Untuk itu, Forsidas berada diposisi sebagai fasilitator apabila terdapat warga dilingkungan bantaran yang tertarik melakukan suatu aksi konservasi namun keterbatasan sumber daya sehingga memerlukan dampingan dari pihak lain seperti BLH, komunitas lingkungan lainnya, ataupun dari pihak akademisi. Dalam hal ini, Forsidas bertindak sebagai fasilitator yang berupaya memfasilitasi upaya tersebut dengan mendatangkan narasumber atau pihak yang mampu mendampingi warga bantaran sungai di dalam perencanaan hingga bentuk nyata dari aksi tersebut.

Sosialisasi Bank Sampah oleh Badan Lingkungan Hidup, 2016

Kegiatan fasilitasi kepada masyarakat bantaran sungai Gajah Wong sebenarnya dapat dilakukan di seluruh segmen pada area bantaran sungai. Namun, hal ini tergantung kepada kesiapan warga masing-masing wilayah, sebab Forssidas tidak akan melakukan fasilitasi apabila warga tidak memiliki inisiatif dan berperan aktif dalam program itu sendiri.

Dalam melakukan perannya sebagai fasilitator, Forsidas Gajah Wong telah mampu membawa beberapa perubahan di dalam masyarakat pada segmen tertentu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kelompok masyarakat di setiap segmen tersebut mencerminkan keberhasilan peran Forsidas. Hasil dari fasilitasi yang dilakukan Forsidas terhadap kelompok masyarakat bantaran adalah antara lain meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan khususnya sungai, serta dengan akses pihak luar yang diharapkan mampu menyebarkan pengaruh bagi masyarakat untuk melakukan aksi konservasi baik dalam segala bentuk upaya yang berfungsi untuk melakukan revitalisasi bagi daerah aliran sungai di wilayahnya dan bentuk perubahan yang lainnya.

Sosialisasi Forsidas Gajah Wong

Dalam proses sosialisasi, upaya Forsidas mengembangkan kepribadian melalui interaksi dengan setiap individu di dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi, kelompok merupakan media sosialisasi dalam membentuk kepribadian seseorang. Kelompok inilah yang melaksanakan proses sosialisasi, secara sosiologis kelompok ini dinamakan agen sosialisasi. Tahapan sosialisasi akan menjadi wahana dimana individu berubah akan mengalami rangkaian sosialisasi untuk mempersiapkan dirinya masuk ke dalam masyarakat sepenuhnya. Dalam hal upaya konservasi sungai Gajah Wong yang perlu dilakukan oleh segenap pihak, yakni baik masyarakat ataupun pihak lain seperti Pemerintah atau komunitas tentunya diperlukan pula agen sosialisasi yang mampu memberikan pembelajaran, pengarahan serta pengawasan dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut. Permasalahan sosial dan budaya di lingkungan

bantaran menjadi salah satu masalah yang diprioritaskan dalam pemecahannya, hal ini mencakup permasalahan-permaslahan yang berkitan dengan pola pikir, pengetahuan yang minim, bentuk interkasi, pemanfaatan dan pengelolaan situs budaya yang masih minim, dan lain-lain. Rendahnya kualitas interaksi antar masyarakat di lingkungan sekitar Sungai Gajah Wong, kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, dan berpotensi menjadi penyeba`b terjadinya konflik sosial masyarakat sehingga perlu dilakukan interaksi maupun sosialisasi yang terpadu baik secara teknis maupun non-teknis agar dapat menjawab masalah yang ada.

Permasalahan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berada di daerah sungai Gajah Wong wilayah Kota Yogyakarta perlu untuk diatasi. Maka, di sinilah Forsidas kemudian melakukan perannya sebagai komunitas yang mampu menjadi agen sosialisasi bagi seluruh warga agar tercipta masyarakat yang sesuai dengan harapannya. Yakni salah satunya dengan meningkatkan peran dan kebersamaan masyarakat di sekitar sungai sebagai satu kesatuan. Peran Forsidas sebagai agen sosialisasi berarti menjalankan peran sebagai pembimbing, agen pembelajaran/pendidik, pengawas serta agen pengontrol dari upaya konservasi yang dilakukan di sungai Gajah Wong. Salah satu bentuk aktivitas nyata dari peran ini adalah di selenggarakannya kegiatan tahunan “Festival Gajah Wong” yang melibatkan seluruh masyarakat dari hulu hingga ke hilir sungai Gajah Wong dalam acara yang kegiatannya meliputi, bersih-bersih sungai massal, kirab budaya, pentas seni, dan lain lain.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadikan aspek kebudayaan dan kesenian sebagai media sosialisasi yang diterapkan oleh Forsidas kepada masyarakat. Tujuannya, melalui kegiatan tahunan ini masyarakat mendapatkan pembelajaran dan stimulasi untuk terus menggali pengetahuan dan wawasan seputar upaya konservasi daerah aliran sungai yang dapat mereka lakukan di wilayahnya masing-masing. Selain itu, ada pula upaya lainnya dalam membentuk kondisi sosial

Festival Gajah Wong, 2014

budaya yang kondusif dikalangan warga sepanjang sungai, antara lain dengan membentuk atau mengoptimalkan paguyuban-paguyuban yang telah ada, melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan sungai yang benar, membuat regulasi yang jelas dan tegas, menggalakan program-program di masyarakat yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, mengoptimalkan dan mempromosikan potensi produk budaya yang telah ada dan lain-lainnya.

Masih di dalam aspek sosial, Forsidas Gajah Wong pun menggencarkan pengadaan bank sampah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebab masih terdapat di beberapa titik atau segmen, tempat pembuangan sampah yang berdekatan dengan bantaran sungai. Beberapa segmen lainnya bahkan masih memiliki kebiasaan untuk membuang sampah di sungai. Sehingga Forsidas berupaya

mencari solusi untuk masalah ini. Sosialisasi mengenai pembuatan tempat pembuangan sampah dirasa menjadi alternatif solusi yang konvensional. Dalam pertemuan anggota Forsidas akhirnya disepakati setiap titik di wilayah sungai Gajah Wong harus memiliki bank sampah. Bank sampah ini fungsinya sebagai tempat pemilahan dan pendaurulangan sampah yang dikumpulkan warga, lalu untuk warga sendiri memperoleh imbalan berupa uang sesuai dengan berat dan jenis sampah yang dikumpulkan ke koordinator. Bagi setiap kawasan, Forsidas bersedia memfasilitasi pengadaan sosialisasi dan bimbingan terhadap masyarakat yang masih awam dengan bank sampah. Dengan bekerja sama dengan BLH kota Yogyakarta, Forsidas sedikit demi sedikit mulai menunjukkan hasil berupa jumlah bank sampah yang semakin banyak diwilayah Gajah Wong.

Untuk kasus dibeberapa segmen, misalnya di daerah Gambiran, Umbulharjo. Forsidas sebagai agen sosialisasi turun langsung menbentuk pembagian kerja dalam mendampingi warga mengelola sampah hingga akhirnya terbentuklah bank sampah warga Gambiran tersebut. Program-program yang disusun seperti pembentukan bank sampah tersebut berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya warga setiap segmen dan kemudian Forsidas barulah menempatkan diri baik sebagai fasilitator, agen sosialisasi ataupun agen penggerak dalam upaya konservasi tersebut. Adapun program-program sosialisasi lainnya di lingkungan bantaran sungai Gajah wong. Salah satunya yang terpenting adalah sosialisasi yang menggalakan konsep sungai sebagai halaman depan bagi pemukiman warga di pinggiran sungai, sehingga nantinya secara otomatis terbangun sempadan dan akses jalan di sekitar sungai oleh warga masyarakat. Setidaknya, lingkungan tempat tinggal warga di daerah Darakan Barat sudah tertata rapi bahkan dijadikan percontohan bagi lingkungan lain dalam penataan pemukiman. Tinggal proses membalikan tata letak rumah misalnya pintu depan menjadi pintu belakang, dapur menjadi teras dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan, dalam melakukan perannnya sebagai agen sosialisasi, Forsidas Gajah Wong telah membawa beberapa perubahan di dalam masyarakat pada segmen tertentu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kelompok masyarakat di setiap segmen tersebut mencerminkan keberhasilan peran yang dilaksanakan oleh Forsidas. Hasil dari fasilitasi yang dilakukan Forsidas terhadap kelompok masyarakat bantaran adalah antara lain membangun kualitas sumberdaya yang ada di daerah aliran sungai Gajah Wong melalui agenda-agenda pembelajaran, sosialisasi, pelatihan dan lain-lain. Pola tersebut kemudian yang mendorong warga memiliki semangat dan kepercayaan diri bahwa ia berdaya untuk melakukan suatu upaya konservasi bagi daerah aliran sungai di wilayahnya dan bentuk perubahan yang lainnya.

Forsidas Penggerak Gajah Wong

Peran Forsidas sebagai agen penggerak selalu terkait dengan upaya penanganan permasalahan fisik dasar area sungai yang sejak awal menjadi tugas paling utama,sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, partisipasi masyarakat akan meningkat apabila lebih dahulu sudah ada contoh atau bukti secara riil peran dari Forsidas. Forsidas menempatkan diri sebagai agen penggerak dalam hal ini sebab dalam upaya pembangunan fisik dasar di daerah aliran sungai Gajah Wong membutuhkan perhitungan serta pengawasan langsung. Jadi biasanya Forsidas akan segera mengarahkan langsung warga dalam upaya pemecahan masalah fisik sungai ini yang sudah terlebih dahulu diawali dengan rembugan dengan warga dan pihak yang dapat membantu serta perencanaan yang matang. Dalam menjalankan peran, Forsidas harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah aliran sungai Gajah Wong dalam upaya konservasi yang dilakukan. Sejauh ini penataan fisik dasar lingkungan sungai antara lain berupa pembangunan talud, bronjong, pengelolaan sungai dengan prokasih, penghijauan dan tamanisasi, serta pembangunan kampung hijau, dan lain-lain.

Selain bronjong, talud juga merupakan infrastruktur kawasan sungai yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya longsor. Meskipun talud banyak dinilai membatasi area tumbuhnya tanaman liar di sekeliling tepian sungai namun talud masih menjadi pilihan tepat untuk menata kawasan sungai supaya terliha lebih rapi. Selain itu, untuk konsentrasi dibidang penyelenggaraan prokasih, Forsidas Gajah Wong juga dinilai oleh warga memiliki peranan yang berarti sebagai agen penggerak, khususnya dalam program merti kali yang diinisiasi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY. Forsidas menjadi perantara sekaligus pihak yang mengkoordinir kawasan bantaran sungai dalam kegiatan ini. Program merti kali juga diselenggarakan untuk pertama kalinya di seluruh kawasan sungai di kota Yogyakarta. Dari setiap wilayah sungai dikoordinir oleh masing-masing komunitas yang terdapat di wilayah sungai tersebut.

Warga Bergotong-royong dalam Kegiatan Merti Kali

Pengadaan sarana prasarana lingkungan salah satunya yang paling penting dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai yakni dalam bentuk sanitasi, drainase dan IPAL komunal. Secara umum sistem sanitasi dapat digambarkan sebagai sistem pengendali tingkat higienis, kebersihan dan kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan manusia terhadap air. Idealnya sistem sanitasi haruslah terpisah dengan sistem drainase, dimana saluran sistem drainasenya dikembangkan sendiri, mulai dari air hujan, kemudian masuk ke selokan atau parit, sampai dengan meresap ke dalam tanah kembali atau mengalir ke sungai dan bermuara di laut. Pada sistem sanitasi, karena sebagian besar berhubungan dengan limbah, maka perlu diusahakan saluran yang benar-benar sehat agar nantinya dapat diolah di IPAL dan hasilnya memenuhi standar baku air. Hingga saat ini, Forsidas setidaknya dalam melakukan pembangunan atau pengadaan serta pengelolaan sanitasi, biopori, resapan air, IPAL, dan ruang komunal sudah terdapat di semua zona. Pengadaan tersebut dapat diartikan Forsidas mengupayakan pembangunan berbagai sarana sanitasi, biopori dan lain-lain, atau dapat pula diartikan bahwa Forsidas memperbaiki sarana yang sebelumnya sudah dibangun pemerintah namun tidak dimanfaatkan oleh warga dalam kegiatan sehari-hari.

Tantangan dalam Upaya Konservasi

Faktor pendukung dalam setiap kegiatan atau upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh Forsidas Gajah Wong, terdiri dari faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam. Faktor pendukung yang biasanya dari luar antara lain adanya dukungan dari Pemerintah Kota atau pihak tertentu terutama pendanaan dan fasilitas, adanya pendampingan dari pihak lembaga swadaya masyarakat, komunitas atau akademisi di lapangan sehingga pelaksaan peran tersebut mendapat arahan dari pihak lain agar tercipta suatu keseimbangan. Sementara faktor dukungan lainnya berasal dari pihak internal Forsidas dan daya dukung msyarakat

bantaran sungai Gajah Wong dalam hal partisipasi didalam upaya-upaya tersebut. Selain itu, Forsidas juga mempertimbangkan adanya potensi di setiap zona dan segmen yang mampu dimanfaatkan serta dioptimalisasi menjadi keistimewaan tersendiri bagi lingkungan tersebut. Seperti misalnya terdapat sumber mata air yang masih jernih di beberapa segmen, terdapat taman lingkungan, sudah terdapat jaringan IPAL, sudah tersedianya pelestarian budaya lokal, dan potensi lingkungan lainnya.

Selain adanya potensi lokal di setiap segmen di zona masing-masing kawasan bantaran sungai, serta kualitas warga di setiap segmen yang sangat menentukan keberhasilan upaya konservasi sungai tersebut, faktor dukungan yang juga sangat penting dalam upaya konservasi daerah aliran sungai Gajah Wong adalah adanya dukungan secara finansial dari pihak-pihak seperti pemerintah dan lembaga lainnya serta bantuan-bantuan yang bersifat teknis baik itu dalam bentuk riset,kemudahan dalam birokrasi, pendampingan dan lainnya dari pihak luar.

Beragama faktor akan memiliki andil besar dalam keberjalanan program Forsidas. Daya dukung lingkungan, fasilitas oleh Pemerintah Kota serta kualitas SDM di sekitar bantaran sungai Gajah Wong akan menjadi tolak ukur seperti apa keberhasilan yang akan diraih di setiap segmen baik dalam upaya konservasi dalam bentuk pembangunan fisik DAS ataupun peningkatan kualitas lingkungan di sekitar sungai itu sendiri. Sementara, disisi lain adanya faktor dukungan baik dari pihak internal maupun eksternal. Di dalam upaya konservasi DAS yang dilakukan oleh Forsidas Gajah Wong terdapat pula hambatan yang harus dihadapi. Sama dengan dukungan, hambatan pun dapat berasal dari dalam tubuh masyarakat bantaran sungai, dapat pula berasal dari pihak luar. Intensitas dan kualitas interaksi antar masyarakat di lingkungan sekitar sungai Gajah Wong diakui seringkali terjadi, hal ini berdampak pada kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Kemudian menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial masyarakat

sehingga perlu dilakukan interaksi maupun sosialisasi yang terpadu baik secara teknis maupun non-teknis agar dapat menjawab masalah tersebut. Intensitas dan kualitas interaksi tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kemauan dan komitmen menjaga lingkungan ataupunmenjadikannya sebagai pola interaksi yang tepat untuk melakukan aki bersama dengan masyarakat di wilayah lain di bantaran sungai Gajah Wong.

Permasalahan mengenai kemauan warga di beberapa segmen yang masih rendah dalam proses upaya konservasi terkadang menjadi kendala tersendiri. Semisal, mengenai pembangunan IPAL komunal di beberapa segmen antusiasme warga dalam proses pegadaan sarana pengolahan air limbah tersebut tidak mendapat dukungan warga sebab warga tidak menganggap IPAL sebagai kebutuhan di lingkungannya, padahal Forsidas telah menjelaskan daya guna IPAL di dalam upaya konservasi sungai tersebut. Padatnya pemukiman penduduk yang dibangun di kawasan bantaran sungai Gajah Wong, dimana sebagian besar warga yang menempati kawasan tersebut memiliki banyak keterbatasan pada akses pendikan maupun ekonomi. Kepadatan penduduk dalam hal ini termasuk dalam kategori tinggi, bahkan di beberapa tempat ditemukan pemukiman yang tidak layak huni dan pemukiman ilegal. Mahalnya harga lahan dan meningkatnya populasi memberikan dampak pada daerah perkotaan, mengakibatkan kebutuhan lahan yang tinggi, sehingga warga memanfaatkan lahan-lahan kosong atau membangun ke wilayah sempadan sungai.

Persoalan mengenai kaum pendatang dan padatnya pemukiman di kawasan bantaran sungai menjadi hambatan tersendiri dalam upaya konservasi yang di lakukan oleh Forsidas. Hal ini menjadi masalah baru ketika masih bisa ditemukannya pihak-pihak yang tidak mau berkomitmen menjadi bagian dalam upaya pemeliharaan sungai. Persoalan-persoalan tersebut berimplikasi kepada terhambatnya proses konservasi sungai yang dilakukan Forsidas Gajah Wong namun

senantiasa berusaha untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi sehingga hubungan Forsidas dengan kelompok masayarakat bantaran sungai Gajah Wong selalu berada pada suatu titik keseimbangan. Begitu pula dalam perannya, Forsidas Gajah Wong telah berupaya melakukan konservasi daerah aliran sungai dengan berbagai perencanaan dan implementasi yang selalu didukung oleh pihak-pihak lain baik dari Pemerintah maupun lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap isu lingkungan. Semua bentuk permasalahan yang terjadi di sekitar sungai bukan hanya tentang pencemaran dan perbaikan kondisi fisik sungai. Namun lebih kompleks dari itu, isu sungai juga selalu berdampingan dengan isu sosial budaya manusia di sekelilingnya. Upaya konservasi yang tepat dilakukan hanya mampu direalisasikan apabila sistem yang berlaku tidak bersifat mengekang atau statis namun lebih dinamis dan menyesuaikan kondisi masyarakat di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan daya dukung lingkungan dalam proses konservasi dan menekan hambatan-hambatan yang terjadi masyarakat apabila telah ditemukan pola atau bentuk upaya konservasi yang tepat yang dilakukan oleh Forsidas Gajah Wong.

BAB IV
KALI CODE YOGYAKARTA

Kali Code dan Dinamika Kampung-Kota

Kali Code mempunyai peran penting dalam perkembangan kota Yogyakarta, dimana secara histori dapat diterangkan bahwa keberadaan sungai Code yang membelah kota Yogyakarta dari utara ke selatan telah mengukuhkan bukti nyata bahwa masa lalu sempadan Code merupakan hamparan sawah yang sangat subur. Ini dikarenakan titik poros hulu Code adalah Gunung Merapi dan peradaban air telah menempatkan Code menjadi elemen yang menyalurkan berbagai sumber air menuju ke Pantai Selatan. Kolaborasi antara Gunung Merapi dan Code berjalan selaras membentuk kota Yogyakarta yang masih berporos pada Keraton Kasultanan menjadi kota yang *gemah ripah loh jinawi.* Pada saat itu masyarakat Yogyakarta yang mayoritas hidup di sektor agraris mulai memanfaatkan lahan-lahan sempadan Code sebagai tanah garapan. Kota Yogyakarta mengalami perkembangan dan perubahan peradaban air menjadi aktivitas ekonomi tatkala muncul pasar yang sangat berpengaruh besar, pasar tersebut adalah Pasar Beringharjo dan Kranggan. Berangkat dari kemunculan Pasar Beringharjo telah menarik kaum urban yang begitu banyak masuk ke wilayah kota Yogyakarta. Akibat banyaknya masyarakat baik lokal maupun urban datang dan berjualan di pasar Beringharjo, maka tempat untuk berjualanpun penuh. Inisiasi untuk berjualan di luar pasar Beringharjo dan saat malam hari oleh sebagian pedagang di Pasar Beringharjo yang tidak dapat tempat, membuat konsep pasar malam saat itu kian eksis. Kemunculan pasar malam tersebut kemudian seiring berjalannya waktu kita sebut dengan pasar Malioboro.

Munculnya pasar Beringharjo, Kranggan, dan pada akhirnya Malioboro semakin membuat kaum urban yang ingin mengadu nasib di Yogyakarta bertambah. Di lain sisi, kota tumbuh dengan orientasi ekonomi menyebabkan mahalnya tempat tinggal. Kaum urban yang tidak mempunyai cukup uang untuk membeli atau menyewa tempat tinggal di tengah kota memilih tempat yang murah dan tidak berada jauh dari pusat kota. Pinggiran sungai Code merupakan solusi yang paling mudah didapat. Ada beberapa literatur yang menjelaskan tempat pertama kali munculnya pemukiman di pinggir sungai. Darwis Khudori dalam bukunya menjelaskan bahwa masyarakat urban pertama kali menempati pingiran Code berada di daerah Kampung Bumen dan Gondolayu. Ini dikarenakan histori kampung Bumen dan Gondolayu yang dahulunya adalah tanah makam. Sedangkan bagian Code didaerah utara yaitu kampung Jetisharjo dan Bangunharjo dikarenakan suburnya tanah yang ada. Tumbuhnya kawasan tempat tinggal di pinggiran Code menyebabkan tumbuhnya kampung-kota yang terbangun secara alami. Semenjak saat itu didapati bahwa dari ujung utara sampai ujung selatan Code berdiri kampung yang berderet-deret dengan karakteristik hampir sama yakni organik, tidak beraturan, dan identik dengan masyarakat dengan pendapatan rendah. Semua disebabkan oleh karakteristik masyarakat yang tinggal di dalamnya. Secara homogen masyarakat lebih berorientasi ekonomi dibanding dengan kelayakan hidup yang diinterpretasikan dari bangunan rumah.

Orientasi ekonomi telah mengakar kuat dan merekonstruksi pola pikir masyarakat yang mulai meninggalkan sektor agraris dan telah membentuk pilihan-pilihan yang terbatas yang berujung pada terabaikannya ekologi sungai. Bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kota yang berderet di sepanjang Kali Code sungai dan kehidupan merupakan hal yang terpisah dan secara tidak langsung telah melupakan bagaimana kota tersebut terbangun dengan sunga sebagai unsurnya. Ekologi sungai kemudian mengalami perubahan secara beratahap dan berujung pada degradasi. Degradasi ekologi sungai telah menstimulus Pemerintah Yogyakarta untuk menggusur kampung-kota yang ada di sepanjang Code. Hal lain yang mendorong penggusuran

kampung adalah status tanah yang ditempati adalah Sultan Ground. Situasi yang kemudian melahirkan respon Romo Mangun yang berada di kampung Gondolayu. Dengan pendekatan seni dan arsitektural, Romo Mangun membuktikan bahwa masyarakat bantara Code layak untuk hidup dan bertahan di sana. Namun kini, Pemerintah Yogyakarta telah mengeluarkan SK daftar kampung yang tidak layak huni di Kali Code yang dituangkan dalam SK Walikota Yogyakarta No 393 Tahun 2014.
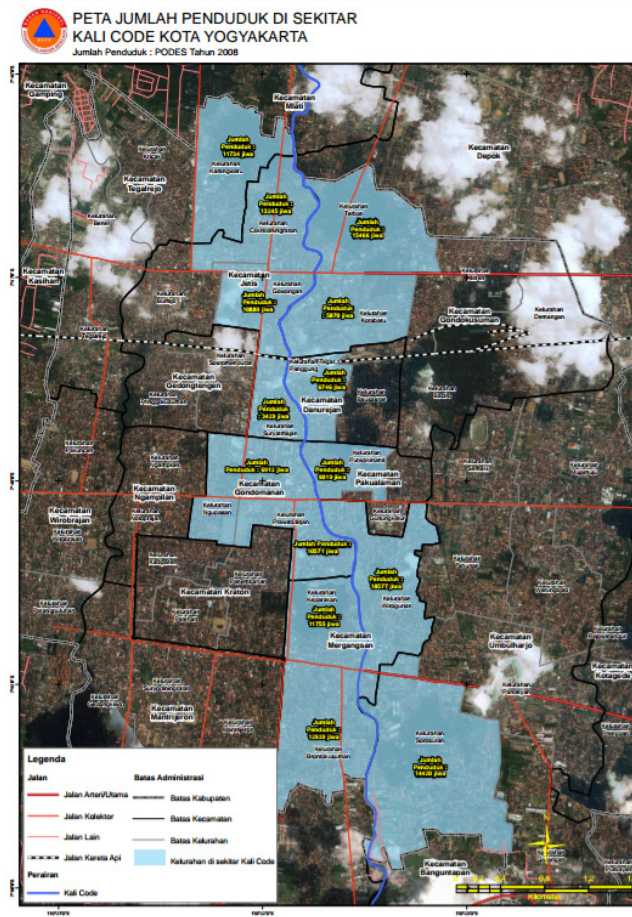
Peta Kampung Sepanjang Aliran Kali Code, 2008

Kampung Jetisharjo. Kampung Jetisharjo berada di Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis. Kelurahan Cokrodiningratan terbentuk pada tahun 1981 dengan luas wilayah 0,66 km^2. Dimana secara administratif Kelurahan Cokrodiningratan sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karangwuru Kecamatan Tegalrejo mengikuti batas antara Kecamatan Jetis dan Kecamatan Tegalrejo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gowongan mengikuti jalan Sudirman, jalan AM Sangaji, dan jalan Poncowinataan. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bumijo mengikuti jalan Magelang. Kawasan Jetisharjo sendiri tepatnya berada di jalan Dr. Sardjito dan secara geografis terletak di antara jembatan Dr. Sardjito. Kampung Jetisharjo mempunyai kontur tanah yang miring. Ada kawasan kampung yang berada sejajar dengan jalan dan ada kawasan yang terletak di bawah jalan raya. Kampung Jetisharjo dibagi menjadi 3 RW yakni RW 06, 07, dan 08. Dimana letak dari ketiga RW ini saling bersebelahan memanjang dari arah utara ke selatan. Dimana tulisasn ini akan mengurai aktivitas di Jetisharjo RW 07.

Jika ditilik sejarahnya, kawasan kampung Jetisharjo dahulunya merupakan lahan pertanian yang sangat subur. Kampung Jetisharjo dulunya mendapat sebutan kampung Ledhok Sayuran, sebuah kawasan cekungan sungai yang subur. Jetisharjo telah menjadi penyuplai bahan makanan, terutama kebutuhan sayur-sayuran di daerah perkotaan Yogyakarta. Ditilik dari segi sosial, masyarakat yang tinggal di kawasan Jetisharjo relatif terbuka terhadap banyaknya pendatang. Indikasi sederhananya bisa dilihat sering datangnya mahasiswa KKN dan akademisi lain yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai sungai dan juga ritual Merti Code. Dari segi mata pencaharian, masyarakat yang tinggal di Jetisharjo memiliki mata pencaharian yang heterogen. Diantaranya adalah pegawai hotel, buruh lepas, pedagang, wiraswasta dan lain sebagainya. Namun mayoritas masyarakat adalah berdagang dan wirausaha. Rata-rata

masyarakat yang tinggal di kampung masih memiliki hubungan kerabat antar sesama. Ini dikarenakan banyak penduduk yang tinggal di Jetisharjo tidak keluar dari kampung Jetisharjo setelah berumah tangga melainkan mencari rumah yang jarak dengan rumah asal orang tua.

Kampung Jetisharjo mengembangkan branding kampung wisata. Kampung Jetisharjo juga dikenal sebagai kampung yang memulai dalam masalah sanitasi air. Secara empiris, tata ruang dari kampung Jetisharjo menunjukkan sudah adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan bersosialisasi, yakni dengan adanya Ruang Tumbuhan Hijau, lapangan yang terdapat di tengah perkampungan, dan masjid As Salaam sebagai representasi dari ruang publik. Tata hunian yang ada belum begitu berimpit dan masih menyisakan tempat untuk teras rumah meskipun tidak terlalu luas. Dalam beberapa titik di kawasan kampung Jetisharjo digunakan sebagai kamar mandi komunal dan juga tempat penyimpanan (*tandon)* air.

Kampung Jogoyudan. Kampung Jogoyudan berada di Kelurahan Gowongan, kecamatan Jetis. Kelurahan Gowongan terbentuk pada tahun 1982 dengan luas wilayah 45.975 km^2. Batas wilayah dari kawasan Kelurahan Gowongan sendiri antara lain di sebelah utara yakni Kelurahan Cokrodiningratan mengikuti jalan Purwodinatan, jalan AM. Sangaji, dan jalan Jendral Sudirman. Di sisi selatan kawasan ini berbatasan dengan Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan dan Kelurahan Sosromendungan, Kecamatan Gedongtengen serta mengikuti rel kereta api, jalan sepanjang Mangkubumi dan Gowongan Kidul. Di sebelah barat Keluarahan ini berbatasan dengan Kelurahan Bumijo mengikuti jalan Bumijo, Diponegoro dan Magelang. Dan di sebelah timur, kawasan Kelurahan berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru Kecamatan, Gondokusuman mengikuti Kali Code. Kampung Jogoyudan sendiri berada di jalan Sudirman (jalan Solo-Yogya) dan secara geografis terletak di belakang Bank BRI

pusat yang berada pada kawasan Tugu. Kontur tanah yang dimiliki kampung Jogoyudan hampir sama dengan kampung Jetisharjo. Namun mayoritas kawasan kampung Jogoyudan berada di bawah jalan raya dan berada di Ledok Kali Code.

Kampung Jogoyudan terdiri dari satu RW yakni RW 8. Tulisan ini difokuskan pada RT 32/RW 08 tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan yang aktivitas masyarakatnya lebih dinamis. Jumlah penduduk yang tinggal di kampung Jogoyudan RT 32 berkisar 138 orang dengan proporsi 83 berkelamin wanita dan 55 laki-laki. Sementara untuk kategori umur, dari 83 wanita yang tinggal di kampung Jogoyudan RT 32 terdapat 25 orang yang dikatakan dibawah umur dan balita. Sementara untuk proporsi laki-laki dari 55 orang, 18 diantaranya merupakan anak-anak dan juga balita. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Jogoyudan yang berada dalam masa sekolah ada sekitar 43 orang. Karakteristik masyarakat yang mayoritas hanya mengenyam pendidikan sampai SD atau SMP menjadikan pendidikan tidak terlalu dianggap penting di kampung Jogoyudan.

Ditilik dari sejarahnya, kampung Jogoyudan dahulunya bernama kampung Gondolayu Kidul. Ini disebabkan karena daerah tersebut dahulunya adalah tanah makam etnis Tionghoa. Ini sejalan dengan kata *Gondo* dalam Gondolayu yang artinya kuburan atau makam. Pada zaman dahulu bangsa bantaran Kali Code menjadi tanah makam dikarenakan harganya murah. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan mitos dari masyarakat yang percaya bahwasanya nama Gondolayu membawa aura negatif dimana terdapat kepercayaan bahwa saat terdapat seorang warga yang meninggal, maka seperti anak rantai warga yang lain ikut meninggal. Dan sebelum 7 orang yang meninggal, mata rantai tersebut belum terputus dan berhenti. Di lain sisi, nama Jogoyudan sendiri diambil dari tokoh prajurit pada masa kerajaan zaman dahulu yang bertugas mengamankan wilayah setempat, nama prajurit tersebut adalah Jogoyudo. Prajurit Jogoyudo dipercaya masyarakat telah membawa keamanan di kampung, oleh sebab itu jadilah nama kampung Jogoyudan untuk mengenang jasa prajurit tersebut.

Sedangkan jika ditilik dari segi sosial dan ekonomi, kebanyakan warga yang tinggal di kawasan Jogoyudan berkarakter sedikit tertutup terhadap pendatang. Situasi yang wajar mengingat konteks yang ada, yaitu adanya kekhawatiran masyarakat mengenai isu penggusuran lahan pemukiman. Dimana keseharian warga, bermata pencaharian buruh lepas yang menopang aktivitas kota secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan tingkat perekonomian masyarakat kampung Jogoyudan mayoritas berada kategori bawah, karena keterbatasan akses atas pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Jika dibandingkan dengan kampung Jetisharjo, secara pemukiman kampung Jogoyudan terlihat lebih padat, kondisi tersebut didilihat dengan bangunan rumah padat dan berbentuk 2 lantai. Selain itu akses jalan menuju kampung yang terbilang relatif lebih kecil karena keterbatasan lahan yang ada.

Dinamika Kali Code Berbasis Komunitas

Dampak Erupsi Merapi

Merapi merupakan titik penentu sekaligus menjadi faktor penyebab dimana perubahan terjadi di sepanjang aliran yang dilewati. Sifat gunung yang masih aktif telah berulang kali memberi dampak yang langsung dirasakan oleh daerah-daerah di sekitarnya dengan radius tertentu. Salah satu daerah yang menerima dampak dari berbagai aktivas Gunung Merapi adalah kota Yogyakarta yang ditilik secara geografis, terdapat 2 sungai yang berhulu di Merapi dengan arah aliran di kota Yogyakarta. Yang pertama adalah sungai Opak yang juga merupakan batas wilayah Yogyakarta bagian timur dengan Provinsi Jawa Tengah dan sungai Boyong yang mempunyai hilir bernama sungai Code mengalir di tengah Kota Yogyakarta. Aliran sungai Code menjadi media sekaligus saksi dimana terjadi dinamika perubahan fisik dalam kurun waktu tertentu di seluruh kampung yang dilewatinya. Salah satu aktivitas yang kerap terjadi adalah erupsi dimana setelah itu terjadilah muntahan lahar dingin sebagai penanda terjadinya letusan gunung yang selama 200 tahun terakhir telah terjadi kurang lebih sebanyak 42 kali. Dimana dalam

42 kali tersebut erupsi besar terjadi sebanyak 16 kali dan erupsi kecil sebanyak 26 kali.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat 2 erupsi tergolong erupsi besar dan meninggalkan dampak perubahan di sepanjang kampung pinggir Kali Code, yakni pada tahun 2006 dan 2010. Gambaran ekologis Code seperti dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya telah berhasil menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Code berada dalam posisi yang sangat rentan bencana. Terbukti ketika terjadi bencana lahar dingin di tahun 2006 dan 2010 hancurnya rumah, talud, dan berbagai bangunan yang dilewati lahar telah memberikan perubahan yang sangat besar. Erupsi tahun 2006 menjadi bencana yang dahsyat dikarenakan sikap dan perilaku tanggap bencana oleh masyarakat masih tidak mau mengantisipasi adanya kemungkinan bencana. Pada waktu itu, bencana masih ditafsirkan terpisah dari budaya interaksi masyarakat dengan Code. Selain itu, bencana juga masih diitafsirkan sebagai takdir atau sifat alam yang sangat sulit untuk dihindari, dikendalikan, dan juga diprediksi. Namun perubahan justru terjadi pascabencana, terjadi perubahan dalam lanskap ekologi Code pascaerupsi 2006. Perubahan ini terjadi baik fisik, perilaku warga, dan juga dari sisi artistiknya. Walaupun kebanyakan perubahan dimotori oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta sebagai upaya mewujudkan keinginan mengembalikan peran dan fungsi sungai sebagaimana seharusnya. Keadaan dimana Pemerintah menjadi penanggungjawab terhadap bencana yang terjadi dengan cara membentuk badan khusus untuk fokus pada penanggulangan bencana ini juga diatur dalam PP No. 21 Tahun 2008.

Banyak dilakukan penataan, perbaikan, dan pemugaran fisik sungai agar cara pandang dan warisan peradaban air yang sudah dijelaskan sebelumnya mampu menemukan wujud empirisnya kembali. Sebagai contoh adalah pembuatan talud di lereng sungai dan juga pelarangan pembuangan sampah ke sungai (Nugroho, 2008). Selain itu terdapat pelebaran daerah aliran sungai, dan juga pemagaran tebing sungai, sedangkan dalam lingkup rumah tangga, banyak perubahan

juga dilakukan. Beberapa diantaranya adalah perubahan arah hadap rumah ke sungai, pembuatan jalan setapak di depan dan di atas tebing sungai, pendirian MCK, pembuatan saluran air bersih, dan penelitian kelayakan air sumur sebagai konsumsi sehari-hari (Siradz,dkk, 2008). Sembari melakukan berbagai penataan fisik, Pemerintah juga membuat rancangan untuk masa depan kawasan Code. Rancangan ini bermaksud untuk mengadaptasikan masyarakat sempadan Code ke dalam kehidupan yang lebih manusiawi. Sebagai contoh adalah penataan kampung hijau, menjadikan Code sebagai obyek wisata air, menjadikan sebagai kawasan bisnis, merelokasi warga melalui program transmigrasi (Suharjo, 2010). Rancangan yang lain adalah mengubah gaya arsitektur rumah menjadi rumah susun yang dilengkapi dengan kebun. Ketika proses adaptasi yang dilakukan Pemerintah tersebut sedang berjalan, bencana erupsi 2010 datang menghantam dan memakan korban berupa material dan nonmaterial. Kondisi Kali Code semakin mengalami pendangkalan yang membuat kawasan ini menjadi kondisi yang kritis kembali. Oleh sebab itu, erupsi tahun 2010 merupakan erupsi terakhir yang masih meninggalkan dampak psikologis mendalam bagi masyarakat sempadan sungai Code.

Dampak fisik maupun dampak psikologis dirasakan juga oleh warga kampung Jetisharjo dan juga Jogoyudan. Kawasan kampung Jetisharjo yang berada di sebelah utara berbatasan dengan Blunyah ini masih tergolong berada di daerah yang masih tinggi. Namun keadaan tersebut tidak lantas membuat Jetisharjo terhindar dari dampak lahar dingin. Salah satu hasil dari pergerakan Pemerti Code adalah dengan adanya pengelolaan air bersih untuk masyarakat Jetisharjo, dan juga adanya jamban komunal. Erupsi 2010 telah berhasil merobohkan talang air yang dibangun dan juga beberapa bangunan WC komunal. Keadaan semakin parah dikarenakan letak Jetisharjo yang berada pada belokan arus air. Air yang mengalir deras menghantam tebing yang ada di sekitar kampung Terban RW 04 dan berbalik ke Jetisharjo, kondisi tersebut membuat debit air semakin berlimpah ketika menuju kampung Jetisharjo.

Kampung Jogoyudan juga mengalami dampak yang serupa dengan Jetisharjo. Keadaan geografis yang lebih rendah membuat kerusakan baik ekologi sungai maupun pemukiman yang parah pada waktu itu. Kerusakan yang terjadi antara lain Daerah Aliran Sungai yang dangkal dikarenakan pasir, banyak titik talut retak, beberapa titik bantaran sungai longsor, dinding pembatas rusak, bantaran banjir dan material masuk serta mengahancurkan pemukiman (Kutanegara, 2014). Kondisi kampung Jogoyudan dengan mayoritas masyarakat dahulunya adalah pendatang membuat pemukiman yang ada di Jogoyudan berada lebih dekat dari bibir sungai. Hal tersebut juga menjadi faktor pendorong lebih terporak-porandanya keadaan kampung Jogoyudan terlebih ditambah kiriman material yang lebih banyak dari aliran Kali Code bagian utara.

Kampung Jetisharjo Lahar Dingin, 2010

Keadaan dimana Jogoyudan menjadi kampung yang sangat rentan terhadap bencana ini juga diperkuat oleh hasil studi Sulistiono (2010) bahwa hanya daerah Mergangsan ke selatan yang akan berada pada titik aman apabila debit air ekstrim di atas kembali terulang di Code. Daerah lain seperti Terban, Sayidan, Ledok Jogoyudan, Juminahan, dan Tegal Panggung akan terkena bencana banjir hingga kedalaman 50 cm. Sementara itu, dengan debit air terbesar yaitu 5,60 m3/detik, hanya daerah Terban dan Mergangsan yang masuk dalam kategori aman. Daerah seperti Jogoyudan dan Juminahan akan terendam air dengan ketinggian 50 cm. Dapat dipastikan apabila banjir lima puluh tahunan dengan debit air 116,06 m3/detik dan seratus lima puluh tahunan dengan debit air 132 m3/ detik terulang kembali semua daerah yang disebutkan di atas akan mengalami banjir besar seperti pascaerupsi Merapi 2010.

Selain dikarenakan debit air, ancaman kebencanaan di Kali Code juga dipengaruhi oleh kondisi fisik Kali sendiri. Kondisi fisik yang dimaksud adalah lebar Daerah Aliran Sungai yang semakin sempit pada daerah-daerah tertentu seperti Sayidan, Jogoyudan, Juminahan, dan Terban. Kemudian dari faktor tinggi rendahnya jarak DAS dengan tinggi tebing atau talud yang ada. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sedimentasi di daerah kawasan DAS. Dengan demikian, setiap daerah akan memiliki titik batas yang berbeda (Pande, 2014). Dari informasi yang ada, bahwa daerah yang memiliki batas aman rendah adalah Jogoyudan dan Juminahan. Ini dikarenakan kedua daerah ini memili DAS yang sempit dan sedimentasi pasirnya yang semakin tinggi. Kedua daerah ini akan menjadi daerah yang pertama terkena dampak banjir apabila debit air Kali Code mengalami peningkatan yang cukup besar.

Batas Debit Air Aman Daerah Paling Rawan Bencana Sepanjang Kali Code

Daerah Terawan	Lebar Sungai	H (m)	Debit air (m3/detik)
Terban	18,62	1,22	50,79
Jogoyudan	17,80	0,97	20,75
Juminahan	17,40	0,95	21,85
Sayidan	14,95	1,94	49,68
Mergangsan	30,63	1,93	112,09

(Sulistiono 2010 diolah dan diobservasi oleh Pande tahun 2011)
Ket H adalah jarak tinggi tebing terendah terhadap titik terendah dasar sungai.

Penjelasan mengenai kedua kampung tersebut dapat dijadikan penjelasana terkait kerusakan dan dampak yang dihasilkan oleh erupsi Merapi 2010 sangat besar. Namun sebagaian besar masyarakat di sempadan Code mempersepsikan bencana yang terjadi tersebut berasal dari *lor negoro* atau dari luar sungai Code. Masyarakat menganggap bahwa letusan Gunung Merapi di tahun 2010 lalu bukan merupakan letusan seperti biasanya, yaitu setiap sewindu sekali. Hal ini mereka peroleh dengan beradaptasi di lingkungan Code, sehingga masyarakat menjadi sangat *titen* dan membentuk cara pandang sesuai dengan pengalaman mereka (Kutanegara, 2014).

Persepsi bahwa bencana tersebut berasal dari luar juga didasarkan dengan banyaknya korban yang mayoritas dari Sleman, yang menganggap bahwa apabila bencana tersebut merupakan bencana dari-dalam Code, harusnya korban paling banyak dari daerah sempadan Code. Informasi mengenai cara pandang mereka ini dapat dibuktikan dengan informasi dari BNPB Sleman. Menurut BNPB Sleman korban erupsi Merapi tahun 2010 adalah 267 korban jiwa meninggal, 454 rawat inap, dan 71.579 jiwa mengungsi. Sementara dari seluruh korban tersebut yang berasal dari Kabupaten Sleman adalah 240 orang meninggal, 223 orang rawat inap, 38.187

orang mengungsi. Dari sisi material diketahui bahwa 2.346 rumah penduduk rusak berat, 217 sekolah hancur, 7 pasar rusak, dan 10 Puskesmas rusak. (www.sleman.go.id : diakses pada tanggal 28 Juni 2016)

Memang persepsi dari masyarakat tersebut tidak tepat apabila dikaitkan dengan data empiris dan data debit air yang sudah diolah berdasarkan rekam data AWLR (Automatic Water Level Recorder) namun berangkat dari kesamaan persepsi untuk tetap bertahan di pemukiman, kesamaan nasib, dan juga perubahan cara pandang sebagian masyarakat khususnya yang berada di kampung Jetisharjo serta Jogoyudan maka timbulah dinamika-dinamika masyarakat dengan wujud beberapa bentuk respon yang bersifat alami dan seiring berjalannya waktu gerakan tersebut menular ke daerah-daerah lain walaupun tidak selalu dalam wujud dan waktu yang sama. Dinamika komunitas merupakan gerakan paling awal yang dilakukan sebagai untuk merealisasikan tujuan orang banyak yang tergabung. Baik tujuan untuk merekonstruksi ulang kampung yang telah rusak akibat lahar ataupun untuk tetap mempertahankan tanah sebagai pemukiman.

Kampung dan Tumbuhnya Kesadaran

Komunitas merupakan alternatif yang pertama dipilih oleh kelompok-kelompok individu dengan tujuan yang sama, fungsi lain komunitas adalah sebagai media pengekspresian diri yang bersifat muda dengan kegiatan yang dinamis. Membangun komunitas dalam sebuah kampung-kota juga dilakukan untuk membentuk identitas kampung serta mendongkrak eksistensi kampung-kota. Begitu pula kampung Jetisharjo dan juga kampung Jogoyudan. Komunitas terbentuk dengan proses yang berbeda, dan dengan tujuan yang berbeda pula. Komunitas yang tumbuh menjadi aktor yang menjadi motor penggerak masyarakat yang tinggal di kampung. Berbagai kegiatan dilakukan guna meneruskan visi dan misi awal komunitas yang telah terbentuk. Seiring keberjalanan kegiatan, tentunya komunitas

bertemu dengan pihak lain yang akhirnya menjadi relasi sosial yang akhirnya selalu mempunyai kesinambungan dalam berbagai konten yang sedang dikerjakan. Kebutuhan untuk selalu menjalin hubungan dengan pihak lain guna mempermudah segala kegiatan menjadikan komunitas berusaha mengembangkan relasi sosial. Sementara kegiatan-kegiatan yang berguna untuk komunitas itu sendiri berjalan, kesadaran bahwa tujuan awal berdirinya komunitas tersebut sebagai eksekutor guna memberdayakan masyarakat yang ada di kampungnya mulai terbentuk. Sekolah komunitas merupakan aplikasi dari eksekusi pemerdayaan masyarakat kampung Jetisharjo dan Jogoyudan.

Selain sekolah komunitas, eksekusi dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah penguatan ekonomi masyarakat kampung-kota. Terjadi diferensiasi cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat kampung yang dilakukan. Di kampung Jetisharjo, penguatan ekonomi dilakukan dengan cara membentuk kampung wisata. Kampung wisata di sini menawarkan berbagai kegiatan yang di dalamnya segala macam kebutuhan dikerjakan oleh masyarakat setempat. Sementara di Jogoyudan, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan memberi pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga agar menghasilkan suatu produk yang nantinya akan di jual di Malioboro. Dalam prosesnya, ternyata ada titik temu dimana dalam titik temu tersebut ada diferensiasi gagasan yang berbeda antara beberapa komunitas. Diferensiasi tersebut menyebabkan adanya dinamika yang berkepanjangan dan menimbulkan beberapa dampak lainnya. Dampak positif yang dihasilkan dari adanya dinamika tersebut biasanya tidak disadari oleh masyarakat secara langsung. Seperti terjaganya ekologi sungai dan juga peningkatan ekonomi masyarakat.

Kampung Jetisharjo mengalami kesadaran membangun komunitas ini mulai disadari pada tahun 2001. Dimana pada tahun tersebut, komunitas yang terbentuk adalah Forum Masyarakat Code Utara (FMCU). FMCU merupakan komunitas gabungan kampung Jetisharjo, Terban,

dan Gondolayu. FMCU terbentuk sebagai wadah aspirasi masyarakat pinggiran Kali Code khususnya di bagian utara dan juga sebagai langkah awal untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dalam prosesnya mampu melahirkan komunitas dalam lingkup yang lebih besar.

Kegiatan Forum Masyarakat Code Utara tahun 2003

Selanjutnya pascaerupsi merapi yang terjadi di tahun 2010, kesadaran masyarakat akan pentingnya wadah yang berbentuk komunitas muncul secara *getok tular*. Warga kampung Jetisharjo membentuk komunitas Pemuda Tanggap Bencana Jetisharjo atau biasa disebut Peta Bejo. Peta Bejo hadir sebagai langkah represif untuk menanggulangi bencana yang telah terjadi dan menjadi langkah preventif untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kerugian yang akan ditimbukan apabila terjadi bencana erupsi Gunung Merapi kembali dikemudian hari. Situasi yang dilatarbelakangi pengalaman masyarakat yang saat pascaerupsi 2006 mendapat berbagai pelatihan

mengenai kebencanaan dan menginisiasi masyarakat untuk bergerak mandiri diwujudkan oleh suatu kelompok. Fungsi lain dari adanya komunitas Peta Bejo sendiri selain menjadi komunitas yang bergerak di bidang kebencanaan juga sebagai komunitas yang bergerak di bidang sosial dalam masyarakat, yakni juga turut membantu dalam acara pernikahan dan juga acara kematian di masyarakat. Seiting berjalannya waktu, Peta Bejo bukan hanya komunitas yang tumbuh di RW 07 Jetisharjo namun lingkup dan keanggotaan Peta Bejo telah berhasil mencakup 3 RW yakni RW 05, RW 06, dan RW 07 sendiri.

Sekarang Peta Bejo mengalami stagnanisasi dalam pergerakannya dikarenakan tidak adanya anggota penerus Peta Bejo dan juga semangat dari anggota Peta Bejo yang sedikit berkurang. Walaupun dalam pergerakannya Peta Bejo masih aktif menyelenggarakan rapat setiap bulan yakni setiap tanggal 15 dan juga masih aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Peta Bejo menjadi komunitas yang bersifat *by event* atau kondisional dalam gerakan nyata dalam fokus kebencanaan. Terlebih dari Pemerintah menugaskan Satgas yang anggotanya dipilih dari warga kampung di sekitar Code masing-masing 3 orang dan diberi upah oleh Pemerintah setiap bulannya dengan tugas membersihkan Kali Code. Kronologi lain terjadi pada tahun 2006, dimana FMCU mengalami perombakan dikarenakan meningkatnya tingkat relasi dengan dasar tujuan yang sama, kemudian terbentuk Komunitas Pemerti Code dengan skala lingkup yang lebih besar. Yakni seluruh masyarakat pinggiran Kali Code yang dimulai dari wilayah Code yang paling utara perbatasan Sleman sampai ke wilayah Code paling selatan yang berbatasan dengan Bantul. Proses terbentuknya Pemerti Code berawal dari salah satu kegiatan yang dilakukan oleh FMCU bernama Merti Code. Ide kegiatan Merti Code oleh FMCU sebenarnya bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat Code Utara agar muncul kemauan memperhatikan lingkungan sungai Code yang memang pada saat dahulu hanya diabaikan begitu saja.

Merti Code merupakan kegiatan ritual yang mengusung nilai budaya dengan kepercayaan Jawa dan obyek yang diperlihatkan adalah berupa air. Merti Code juga merupakan salah satu adaptasi kultural yang bertujuan untuk meneguhkan kembali peran air, sungai, dan keraton dalam menjaga kemakmuran masyarakat Jawa. Dalam kondisi terbatas, miskin dan terhimpit masyarakat diajak kembali untuk mampu menjadikan ekologi sungai sebagai bagian dari kebutuhan dan cara hidup sehari-hari. Ritual dari Merti Code ini dimulai dengan arak-arakan yang diperagakan oleh masyarakat yang telah ditunjuk sebagai *bergodo* (prajurit dari kerajaan). Acara dimulai dari tirakatan yang isinya mendoakan air yang diambil dari 7 mata air yang berbeda, dimana air tersebut ditempatkan pada tempayan atau *genthong*. Setelah itu besoknya air bersama gunungan yang telah dibuat oleh masyarakat setempat diarak oleh *bergodo* melewati beberapa kampung dengan form at seperti karnaval lalu berhenti pada suatu titik Code kemudian pada sore harinya air tersebut direbutkan oleh masyarakat umum karena dianggap air suci yang dapat membawa keberuntungan dan keberkahan, serta kesembuhan bagi yang sedang sakit. Seiring berjalannya waktu, ritual Merti Code menjadi ritual tahunan dan antusiasme masyarakat semakin besar terhadap sungai Code.

Merti Code pertama kali dilakukan pada tahun 1998 dan pada tahun ketiga Merti Code dilakukan, PU Yogyakarta datang untuk mendukung acara tersebut dengan cara memfasilitasi infrastruktur berupa perbaikan talut di seluruh sempadan Code dan juga memberikan dana setiap tahunnya agar acara Merti Code yang telah berhasil memunculkan antusiasme masyarakat dapat dilakukan dengan lebih meriah dan juga menggandeng seluruh masyarakat Code di semua bagian, ini berarti tidak hanya di bagian utara saja seperti sebelumnya. Berangkat dari antusiasme yang semakin besar dan juga dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut, akhirnya pada tahun 2006 lahirlah Komunitas Pemerti Code. Dimana Pemerti Code merupakan pengganti dari Forum Masyarakat Code

Utara (FMCU). Fokus pergerakan dari komunitas atau paguyuban Pemerti Code adalah isu apapun mengenai sungai. Dari sini penggiat sungai mulai pertambah dan sekarang lingkup komunitas Pemerti Code yakni seluruh daerah baik Code utara, tengah, dan selatan meski tidak semua kampung ikut dalam keanggotaan komunitas.

Pengambilan Air Merti Code, 2016

Kampung Jogoyudan juga telah mengalami fase kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun kesadaran bersama sebagai komunitas. Kesadaran ini timbul akibat adanya isu penggusuran lahan pemukiman yang sampai saat ini masih dihuni. Secara kronologi, inisiasi pertama dilakukan sebagian masyarakat dengan mengikuti komunitas dengan lingkup kota Yogyakarta bernama Perhimpunan Masyarakat Pinggiran Sungai (PMPS). Keberadaan awal berdirinya Perhimpunan Masyarakat Pinggiran

Sungai dilatarbelakangi oleh komunitas yang ada sebelumnya, yakni Tim Komunitas Pinggiran Sungai (TKPS) pada tahun 1980. Pada saat itu, TKPS berdiri sebagai reaksi masyarakat akan digusurnya lahan sempadan sungai Code. Pergerakan yang dilakukan TKPS bersifat tegas namun beberapa anggota menyadari bahwa pergerakan yang ada tidak solutif dan malah lebih membuat Pemerintah Kota semakin bersikeras untuk menggusur kawasan tesebut. Ketidaksetujuan sebagian anggota dari TKPS, membuat permasalahan internal yang cukup serius. Sampai pada tahun 2009, dimana puncak solidaritas komunitas hidup kembali dan melawan ancaman dari UU Keistimewaan tentang tanah. Hasil dari puncak solidaritas tersebut telah menghasilkan kemunduran dari waktu jatuh tempo tanah tersebut. Namun disamping keberhasilan tersebut keutuhan komunitas tidak dapat dipertahankan dan akhirnya TKPS terbelah. Setelah situasi tersebut, anggota yang masih ingin memperjuangkan tanah pemukiman pinggir Code membentuk kelompok baru yang akhirnya bernama Perhimpunan Masyarakat Pinggiran Kali Code (PMPS).

Upaya PMPS dalam melanjutkan upaya untuk memperjuangkan pemukiman ternyata juga mengalami dinamika internal, dimana kondisinya terdapat kepentingan yang mendasari pergerakannya. Hal tersebut mengakibatkan kerentanan hubungan antaranggota PMPS dan pada akhirnya PMPS terbelah berdasarkan pilihan-pilihan agenda. Di samping itu, erupsi tahun 2010 dimana saat itu kampung Jogoyudan mengalami kerusakan yang sangat parah seperti yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya membawa empati PMPS untuk membantu. Hal ini ternyata menimbulkan komunikasi antara Jogoyudan yang saat itu belum terpikir untuk membuat kelompok atau komunitas dengan basis kampungnya. Secara kronologi, setelah kondisi kampung mulai terbentuk perlahan yakni tahun 2011 akhirnya terbentuklah kesadaran masyarakat Jogoyudan untuk membuat kumpulan yang berupa organisasi atau komunitas demi mengatasi masalah yang ada, terbentuklah komunitas tersebut bernama Pakubangsa.

Pakubangsa mulai menjadi media bagi warga Jogoyudan untuk memperjuangkan tanah pemukimannya. Melalui komunitas Pakubangsa, masyarakat Jogoyudan ingin membuktikan bahwa keberadaan mereka di pemukiman Code saat ini tidak mengganggu ekologi sungai maupun kehidupan sosial di Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan filososi kepanjangan nama Pakubangsa sendiri yakni Paguyuban Rakyat Kampung Basis Pinggiran Sungai dengan ideologi yang dipegang oleh Pakubangsa adalah ideologi kerakyatan.

Rapat Pakubangsa, 2015

Jika ditilik, terbentuknya komunitas di kedua kampung-kota tersebut telah menginterpretasikan perkembangan dari sistem budaya, sistem kepribadian, dan juga sistem sosial masyarakat kota Yogyakarta. Dimana adanya pengalaman erupsi Merapi dan juga pengetahuan baru yang terbentuk pascaerupsi

menginisiasi komunitas adalah langkah awal yang harus dilakukan guna mewujudkan suatu tujuan tertentu ini terbukti telah mengembangkan sistem budaya di kedua kampung-kota tersebut. Jetisharjo yang di dalam kampungnya terdapat Pemerti Code memaknai komunitas sebagai langkah awal untuk menarik perhatian masyarakat yang lain untuk peduli terhadap sungai. Hal ini terwujud melalui gerakan yang masih dipertahankan dari sejak FMCU sampai sekarang yakni gerakan Merti Code. Sementara Jogoyudan dengan Pakubangsa yang hidup didalamnya telah memaknai komunitas sebagai media untuk perjuangan perpanjangan hak guna tanah dikarenakan keberhasilan dari PMPS dalam memperpanjang hak guna di tahun 2009 yang lalu. Dinamika dari keberjalanan komunitas yang tumbuh di kedua kampung tersebut juga telah menjadi dinamika budaya pembaharuan di kampung yang menjadi tempat tumbuhnya komunitas tersebut. Sistem budaya berjalan secara linier dan mengarah ke suatu tujuan yang mengerucut. Perubahan dari sistem kebudayaan ini dimaknai individu yang tergabung dalam komunitas dan juga yang tidak tergabung dengan komunitas di kedua kampung-kota tersebut. Individu yang tergabung ke dalam komunitas yang telah tumbuh di kedua kampung tersebut mengkontruksi pemikiran dalam diri dan kepribadiannya untuk ikut bergerak dikarenakan kebutuhan akan kelayakan hidup mereka. Sementara individu yang belum tergabung dengan komunitas yang ada di dalam kampungnya mengidentifiksi bahwa komunitas tersebut merupakan wadah yang harus tetap dijaga sehingga mereka beradaptasi dengan adanya kehidupan komunitas di dalam kehidupan kampungnya. Baik individu yang tergabung atau tidak tergabung dalam komunitas tersebut telah berintegrasi dengan komunitas yang ada di kampung mereka masing-masing.

Berdasar pada proses memaknai bahwa komunitas merupakan tindakan yang masyarakat pilih untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dan juga pemahanan diri yang dilakukan oleh individu yang tergabung dalam komunitas tersebut maka yang

perlu dilakukan selanjutnya adalah memperkuat komunitas. Ini terkait dengan perkembangan sistem sosial dimana berangkat dari kebutuhan dukungan oleh masyarakat yang berasal dari luar kampung tempat mereka tumbuh. Kedua komunitas melakukan pelebaran pergaulan agar mereka berkembang baik dalam segi pemikiran maupun pergerakan. Untuk melebarkan pergaulan ini, komunitas Pemerti dan Pakubangsa membentuk identitas dan mempublikasikan keberadaannya. Maka kegiatan yang dilakukan setelah lahirnya komunitas-komunitas tersebut adalah dengan membangun relasi sosial dan mengadakan berbagai event yang tujuannya menjadi sarana untuk lebih terhubung dengan kota Yogyakarta.

Event dan Relasi sebagai Sarana Eksistensi

Relasi sosial dan event merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Dalam proses pergerakannya, masyarakat yang tergabung dalam komunitas mengadakan berbagai acara atau event sebagai media eksistensi dan juga untuk membentuk identitas. Eksistensi dan identitas tersebut digunakan baik untuk komunitas itu sendiri maupun untuk kampung tempat komunitas tersebut terbentuk. Berbagai acara digelar dalam lingkup internal yang berarti hanya melibatkan masyarakat kampungnya dan juga lingkup eksternal yang berarti melibatkakan orang-orang ataupun kelompok lain yang berasal dari luar kampung. Hal ini juga bertujuan untuk membuka jaringan guna menambah kekuatan untuk mendapatkan target apa yang hendak dituju secara lebih cepat, dimana event tersebut dirancang dan dilaksanakan di kampung Jetisharjo dan kampung Jogoyudan. Relasi sosial menjadi faktor pendorong yang dibutuhkan agar event dapat terselenggara. Dan juga menjadi manfaat yang didapat ketika sekelompok komunitas atau kampung dengan pergerakannya mempunyai eksistensi sehingga banyak pihak diluar yang mengetahui.

Relasi sosial bagi masyarakat yang berbasis komunitas juga merupakan kekuatan tambahan untuk membantu mewujudkan target yang hendak dituju. Gerakan untuk membangun relasi sosial dalam masyarakat berbasis komunitas mulai muncul akibat dari kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah dengan mengadakan suatu event baik secara kolaborasi ataupun menyelenggarakan event dengan cara independen. Jika dilihat dari sifat pergerakannya, kampung Jetisharjo lebih sering mengadakan event dalam lingkup eksternal daripada lingkup internal. Hal ini terbukti dengan banyaknya dokumentasi yang ditemukan yakni berupa foto-foto dan juga persepsi masyarakat yang terbuka terhadap orang baru. Pemerti Code sebagai komunitas yang tumbuh di dalam kampung tersebut telah bertemu dengan relasi-relasi baik dari Pemerintah, akademisi, pemerhati sungai baik domestik ataupun mancanegara, dan juga dari berbagai kelompok dalam proses pergerakannya. Hal ini berdampak tumbuhnya kolaborasi dengan relasi sosial dalam bentuk event yang diselenggarakan dengan satu tujuan namun berbeda kepentingan.

Situasi yang hampir sama, dimana bentuk event yang diadakan di Jetisharjo adalah event yang bertujuan untuk mengenalkan kampung Jetisharjo kepada masyarakat umum. Relasi sosial Pakubangsa terbentuk dikarenakan kesamaan nasib yaitu terancamnya pemukiman disebabkan penggusuran karena status hak milik tanah yang ditempati adalah Sultan Ground. Sebab secara kronologis wacana mengenai penggusuran pemukiman ini telah merebak dari tahun 1980. Namun karena ada perjanjian antara pihak Keraton dan juga masyarakat setempat maka terdapat perpanjangan tempo sampai sekarang. Oleh sebab itu, relasi sosial yang terbentuk mayoritas adalah daerah dan komunitas yang mempunyai kesamaan nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Berrelasi dengan komunitas Kulon Progo, dimana masyarakatnya sedang berjuang untuk menolak adanya pembangunan Bandara Adi Sucipto. Selain di Kulon Progo, relasi juga terbentuk di daerah Gunung Kendeng yaitu Sedulur

Sikep yang sama-sama mempunyai tujuan untuk mempertahankan tanah pertanian yang akan dibangun Pabrik Semen, Daerah-daerah lain yang menjadi relasi Pakubangsa semakin bertambah. Seperti masyarakat sekitar Pantai Watu Kodok dan masyarakat Rembang. Namun tidak lalu hanya rekan senasib saja yang menjadi relasi sosial dari Pakubangsa. Seiring berjalannya waktu dari berbagai sektorpun terdapat relasi dari Pakubangsa di Jogoyudan.

Event yang dilakukan di daerah Jogoyudan mayoritas bersifat internal, hal ini dikarenakan krisis kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah setempat. Jika ditarik benang merah ini disebabkan saat erupsi 2010, masyarakat merasa Pemerintah tidak memberikan perhatian yang lebih. Dalam artian adanya bantuan dari Pemerintah hanya bersifat kontemporer. Dalm proses pembangunan rumah dan ruang pascaerupsi 2010, masyarakat Jogoyudan tidak mengandalkan bantuan dari pihak eksternal, melainkan dengan bantuan warga yang rumahnya tidak terkena dampak dari erupsi tersebut. Atau kepada relasi sosial yang berempati terhadap keadaan Jogoyudan saat itu sehingga untuk menutupi biaya pembangunan pascaerupsi masyarakat Jogoyudan mengandalkan swadaya masyarakat dan membuat berbagai event sebagai bagian untuk menguatkan komunitas.

Seiring berjalannya waktu, banyaknya event yang dibuat di Jogoyudan mempunyai dampak dimana lambat laun masyarakat mulai terbuka dengan pihak eksternal, salah satunya adalah dengan para akademisi. Banyak akademisi dari dalam ataupun luar negeri yang datang untuk melakukan riset dan juga pemberdayaan masyarakat. Pakubangsa sebagai komunitas yang tumbuh di daerah Jogoyudan mengakomodir dan menjadi media untuk mengkolaborasikan para akademisi tersebut dengan masyarakat setempat. Sehingga sekarang selalu ada program KKN setiap tahunnya dari berbagai universitas yang bekerja sama dengan masyarakat.

Dinamika Kesadaran Komunitas

Dinamika yang timbul sebab erupsi 2010 di kampung Jetisharjo dan Jogoyudan berdampak pada timbulnya suatu nilai dalam lingkup besar pada masyarakat. Dalam proses keberjalanannya kemunculan kesadaran merupakan hasil dari *getok tular* oleh bagian lain dari masyarakat kedua kampung yang tergabung menjadi komunitas. Ini membangun persepsi di dalam masyarakat bahwa terdapat aktor dalam segala macam pergerakan yang dilakukan. Aktor ini selain menjadi eksekutor, juga menjadi motor penggerak perubahan dan perkembangan masyarakat. Masyarakat Jetisharjo telah mendefinisikan Pemerti Code sebagai aktor yang bergerak dalam segala proses gerakan yang ada di kampung Jetisharjo. Begitu pula dengan masyarakat Jogoyudan yang mendefinisikan Pakubangsa sebagai aktor yang bergerak dan menjadi panutan dalam kampung Jogoyudan. Ini dikarenakan dengan berbagai proses yang ada telah menjadikan Pemerti Code dan Pakubangsa ke dalam bagian yang dominan. Bukti nyata bahwa Pemerti Code dan Pakubangsa dianggap sebagai aktor dalam kampung masing- masing adalah ketika terdapat individu atau kelompok yang masuk ke dalam kampung dan ingin membicarakan perihal sungai, maka warga mengarahkan pada kedua komunitas tersebut.

Komunitas Pemerti Code. Kronologi terbentuknya Pemerti Code telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Masyarakat kampung Jetisharjo telah memberi ruang akan tumbuh kembangnya komunitas yang telah lama hadir dalam tatanan sosial mereka. Faktor mengapa Pemerti Code dimaknai sebagai aktor dalam kampung Jetisharjo dibandingkan dengan beberapa kelompok yang berdiri di kampung Jetisharjo selain karena alasan pada penjelasan di atas juga dikarenakan Pemerti Code merupakan komunitas dengan lingkup yang lebih luas. Jika dibandingkan dengan Peta Bejo yang fokus pergerakannnya lebih mengarah kepada kebencanaan dan sosial masyarakat, Pemerti Code memiliki lingkup gerakan yang lebih luas

dan fleksibel dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, sifat Pemerti Code yang lebih progresif jika dibandingkan dengan komunitas lain yang tumbuh, menjadikan Pemerti Code dimaknai sebagai aktor yang dapat menginterpretasikan kampung Jetisharjo.

Pemerti Code telah melakukan banyak aktivitas, dimana pergerakan yang dilakukan kian beragam guna lebih mengena sasaran dan menarik di mata masyarakat luas. Salah satu gerakan yang juga menjadi tujuan dari adanya komunitas Pemerti Code adalah dengan membentuk komunitas-komunitas baru yang juga mengangkat isu sungai. Komunitas baru yang muncul ini bersifat lebih muda, dimaksudkan agar menarik perhatian kaum muda untuk turut memelihara sungai. Salah satu komunitas yang muncul adalah Komunitas Code Boyong Muda. Komunitas Code Boyong Muda terbentuk setelah adanya kegiatan Susur Sungai 2016 #1 dengan tema "MY CODE MY ADVENTURE" yang dilakukan oleh Pemerti Code pada 2016. Kegiatan Susur Sungai yang dilakukan oleh Pemerti Code ini dipergunakan sebagai media untuk merealisasikan tujuan pembentukan komunitas-komunitas baru. Eksekutor dari kegiatan susur sungai tersebut adalah kolaborasi antara Pemerti Code dan kelompok yang dahulunya tergabung dalam program sekolah sungai yang dilakukan oleh Pemerti Code. Selanjutnya, setelah susur sungai selesai dilaksanakan, diadakan pertemuan rutin setiap bulannya guna mengevaluasi kegiatan dan juga mulai membentuk kepengurusan.

Kepengurusan awal dan juga anggota awal merupakan peserta susur sungai yang masih aktif mengikuti pertemuan yang notabennya mempunyai sisi ketertarikan terhadap isu sungai. Anggota tersebut rata-rata adalah mahasiswa, pengurus karang taruna di berbagai wilayah di Yogyakarta, dan juga beberapa telah bekerja. Pada tanggal 15 Maret 2016 Komunitas Boyong Muda resmi berdiri, jika dilihat berdasarkan lingkup keanggotaan dan juga pergerakannya Code Boyong Muda tidak hanya di kampung Jetisharjo, melainkan

tersebar di beberapa kampung yang ada di Yogyakarta. Selain Code Boyong Muda, sebelumnya telah ada komunitas yang berdiri setelah adanya program dari Pemerti Code. Komunitas tersebut adalah Dek Paijem yang berdiri setelah adanya program kampung wisata yang dilaksanakan oleh Pemerti Code. Dek Paijem merupakan komunitas mural yang terbentuk di kampung Jetisharjo. Selain itu adanya komunitas Peta Bejo sendiri juga dapat disebut sebagai implikasi dari adanya pergerakan yang dilakukan Pemerti Code. Kelahiran beberapa komunitas tersebut merupakan bukti bahwa tujuan Pemerti Code untuk melahirkan komunitas-komunitas baru telah tercapai.

Selain menularkan semangat berbentuk gerakan komunitas kepada masyarakat luas, gerakan lain yang dilakukan oleh Pemerti Code khususnya untuk kampung Jetisharjo adalah kegiatan yang dapat dikatakan sederhana seperti bersih-bersih kali dan beberapa kegiatan yang mendukungnya. Salah satu hasil dari kegiatan yang menjadi simbol bahwa Pemerti Code hidup di dalam kampung Jetisharjo adalah adanya Tirta Kencana. Tirta Kencana merupakan tata cara pengelolaan air bersih untuk kehidupan masyarakat kampung Jetisharjo. Nama dari Tirta Kencana sendiri diambil dari perusahaan yang bekerja sama dengan Pemerti Code.Dulunya, pengelolaan air bersih di Jetisharjo ini terpikirkan pada tahun 2006 yang pada saat itu salah satu tokoh Pemerti Code yakni Pak Totok menjadi ketua RW 07 di kampung Jetisharjo. Inisiasi ini timbul dikarenakan keruhnya air kali. Padahal masyarakat mengandalkan air kali untuk kehidupan sehari-hari maka muncullah gagasan Tirta Kencana. Secara teknis, Tirta Kencana berbentuk lubang-lubang seperti sumur untuk mewadahi air hujan dan juga merupakan penampungan dari sumber mata air yang telah disalurkan oleh alat-alat pompa air. Masyarakat Jetisharjo setiap bulan ditarik biaya Rp. 9.000 rupiah untuk pengelolaan air ini. Tirta Kencana merupakan suatu ide inovasi yang sederhana namun memiliki daya guna yang luar biasa. Dan secara tidak langsung dapat berdampak pada b kampung Jetisharjo yakni menjadi kampung-

kota pinggir sungai dengan sistem pengelolaan air dan sanitasi yang rapi, menarik, dan mandiri sehingga banyak perhatian kampung-kampung pinggiran sungai dari berbagai daerah.

Menilik kembali selama keberjalanan komunitas Pemerti Code yang memang basis pertumbuhan awalnya berada di Jetisharjo tentu sangat penting mengetahui apakah masyarakat merasakan adanya dampak yang ditimbulkan. Perasaan untuk merasakan dampak tersebut merupakan implikasi dari eksistensi Pemerti Code sendiri dalam diri masyarakat Jetisharjo. Kini sebagian masyarakat Jetisharjo mendefinisikan Pemerti Code bukan merupakan suatu komunitas, melainkan ritual. Hal ini tentu saja terkait dengan histori dari gerakan yang dilakukan oleh FMCU sebelum Pemerti Code hadir. Pemaknaan ini masih berlangsung sampai saat ini dimana perihal mengenai pemaknaan ini diperkuat oleh beberapa jawaban informan ketika berdialog tentang Pemerti Code maka yang simbol yang akan ditampakkan adalah kegiatan merawat sungai. Eksistensi dari Pemerti Code kini lebih nampak dalam konteks yang lebih luas dan juga dalam lingkup kota Yogyakarta. Ini dibuktikan dengan berita media mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga ampung wisata menjadi tagline yang paling sering dijumpai apabila kita mencari kampung Jetisharjo.

Komunitas Pakubangsa. Dinamika dan pergerakan yang terjadi di kampung Jogoyudan dimotori oleh Pakubangsa. Hal ini menjadikan masyarakat bergantung dan memaknai Pakubangsa sebagai aktor pergerakan dan juga media untuk berkeluh kesah mengenai kesulitan yang bersifat umum seperti masalah pemukiman, ekologi, pendidikan, ataupun masalah ekonomi. Pakubangsa menjadi komunitas tunggal yang tumbuh dan berkembang di kampung Jogoyudan. Sesuai gagasan awal pembentukkan, Pakubangsa telah melakukan berbagai kegiatan yang juga merupakan pergerakan dari komunitas tersebut. Mayoritas dari pergerakan tersebut memang untuk pertahanan pemukiman yang selama ini telah ditinggali.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan kelegalan atas tanah tersebut. Diantaranya adalah dengan memproses berbagai sertifikasi rumah untuk mendapat pengakuan secara hukum legal dan berkoordinasi dengan kelompok dan komunitas lain yang mempunyai nasib yang serupa. Berbagai upaya yang dilakukan Pakubangsa tentunya memantik pengetahuan dan pemaknaan masyarakat Jogoyudan mengenai identitas komunitas Pakubangsa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pakubangsa dimaknai sebagai komunitas yang membantu mereka dalam kehidupan dan berangkat dari keluhan-keluhan warga dikampung-kota seperti Jogoyudan sehingga Pakubangsa banyak berkembang di RT 32/RW 07 Jogoyudan. Sementara segala upaya yang dilakukan secara tidak langsung harusnya mendongkrak eksistensi kampung didalam sektor pemerintahan terkecil yaitu komunitas di level Rukun Warga. Maka sama seperti pembahasan sebelumnya, menarik melihat sudut pandang mengenai kampung Jogoyudan melalui paradigma Kelurahan setempat.

Faktor pendorong keberjalanan pergerakan dari Pakubangsa dan juga Pemerti Code dilandasi oleh keyakinan dari keyakinan bahwa Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan sungai dan pemukiman sendiri. Ini dibuktikan dengan data KLH 2014 dimana 73% sungai di Indonesia masuk kategori tercemar berat. Selain itu para penggerak yang tergabung dalam komunitas mayoritas adalah sebagai pihak yang paling tahu kondisi sungai setempat (Kali Code). Kemudian relasi sosial yang mulai terbangun. Masing-masing komunitas harus berkontribusi untuk mencapai sasaran tertentu. Dimana akan terjadi simbiosis mutualisme antarkomunitas yang telah terjalin secara kontinyu. Selain itu, adanya hukum yang memayungi gerakan masyarakat ataupun gerakan komunitas dalam regulasi sungai yang tercatat di PP No 38 tahun 2011 dalam ringkasan BAB III tentang Pengelolaan Sungai Pasal 18 dan 19).

Dampak dari Gerakan Komunitas Code

Perbaikan Ekologi Sungai

Terjaganya ekologi sungai merupakan implikasi dari adanya perubahan pola pikir masyarakat di kampung Jetisharjo dan Jogoyudan serta keberadaan komunitas. Masyarakat yang pada awalnya hidup dalam peradaban air dimana sungai menjadi sumber kehidupan berubah seiring berjalannya peradaban ekonomi yang menyita perhatian masyarakat urban. Namun pascaerupsi 2010 maka pemaknaan terhadap sungai berubah oleh adanya ancaman bagi masyarakat. Walaupun tidak seluruh masyarakat kampung Jetisharjo dan Jogoyudan memaknai hal yang sama. Kemudian dengan kemunculan komunitas dan segala gerakan yang dilakukan telah merekontruksi pemaknaan terhadap sungai. Perubahan pola pikir masyarakat ini dibuktikan dengan perubahan tatanan fisik pemukiman masyarakat yang dahulunya membelakangi sungai menjadi berhadapan dengan sungai. Terlepas apakah ada campur tangan dari Pemerintah Kota namun perubahan fisik ini terlihat di hampir semua kampung-kota yang ada dipinggiran Code termasuk kampung Jetisharjo dan Jogoyudan. Selain ditunjukkan oleh tatanan fisik, perubahan pola perilaku ini juga terwujud dengan perilaku masyarakat dalam berinteraksi terhadap sungai. Sungai kini menjadi media yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan komunitas yang tumbuh di dalamnya.

Tentu saja perubahan ekologi sungai ini mengalami dinamika pasang surut. Dimana kejadian atas dinamika tersebut berawal ketika kota Yogyakarta terbentuk pada saat itu keadaan ekologi Kali Code masih dalam keadaan yang sangat alami. Pohon bambu yang menjadi ciri bahwa kali itu hidup dan terawat masih banyak dijumpai. Keadaan air masih sangat jernih dan masih terdapat ruang lapang kecil di tengah sungai atau masyarakat biasa menyebutnya dengan *mbelik*. Selain itu jarak antara kali dan pemukiman masih sangat jauh tanpa ada talut yang menjadi pembatas interaksi masyarakat dengan

sungai. Masyarakat urban datang dengan orientasi ekonomi yang kemudian memberikan dampak rusaknya ekologi sungai. Adanya erupsi merapi yang menyebabkan lahar dingin menghancukan sebagian kampung dan juga membanjiri pemukiman yang dilewatinya semakin merusak ekologi sungai. Hal ini memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa menjaga kebersihan sungai menjadi pengetahuan baru yang telah menimbulkan aksi kesadaran untuk menjaga ekologi sungai. Aksi ini dilakukan masyarakat secara terus menerus dan adanya komunitas telah berperan sebagai penggerak awal gerakan kepedulian terhadap sungai dan ekologinya.

Namun tidak serta merta semua keadaan baik, memang saat kita mendiskusikan mengenai ekologi sungai akan timbul paradigma yang berlawanan arah seperti sebuah mata pisau. Keadaan ekologi sungai saat ini dapat dimaknai dengan lebih baik ataupun lebih buruk. Keadaan seperti ini terjadi baik di kampung Jetisharjo dan Jogoyudan. Dinamika mengenai keadaan ekologi Code di Jetisharjo ditandani dengan prosesi Merti Code dan juga pembuatan Tirta Kencana. Dimana Merti Code menjadi ritual yang sekaligus menjadi saksi awal kesadaran masyarakat Jetisharjo terhadap kebersihan sungai. Dan Tirta Kencana menjadi bukti bahwa air yang terkandung dalam Code mangandung unsur kimia dan sudah hilang sifat asli air sungai Code yang berlimpah ruah dan bersih. Kampung Jogoyudan pertanda adanya perubahan ekologi sungai adalah ditinggikannya talut sepanjang kampung yang tentu saja juga melewati kampung Jogoyudan. Talud ini menjadi saksi bahwa awal mula masyarakat menganggap bahwa ekologi sungai bukan lagi kawan melainkan ancaman bagi masyarakat. Talut juga menjadi pembatas aktivitas masyarakat terhadap sungai. Namun di sisi lain, talut juga menjadi solusi untuk mengingatkan masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga ekologi sungai. Selain talud yang menjadi saksi adanya perubahan ekologi sungai adalah sumur timba yang berada di pinggir Code. Sumur timba ini sebagai penanda bahwa masyarakat telah menganggap air Code tidak berlimpah ruah dan juga tidak

bersih. Pohon-pohon bambu penanda kealamian sungai sempat mati dan tidak ada tanaman yang menghiasi pinggir kali namun sekarang dapat dijumpai berbagai tanaman dalam trashbag yang diletakkan di seluruh talud kali.

Wisata Kampung-Kota

Saat ini Yogyakarta selain berpredikat sebagai Kota Pelajar juga sedang menggali wisata yang ada didalamnya guna lebih memperkaya tagline Jogja Istimewa. Gagasan Code saat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Yogyakarta, dikarenakan letak Code yang membelah di tengah kota, dan juga mempunyai nilai budaya serta histori yang menarik untuk dijadikan konten tersendiri dengan isu wisata kampung-kota. Hal ini terbukti dengan keseriusan Pemerintah Yogyakarta dalam menggarap kampung wisata di sepanjang Code. Berdasakan pada PP No 38 Tahun 2011 tentang sungai yang terfokus yang mengatur tentang Ruang Sungai dan BAB III yang mengatur tentang Tata Kelola Sungai. Dan juga berdasar pada Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta dimana di dalamnya memuat rencana yang akan dilakukan Pemerintah di tahun 2010-2029, Pemerintah Yogyakarta telah merencanakan wisata air yang berada di kawasan pinggir sepanjang Code (hukum. jogjakarta.go.id).

Wacana mengenai sungai Code yang berpotensi sebagai wisata ditangkap oleh masyarakat yang tinggal di kampung-kampung pinggir Code. Begitu juga dengan kampung Jetisharjo dan kampung Jogoyudan. Pembangunan kampung wisata menjadi refleksi dari eksistensi yang sudah didapat saat memperluas relasi sosial. Kampung Jetisharjo dengan Pemerti Code yang menjadi eksekutor memanfaatkan isu tersebut untuk membentuk kampung wisata. Area wisata yang ditawarkan berinduk di kampung Jetisharjo dan kemudian seiring berjalannya waktu membentuk jaringan dengan kampung yang lain agar konten yang ditawarkan semakin banyak. Pembangunan kampung wisata ini juga merupakan dampak

dari kegiatan Merti Code yang telah berhasil menarik perhatian masyarakat luas, melebihi target yang diharapkan sehingga menjadi candu tersendiri bagi Pemerti Code untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kampung. Pembentukan kampung wisata ini sudah mulai direncanakan ketika masih ada komunitas FMCU. Ini dibuktikan dengan dokumentasi FMCU yang berupa foto-foto yang menampilkan kegiatan sarasehan guna merancang tatanan awal wisata Kali Code.

Dulunya, wisata yang ditawarkan adalah wisata Merti Code kemudian seiring berjalannya waktu maka terbentuklah keseriusan tentang pembangunan kampung-kota wisata. Ini terbukti dari terbentuknya perkumpulan masyarakat Jetisharjo RW 07 yang memiliki fokus konsentrasi sebagai pengurus kampung wisata Jetisharjo. Keseriusan ini juga terbukti secara simbolik dengan kenampakan kampung Jetisharjo yang dipenuhi dengan mural yang digambar oleh kumpulan anak muda Jetisharjo yang bernama Dek Paijem. Kampung Jetisharjo telah membentuk fisik kampung menyerupai kawasan wisata, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam fasilitas kampung yang sedikit demi sedikit manjadi bagian dari wisata kampung. Dimulai dari pintu masuk kawasan kampung Jetisharjo RW 07 telah banyak ornamen mural dan juga patung-patung yang memang sengaja dibuat di tembok agar terkesan artistik. Selain itu, sungai yang menjadi konten utama dari wisata kampung telah diperhatikan kebersihannya serta didukung oleh pembangunan ruang untuk menjamu tamu yang datang plus dengan dilirisnnya *leaflet* dari kampung wisata dengan lingkup tidak hanya di kampung Jetisharjo saja.

Persepsi tentang kampung wisata ini, menjadi persepsi yang semi kontra di daerah Jogoyudan. Di Jogoyudan, masyarakat yang tergabung oleh Pakubangsa memiliki kekhawatiran bahwa ketika kampung mereka dijadikan sebagai kampung wisata maka akan banyak investor yang membidik dan ingin membeli tanah yang

sekarang dijadikan tempat tinggal. Kondisi akan semakin sulit ketika mengingat status hak milik mereka merupakan Hak Guna Bangunan (HGB). Kekhawatiran semakin bertambah dengan habisnya masa tempo tanah atas pemukiman nanti di taun 2019. Jika dihubungkan, terjadi keterkaitan antara Perda Yogyakarta yang habis di tahun 2029 dan karakteristik Pemerintahan pada masa sekarang. Kekhawatiran tersebut ternyata tidak berpengaruh pada rencana Pemerintah kampung Jogoyudan akan dijadikannya wisata. Dikarenakan letak kampung Jogoyudan yang termasuk ke dalam kawasan Code Tengah dan secara geografis berada di depan kampung binaan Romo Mangun yang menjadi konten sejarah dan ikon rumah berwarna-warni yang nantinya akan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Sesuai rencana, wisata air Code nantinya akan menggunakan teknik seperti Gondola. Aplikasi dari konsep Gondola tersebut diwujudkan oleh perahu kayu yang nantinya akan berjalan di atas aliran Code mulai dari Jembatan Gondolayu sampai ke jembatan Kewek.

Saat ini penataan kampung Jogoyudan sedang berlangsung. Penataan ini dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta dibantu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mulia Artha Kelurahan Gowongan. Penetaan tersebut berbentuk pelabaran akses jalan yang tadinya hanya selebar 1 meter menjadi 3 meter, pembangunan talud yang awalnya terbuat dari batu-batu yang ditata dan ditali oleh jala menjadi talud dengan nuansa kental Yogyakarta, kemudian penataan pemukiman dengan menghadapkan bangunan yang masih membelakangi sungai menjadi berhadapan dengan sungai. Dengan mengusung konsep Mundur Munggah Madep Kali (M3K). Kawasan Jogoyudan bagian selatan telah tertata dan kemudian akan dilanjutkan ke utara. Kelanjutan ini ditandai dengan pembukaan kenduri pembangunan tahap III Kampung Wisata Jogoyudan pada 2016. Dimana target dari Pemerintah, pada tahun 2017 Jogoyudan siap untuk menjadi kampung wisata (sumber: www.radarjogja.co.id). Namun keadaan keadaan pembangunan tersebut belum seluruhnya menyentuh kawasan Jogoyudan RW 08. Dibuktikan dengan masih

digunakannya talud dan kawasan sempadan untuk keperluan rumah tangga dan banyaknya warga yang cemas serta terfokus kepada perjuangan untuk mengajukan perpanjangan tempo lahan pemukiman.

Sekolah Komunitas

Kesadaran warga mengenai pentingnya edukasi mulai timbul dan terwujud dalam program atau kegiatan yang dilakukan komunitas yang tumbuh dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga terjadi pada masyarakat kampung Jetisharjo dan juga Jogoyudan. Implikasi anggapan tersebut adalah dengan adanya sekolah-sekolah non-formal yang saat ini berdiri. Sekolah tersebut berada pada kampung masing-masing dengan peserta atau murid yang bersekolah disana merupakan anak dari warga yang tinggal di kampung-kota. Kampung Jetisharjo merintis sekolah non-formal yang dibangun lebih menekankan pada lingkungan. Hal ini timbul disebabkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menanamkan pendidikan menganai ekologi sungai ini kepada warga setempat. Maka terbentuklah sekolah yang bernama Sekolah Sungai, dimana pendidikan Sekolah Sungai dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau yang ada di kampung Jetisharjo. Terbentuknya sekolah sungai ini berawal dari program Pemerti Code yang bekerja sama dengan BNPB dengan nama yang sama, yakni Sekolah Sungai. Sekolah sungai pertama kali dibentuk pada tahun 2014 dan sekarang sekolah sungai dilakukan sebagai sarana edukasi masyarakat sekitar Code khususnya di kampung Jetisharjo. Adapun materi yang diajarkan adalah tentang pengelolaan sampah sungai, penghijauan, dan cara merawat lingkungan khususnya aplikasi di sekitar daerah bantaran sungai.

Seiring berjalannya waktu, sekolah sungai mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar yang berkunjung ke Jetisharjo untuk ikut menjadi peserta. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka saat ini Sekolah Sungai mengalami perubahan tujuan yakni

tidak saja menjadi kebutuhan masyarakat Jetisharjo saja melainkan telah bergeser materinya yang ditawarkan dan dimasukkan ke dalam paket wisata di Jetisharjo. Dimana dalam konten wisata sekolah sungai ini, dibentuk dalam berbagai paket. Antara lain : paket untuk keluarga, rombongan sekolah, komunitas, dan juga paket individu. Teknis pelaksanakan biasanya Pemerti Code melakukan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan juga dengan komunitas dengan isu terkait untuk menjadi tenaga pengajar. Seperti dengan Universitas Gajah Mada yang mengajar anak-anak dalam sekolah sungai di awal keberdiriaanya dan juga komunitas Jogja Berkebun (Jokbun) yang pada tahun ini mulai bekerja sama dengan Pemerti Code untuk juga membantu program sekolah sungai.

Di kampung Jogoyudan, sekolah komunitas terbentuk sebagai solusi masyarakat dimana rata-rata pendidikan masyarakat Jogoyudan dapat dikatakan masih rendah. Latar belakang warga kampung-kota yang masih kurang memperhatikan masalah pendidikan juga menjadi faktor pendorong timbulnya sekolah. Nama dari sekolah yang dibentuk adalah Sekolah Rakyat, dimana Sekolah Rakyat berdiri pada tahun 2012 dan dirikan oleh komunitas Pakubangsa dengan basis meningkatkan sumber daya manusia yang terfokus pada anak-anak yang ada di kampung Jogoyudan. Selain itu, Sekolah Rakyat juga bertujuan untuk memberi stimulus kepada masyarakat di kampung Jogoyudan mengenai pentingnya pendidikan. Konten yang ditekankan adalah pelajaran yang ada di sekolah, oleh sebab itu masyarakat Jogoyudan lebih mengenal Sekolah Rakyat dengan sebutan Bimbel. Siswa yang mengikuti kegiatan ini rata-rata mulai dari anak kelas SD sampai dengan SMP. Pelaksanaan kegiatan Sekolah Rakyat ini berada di halaman Pos Serba Guna yang ada di RT 32 yang juga menjadi ruang publik dari kampung Jogoyudan. Waktu yang digunakan untuk bimbingan belajar yakni hari Senin-Jumat pada pukul 16.00 sampai sebelum magrib.

Sekolah Rakyat mempunyai struktur kepengurusan yang hampir sama dengan sekolah formal pada umumny, yaitu terdapat Kepala Sekolah, Sekretaris, dan juga ada Ketua Komite. Dalam proses belajar mengajar, tenaga pengajar berasal dari mahasiswa yang telah menjalin relasi sebelumnya dengan komunitas Pakubangsa. Skema tersebut hasil dari program Kuliah Keja Nyata dari Universitas yang selalu dialokasikan di Jogoyudan setiap tahunnya. Selain itu ada juga melalui kegiatan tugas serta ada yang serta merta hanya dengan basis sosial. Dalam proses keberjalannya Sekolah Rakyat mengalami dinamika seiring dengan kegiatan dan berbagai strategi pengurus sekolah dan juga Pakubangsa akhirnya dukungan dari orang tuapun lambat laun kian meningkat dan stabil.

Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penguatan ekonomi warga menjadi gerakan yang juga dilakukan oleh komunitas Pemerti Code dan juga Pakubangsa. Selain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkaya pengetahuan masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat juga merasakan dampak adanya pergerakan yang memudahkan mereka dalam hal kehidupan ekonomi. Selain itu jika ditilik berdasarkan latar belakang lahirnya komunitas, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama mengapa komunitas tersebut dibangun. Dalam prosesnya, terdapat diferensiasi cara yang digunakan oleh Pemerti Code dan juga Pakubangsa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kampung Jetisharjo yang notabenenya sudah mulai terbentuk menjadi kampung wisata, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk melengkapi elemen-elemen yang seharusnya ada dalam suatu tempat wisata. Seperti pengadaan *homestay*, cafe, jajanan-jajanan untuk menyambut tamu, entertainer yang berwujud peragaan Bergodo Keraton dan berbagai kesenian, sampai membentuk kelompok yang khusus menangani konsumsi untuk wisatawan. Selain itu, terdapat edukasi pembuatan *souvenir* dari sampah agar mempunyai

nilai jual yang lebih. Setiap terdapat kunjungan, maka semua hasil kreativitas yang dibuat masyarakat tersebut akan dipamerkan atau dipergunakan sehingga menambah pemasukan masyarakat.

Pakubangsa menyadari adanya kebutuhan ekonomi pada masyarakat kampung Jogoyudan. Ini dikarenakan memang mayoritas masyarakat berada dalam karakteristik masyarakat rentan secara ekonomi. Oleh sebab itu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dibuatlah pelatihan-pelatihan yang berbasis kreatif dan memanfaatkan barang-barang bekas ataupun barang rumah tangga sebagai bahan baku, yang kemudian dapat mempunyai nilai jual lebih. Pelatihan tersebut biasanya diperuntukan untuk ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di kampung Jogoyudan. Dikarenakan keadaan kampung Jogoyudan yang saat ini belum dipergunakan sebagai kampung wisata, maka untuk memasarkan hasil kreativitasnya pasar yang dituju untuk memasakan produk adalah Pasar Malioboro. Pelatihan ini tidak dilakukan secara reguler dan tempat yang digunakan untuk pelatihan adalah di Pos Serbaguna atau di salah satu rumah warga. Jika diproyeksikan menurut rencana Pemerintah Kota Yogyakarta dimasa depan dimana kampung Jogoyudan menjadi kampung wisata, maka proses pelatihan kreatifitas ini akan dapat menjadi modal pengetahuan bagi masyarakat. Dimana nantinya barang yang akan diproduksi dapat menjadi potensi kampung sehingga tujuan atas diadakannya pelatihan di masa sekarang menjadi alternatif langkah yang paling tepat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Indonesiatera

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 1985. *Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan*, dalam *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Tahun XII, No. 2*

Asdak, C. 1995. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press

Bintarto, 1991. *Geografi Manusia (Teori, Tema, dan metodologi)*. Proc. Seminar Aplikasi Peneitian Geografi Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Bodgan, Robert dan Taylor, Steven J. 1993. *Kualitatif, Dasar-Dasar Penelitian* : Usaha Nasional

Bungin, Burhan, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Rajagrafindo Persada

Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, California

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2010. BPS DIY

Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah 2015. Pemkot Surakarta

Direktorat Geografi Sejarah. 2008. *Sungai Sebagai Pusat Peradaban.* Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

Djanen, Bale. 1996. *Analisis Pola Permukiman Perairan di Indonesia.* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta

Effendi, E. 2008. *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.* Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Kanisius

Haslam, S.M. 1995. *River Pollution, an Ecological Perspective*. Belhaven Press.

Herliana, Invani Lela. 2011. *Aku Bangga Jadi Anak Kampung, Memaknai Kembali Identitas Kampung Bumen*. Yayasan Pondok Rakyat

Inoguchi, Dkk 2003 Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi. LP3ES

Khudori, Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan*. Yayasan Pondok Rakyat

Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.

Kodoatie, Robert J dan Sugiyanto. 2001. *Banjir*. Pustaka Pelajar.

Kodoatie, Robert J. 2002. *Hidrolika Terapan Aliran Pada Saluran Terbuka Dan Pipa*. Andi Offset

Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka

Kongres Sungai Indonesia, 2015, Indonesia Darurat Sumberdaya Air

Kutanegara, Pande, M. 2014. *Manusia, Lingkungan Dan Sungai. Transformasi Sosial Kehidupan Masyarakat Sepadan Sungai Code.* Ombak-UGM

Kutanegara, Pande. 2014. *Manusia, Lingkungan, dan Sungai*. Penerbit Ombak

Laporan Jurnalistik Kompas. 2008. *Ekspedisi Bengawan Solo, Kehancuran Peradaban Sungai Besar.* Kompas

Laporan Jurnalistik Kompas. 2009. *Ekspedisi Ciliwung, Mata Air, Air Mata.* Kompas

Laporan Jurnalistik Kompas. 2011. *Ekspedisi Citarum, Sejuta Pesona Dan Persoalan.* Kompas

Maryono, Agus 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*. Gajah Mada Press University

Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan.* Yayasan Obor Indonesia

Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Resist Book.

Mitchell, Dkk, 2000. *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.: Remaja Rosdakarya.

Mullins, Patrick. Edt. 1999. *Cities and Consumption Spaces*. Urban Affairs, 1999. Sage Publication

Newman, Peter And Kenworthy, Jeffrey, 1999. *Sustainable Cities.* Island Press

Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan : Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia* : Lingkaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

Ramdhon, Akhmad, Dkk. 2014. *Menyuarakan Kampung, Diriuhnya Kota: Kampungnesia, Proyek Dokumentasi Kampung Kota.* CCCMS Universitas Islam Indonesia

Ramdhon, Akhmad. 2013. *Kampung (Kota) Kita*. Lab. Sosio FISIP UNS

Ramdhon, Akhmad. 2016. *Merayakan Negara Mematrikan Tradisi, Narasi Perubahan Kampung-Kota Di Surakarta*. Buku Litera

Ramdhon, Akhmad. Zunariyah, Siti. 2016. *Kampungnesia: Media Transformasi Komunitas Untuk Merawat Kembali Kampung, Sungai Dan Kota*. APSSI-ISI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Ramdhon, Akhmad. Zunariyah, Siti. 2016. *Pengembangan Peta Partisipatif Berbasis Open Street Map Untuk Sungai-Kampung Di Surakarta*. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna, LIPI

Reason, Peter, 1994. *Three Approaches To Participative Inquiry*. Dalam Norman K Denzin Dan Ivonna S. Lincoln (Eds). Handbook Of Qualitative Research. Sage Publication.

Rencana Aksi Daerah, Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Daerah Kota Yogyakarta 2007-2011. Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 557 Tahun 2007

Rencana Aksi Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2007-2011. Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 617 Tahun 2007

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta. Perda Propinsi DI Yogyakarta, No 1 Tahun 2012

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta. Perda Propinsi DI Yogyakarta, No 4 Tahun 1999

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015. Perda Pemerintah Kota Surakarta, No 12 Tahun 2010

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Perda Pemerintah Kota Surakarta, No 2 Tahun 2010

Richmond, Alison and Alison Bracker. 2009. *Conservation: Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths*. Victoria and Albert Museum London

Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Pustaka Pelajar

Siradz, Syamsul A, Endra Setyo Harsono, Ismi Purba, 2008. *Kualitas Air...Sungai Code, Winongo dan Gajah Wong, Daerah IstimewaYogyakarta*. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan.* Vol. 8, No 2

Smelser, Neil J. 1962. *Theory of Collective Behavior*. London: Routledge and Kegan Paul and New York: The Free Press of Glencoe

Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan.* Djambatan.

Soeriaatmadja, R. E. 1989. *Ilmu Lingkungan.* Penerbit ITB.

Sugiarto. 1993. *Dasar-Dasar Pengolahan Air Limbah*. Kanisius.

Suriawiria, U. 1996. *Mikrobiologi Air dan Dasar-Dasar Pengolahan Air Buangan Secara Biologis.* Penerbit Alumni

Susilo, Rachmad K. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang–Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Rajagrafindo

Yunus, Hadi Sabari. 1987. *Geografi Permukiman dan Beberapa Permasalahan Permukiman di Indonesia.* Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

Yunus, Hadi Sabari. 2004. *Struktur Tata Ruang Kota.* Pustaka Setia.

Zanden, James W. Vander. 1990. *The Social Experience: An Introduction To Sociology*. McGraw-Hill Publishing

Zunariyah, Siti dan Ramdhon, Akhmad. 2016. *Gerakan Sosial Warga untuk Mendorong Tata Kelola Sungai yang Berwawasan Lingkungan*. APPSI-ISI dan Universitas Andalas Padang

Zunariyah, Siti dan Ramdhon, Akhmad. 2016. *Memetri Kali as "Memetri Kali" as Transformative Learning Media for Sociology Students in Order to Care about Environmental Issue*. TVET UPI Bandung

Zunariyah, Siti, 2006. *Perempuan Dan Kelangkaan Air.* Yayasan DAMAR dan Population Council

INDEKS

R

S

T

V

W

SUNGAI, KAMPUNG, DAN KOTA

Konsekuensi kota yang tumbuh angkuh oleh proyek-proyek pembangunan adalah mengabaikan kampung-kota sebagai entitas yang lebih awal hadir. Narasi kampung dan sungai yang hari ini kita warisi patah dan tak terkoneksi dengan tapak peradaban yang membentuk kota-sebelumnya. Kampung lalu bergerak otonom bersama memori dan mental warga yang dibentuk oleh lapis-lapis kenangan atas tradisi untuk bertahan di samping derunya kota yang berlari kencang. Anak-anak kota mengalami amnesia yang parah oleh sebab tak adanya pegangan untuk memahami kota mereka, kampung mereka dan hubungan antara keduanya. Berjalan ke kota dari kampung, seperti hendak berkunjung ke kota-kota lainnya: semua seragam, asing dan terburu-buru. Seperti ingin lekas pulang ke rumah dan kampung untuk bisa segera bertegur sapa dengan sesama di pos ronda, *buk* tempat kumpul, berlarian di gang nan sempit, memasak bersama di teras, bermain layangan di lapangan, hingga menjemur kasur dan cucian di halaman. Sungai-sungai di kampungpun diam membisu: pasrah menjadi halaman belakang kota, jadi tempat mengakumulasikan beban pembangunan kota-terus menerus. Sungai dipaksa semakin menyempit, tak punya ruang karena ditimpa bangunan, trotoar dan jalan raya yang harus dibentuk sebagai sebagai penanda kota. Tumpukan sampah, limbah industri hingga aliran air hujan tak lagi sanggup ditopang oleh sungai-sungai kita hari ini. Kampung dan sungai termarjinalkan oleh kita semua, kampung-kota dan sungai yang dulu pernah membentuk kota kelak akan mengubur kota bersama alam yang tak lestari.

LITERA
Minggiran MJ II/1378, RT 63/17
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407445
bukulitera@gmail.com